

MERAJUT KERUKUNAN DI JAYAPURA

Pura Agung Surya Bhuvana yang merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu di Jayapura kini sangat ramai dikunjungi masyarakat setempat. Padahal mereka tidak menganut agama Hindu. Seni budaya Bali dan budaya Papua yang terintegrasi secara harmonis pada arsitektur bangunan suci pura tampak mampu memberi suasana sejuk, nyaman, dan damai bagi masyarakat di Jayapura.

Di Indonesia, hingga kini belum ada hasil penelitian yang membahas tentang makna Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) bagi kerukunan hidup beragama di Jayapura. Oleh sebab itu hasil penelitian yang dibukukan ini diharapkan berguna bagi pelestarian seni budaya dan penguatan karakter bangsa. Keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) yang kini menjadi media kerukunan hidup beragama bagi masyarakat di Jayapura bisa dijadikan referensi dalam mempelajari kearifan budaya lokal mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Dengan memahami makna Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Jayapura diharapkan masyarakat akan lebih mencintai dan melestarikan budayanya sehingga pewarisan nilai-nilai adi luhung yang terkandung dalam pura tersebut dapat berlangsung secara lintas generasi, yang secara tidak langsung akan berimplikasi bagi penguatan karakter bangsa Indonesia pada era global ini.



Penerbit Aseni
Jl. Mambuk, RT 025, Kelurahan Kwamki,
Mimika Baru, Papua
www.penerbitaseni.com



200005

ISBN 978-623-7185-16-1



9 786237 185161



Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A., dkk.



MERAJUT KERUKUNAN DI JAYAPURA

Diaspora Ethnis Bali Penyung
Pura Agung Surya Bhuvana

Dr. Ni Made Ruastiti, SST., M.Si. (editor)

MERAJUT KERUKUNAN DI JAYAPURA

Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A., dkk.



MERAJUT KERUKUNAN DI JAYAPURA

Diaspora Ethnis Bali Penyungsong
Pura Agung Surya Bhuvana

Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A., dkk.



Dr. Ni Made Ruastiti, SST., M.Si. (editor)



INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI)
TANAH PAPUA



MERAJUT KERUKUNAN DI JAYAPURA

Diaspora Ethnis Bali Penyungsurung Pura Agung Surya Bhuvana

Oleh: Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A., I Gusti Made Sunartha, S.Ag, MM.,
Ida Ayu Made Purnamaningsih, S.Sos., H.,M.Ikom.,
I Gde Agus Jaya Sadguna, SST.Par., M.Par.

200005

©Aseni 2020

Buku ini diterbitkan atas kerja sama:



INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) TANAH PAPUA

Jl. Raya Abepura – Sentani, Waena, Sentani, Jayapura – 99225
Papua, INDONESIA

dengan



Penerbit Aseni (Anggota IKAPI Pusat)

Jl. Mambruk, RT 025,
Kelurahan Kwamki, Mimika Baru, Papua, INDONESIA
Telp. 0877 3849 2767, 0822 3827 8001
Website: www.penerbitaseni.com
Email: office@penerbitaseni.com

Editor: Dr. Ni Made Ruastiti, SST., M.Si.

Desain sampul: Mischa Sekarpandya

ISBN 978-623-7185-16-1

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa
pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan *Ida Sanghyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa), karena atas *Asung Kerhta Waranugraha-Nya*, penyusunan buku berjudul “Merajut Kerukunan di Jayapura (Diaspora Ethnis Bali Penyungsurung Pura Agung Surya Bhuvana)” berhasil kami lakukan.

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang “Makna Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) Dalam Kerukunan Hidup Beragama Di Jayapura Pada Era Global”. Penelitian yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 ini dibiayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hasil dan temuan dari penelitian tersebut disajikan dalam buku ini. Etnis Hindu Bali menjadi pionier dalam pendirian Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dan kemajuan kehidupan sosial-keagamaan umat Hindu di Jayapura. Untuk itu, setelah memaparkan etnografi masyarakat Papua di Irianjaya (Bab II), buku ini membahas sejarah (geneologi) Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Jayapura yang diresmikan pada tahun 1990, serta diaspora dan peranan etnis Bali dalam dinamika kehidupan umat beragama di Jayapura (Bab III).

Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang keberadaan PASB di era revolusi Industri 4.0 masa kini. Disamping sebagai tempat ibadah umat Hindu, PASB ternyata berkembang menjadi obyek wisata dan media perekat persatuan antarwarga bangsa di Kota Jayapura (Bab IV).

Berkembangnya PASB sebagai obyek wisata budaya dan media perekat kerukunan antarwarga bangsa di Jayapura, tidak terlepas dengan kiprah pemuka umat Hindu setempat dalam mewacanakan agama melalui pendekatan seni-budaya. Dalam kaitan ini, maka pada Bab V sengaja diketengahkan topik merajut kerukunan melalui seni-budaya (Bab V). Terakhir, Bab VI diketengahkan mengenai beberapa catatan tindak lanjut sebagai penutup atas isi publikasi ini.

Buku ini tak akan pernah tersusun tanpa dukungan segenap pihak. Untuk itu, kami selaku tim penyusun mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada *pengempon* dan *penyunsung* PASB serta para pemuka agama dan tokoh masyarakat pengurus PHDI Kota Jayapura, PHDI Provinsi Papua yang telah berkenan memberikan informasi dan data lapangan sehingga proses penelitian dan penyusunan buku ini bisa dilaksanakan. Terima kasih dan penghargaan juga perlu kami sampaikan kepada teman-teman sejawat dari Kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, dan Instiut Seni Indonesia (ISI) Denpasar yang telah mendukung proses penelitian ini.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula format dan isi buku ini yang belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, bilaman ada saran, kritik dan masukan dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini lebih lanjut penulis akan terima dengan senang hati dan lapang dada.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini ada manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama (antar warga bangsa) dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multi ethnik ini.

Denpasar, 1 Maret 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
GLOSARIUM	vii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Telaah Pustaka, Konsep dan Teori	12
1.5 Metode Penelitian	27
2 ETHNOGRAFI MASYARAKAT PAPUA DI KOTA JAYAPURA	33
2.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Jayapura	33
2.2 Sejarah Singkat Kota Jayapura	37
2.3 Profil Kependudukan Kota Jayapura	42
2.4 Organisasi Sosial dan Sistem Keakerabatan	44
2.5 Sistem Kepercayaan dan Religi	53
3 DIASPORA ETHNIS BALI DAN SEJARAH PURA AGUNG SURYA BHUVANA	59
3.1 Diaspora Ethnis Bali di Kota Jayapura	59
3.2 Sejarah Pura Agung Surya Bhuvana	65
3.3 Profil Pura Agung Surya Bhuvana	71
3.4 Kegiatan Sosial-Keagamaan	78
4 PURA AGUNG SURYA BHUVANA SEBAGAI OBYEK WISATA DAN MEDIA PEREKAT KERUKUNAN	85
4.1 Pura Agung Surya Bhuvana: Obyek Wisata	85
4.2 Pura Agung Surya Bhuvana: Media Perikat Persatuan	92

4.3	Pura Agung Surya Bhuvana: Media Pendidikan Multikultural	106
5	MERAJUT KERUKUNAN MELALUI SENI-BUDAYA	121
5.1	Pendidikan Multikultral Melalui Seni-Budaya	122
5.2	Menguatkan Kerukunan Melalui Pertunjukan Seni-Budaya	127
6	PENUTUP	143
6.1	Simpulan	143
6.2	Saran	145

GLOSARIUM

Awig-awig: aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan Dharma Agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing

Catur Asrama: empat jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai moksa, yakni: Brahmacari berarti tingkatan hidup bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, grhasta tahap berumah tangga, wanaprstha, tahapan kehidupan menuju sannyasa; dan tahap sannyasin mantapnya spiritual seseorang.

Catur Purusa Artha: empat dasar dan tujuan hidup manusia, yang terdiri dari: tingkah laku muli, luhur (*Dharma*), upaya memenuhi kebutuhan hidup (*Artha*), mempertahankan hidup/melanjutkan keturunan (*Kama*), dan kebahagiaan yang kekal dan abadi (*Moksa*).

Cenderawasih: salah satu jenis burung yang ada di Papua

FKUB: Forum Kerukunan Umat Beragama

GOW: Gabungan Organisasi Wanita

Hollandia: sebutan awal Kota Jayapura pada waktu pendudukan penjajah Belanda.

ISBI: Institut Seni dan Budaya Indonesia

Diaspora: Perpindahan/penyebaran suatu etnis (suku bangsa) ke wilayah di luar tempat tinggalnya.

Religi: kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia

Padma Bhuvana: Pura Sembilan Penjuru Nusantara

PASB: Pura Agung Surya Bhuvana

Pasraman: lembaga pendidikan khusus bidang agama Hindu. Lembaga ini merupakan alternatif, karena pendidikan agama Hindu yang diajarkan di sekolah formal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan di sekolah tinggi agama Hindu

Pengempon pura: pengelola sebuah pura (tempat ibadah umat Hindu)

Penyungsur pura: pengikut sebuah pura (tempat ibadah umat Hindu)

PNG: Papua New Guinea

PKB: Pesta Kesenian Bali

Kecak adalah pertunjukan dramatari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki.

NKRI: Negara Kesatuan Republik Indonesia

Semiotika: ilmu yang mengkaji tentang tanda, baik itu *pengertian* simbol, indeks dan ikonfungsional struktural. Fungsionalisme struktural yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan atau termasuk kedalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan.

Soekarnopura: sebutan kota Jayapura pada masa rezim orde lama (Presiden Soekarno).

Tari king: tarian kontemporer yang mencerminkan keresahan atas ancaman kepunahan burung Cendrawasih

TMII: Taman Mini Indonesia Indah

Tat Twam Asi: sikap hidup yang menganggap bahwa kondisi orang lain adalah kondisi dirinya sendiri

Tri Kaya Parisudha: tiga perbuatan atau perilaku yang harus di sucikan, meliputi manacika (pikiran), wacika (ucapan), dan kayika (perbuatan)

Tifa: alat musik orang Papua

Tri Hita Karana: Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan, meliputi keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesamanya (pawongan) dan manusia dengan lingkungan (palemahan)

Tri Loka: Tiga kelompok alam semesta/ pembagian atau lapisan dari alam semesta (bhuwana agung), meliputi: (1) Swah Loka; "Alam Sorga (atman), para dewa dan Hyang Widhi", (2) Bwah Loka; Dunia kita ini dan kisah "titi ugal agil", dan (3) Bhur Loka; "Alam Neraka"

WHDI: Wanita Hindu Dharma Indonesia

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara kepulauan, memiliki 17.504 pulau. Sekitar 11.000 pulau dihuni oleh penduduk dengan 359 suku dan 726 bahasa. Mengacu pada PNPS No.1 tahun 1969 – yang baru saja dipertahankan Mahkamah Konstitusi – Indonesia memiliki lima agama. Di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, Konghucu menjadi agama keenam. Meski hanya enam, di dalam masing-masing agama tersebut terdiri dari pelbagai aliran dalam bentuk organisasi sosial. Begitu juga ratusan aliran kepercayaan hidup dan berkembang di Indonesia (Mubarok, 2010).

Selain itu, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, terdiri dari beragam etnis, budaya dan agama. Keragaman etnis, budaya dan agama merupakan bukti bahwa masyarakat nusantara adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan budaya masyarakat nusantara merupakan kekuatan sekaligus kelemahan jika tak mampu mengelolanya. Dengan potensi konflik yang sangat besar, jika tidak dikelola dengan baik maka dapat mengganggu kestabilan dan keutuhan bangsa dan negara. Konflik Dayak dan Madura di Kalimantan Barat pada medio Februari 2001, misalnya, memberikan gambaran potensi desintegrasi tersebut.

Penelitian Arafat menunjukkan bahwa konflik dua etnis di Kalimantan Barat tersebut, secara khusus, tidak bisa dilepaskan dari marjinalisasi penduduk asli sehingga mereka melakukan resistensi dan perlawanan terhadap apa yang datang dari luar. Konflik ini juga

dipicu oleh kecenderungan menguatnya etnisitas melalui perasaan *in-group* dan *out-group* di luar dimensi ekonomi. Kecenderungan itu meliputi lima hal, yakni konsentrasi pemukiman, konsentrasi pekerjaan, konsentrasi organisasi kekerabatan, adanya pemukiman seperti asrama mahasiswa, dan konsentrasi jabatan pemerintahan dan swasta oleh etnis tertentu (Arafat, 1998).

Konflik etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Barat tersebut merupakan pelajaran berharga. Konflik itu telah menyadarkan sejumlah etnis migran untuk merekonstruksi perilaku interaksinya dengan penduduk asli. Terusirnya etnis Madura dari tanah Kalimantan Tengah dipahami oleh etnis pendatang lainnya sebagai bentuk proses interaksi yang tidak kondusif dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat penerima (Arbain, 2009). Upaya mengelola konflik dalam kehidupan masyarakat multikultural nusantara merupakan suatu keniscayaan.

Situasi konflik antar etnis yang menguras energi bangsa perlu diantisipasi, antara lain dengan mendukung pola interaksi sosial antar warga bangsa yang dialogis, toleran dan harmonis sehingga integrasi bangsa tetap terjaga. Hal tersebut berarti bahwa kajian akademis yang berupaya memahami pola interaksi migran dengan penduduk asli menjadi amat urgen, terlebih dalam diskusi yang berkaitan dengan pluralitas beragama. Dalam kaitan ini, Skinner dan Bruner juga menjelaskan bahwa penyesuaian diri etnis migran tidak bisa hanya dipahami dengan faktor-faktor yang inheren di dalam budaya migran tersebut saja, tetapi harus dijelaskan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat lokal sebagai penerima atau host population (Pelly, 1998).

Konflik, kekerasan, dan pembantaian atas nama suku, agama, dan ras masih belum berakhir di negeri nusantara. Manusia tidak cukup belajar dari semua kesedihan, penderitaan, dan darah yang tumpah sia-sia. Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar tak luput dari sejarah panjang yang menyangkut konflik, kekerasan, dan pembantaian sesama anak bangsa dengan berbagai alasan. Tragedi 1965 merupakan tragedi terbesar dalam sejarah kelam bangsa ini. Selanjutnya berbagai konflik, kekerasan, dan

pembantaian terus terjadi di berbagai wilayah di tanah air, seperti di Ambon, Poso, Aceh, Lombok, Probolinggo, dan Papua (Taum, 2015)).

Seperti api dalam sekam, konflik social di negeri yang multikultur ini memang berpotensi terjadi. Konflik horizontal di Kalimantan Barat seperti yang ditulis oleh Arbain (2009) serta konflik sosial di berbagai kota, termasuk Ambon, Poso, Aceh, Lombok tersebut masih potensial terjadi di masa yang akan datang bilamana tidak diantisipasi dengan langkah-langkah yang konstruktif.

Papua juga termasuk wilayah yang rentan terhadap konflik. Walaupun dunia internasional, wilayah Papua Barat (*West Papua*) dipandang sudah berintegrasi secara sah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969 – setelah pelaksanaan Pepera yang mendapat pengakuan 84 negara dan disahkan melalui resolusi PBB No. 2504/XXIV/1969. Akan tetapi, sampai saat ini, wilayah itu masih terus bergejolak. Pembangunan di kawasan ini belum sepenuhnya mengikis kekerasan dan berbagai konflik termasuk tradisi kehidupan tribalisme masyarakatnya. Konflik, friksi, dan perang antar-suku yang berulang kali terjadi di Papua, yang seringkali ditayangkan melalui berbagai media massa, baik media massa nasional maupun internasional menunjukkan secara jelas bahwa Indonesia tidak memiliki sebuah strategi kebudayaan yang jelas untuk membangun integritas dan keharmonisan masyarakatnya (Taum, 2015).

Potensi konflik sosial di Papua dilatarbelakangi oleh beragam faktor termasuk faktor kemiskinan. Dalam kaitan ini, Elisabeth Adriana (2012) mengungkapkan bahwa Papua adalah tanah dengan banyak paradox. Papua memiliki kekayaan alam namun masyarakatnya masih miskin. Papua menderita oleh stigma gerakan separatistis tetapi ia tetap berkembang secara ekonomi. Sejak tahun 2001 Papua telah menerima status Otonomi Khusus. Otsus Belum lama ini. Pemerintah Indonesia menetapkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dengan tujuan utama untuk mempercepat proses pembangunan di Papua.

Papua membutuhkan pendekatan komprehensi: (1) pendekatan infrastruktur dan sosial ekonomi khususnya empat sektor yang tercantum dalam UU Otsus: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur; (2) politik keamanan dan budaya. Perdamaian dan pembangunan adalah dua sisi yang berbeda dari sekeping uanglogam yang sangat cocok dengan kondisi Papua saat ini. Untuk membangun dan mengamankan Papua, strategi apapun harus dapat menciptakan kesetaraan ekonomi *good governance* dan penghormatan terhadap hak hak dasar, termasuk di dalamnya kekerasan dari kekerasan. Salah satu cara terbaik yang dapat menjembatani jurang komunikasi antara Papua dan Jakarta adalah melalui dialog damai untuk mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yang menciptakan ketegangan perselisihan dan konflik selama bertahun tahun di Papua.

Untuk menjamin stabilitas sosial-politik dan keberlangsungan pembangunan di Indonesia, maka konflik antaretnis yang mengancam disintegrasi bangsa perlu diantisipasi. Diantaranya dengan memahami berbagai aspek yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari konflik antar kelompok sosial yang terjadi. Oleh karena itulah pilihan para *the founding fathers* bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler dimaksudkan untuk menampung seluruh aspirasi rakyat dalam beragama. Namun demikian, dasar negara dipilih adalah Pancasila yang menampung seluruh aspirasi ajaran-ajaran agama dan bukan agama tertentu (Depag RI, 2007).

Dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi Pancasila, upaya menjaga kerukunan antar umat beragama serta upaya memperkuat persatuan dan integrasi bangsa menjadi penting. Dalam kaitan ini, Kementerian Agama memiliki visi,

yakni “Terwujudnya masyarakat Indonesia taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu misi Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting bagi terwujudnya kerukunan, ketahanan dan kesatuan nasional. Oleh sebab itu, salah satu fokus pembangunan bidang agama adalah upaya mewujudkan dan meningkatkan kerukunan baik intra maupun antar umat beragama.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, seperti harapan Mukti Ali, kerukunan hidup antarumat beragama merupakan prakondisi yang harus diciptakan bagi pembangunan di Indonesia (Ali, 1975).

Terlepas dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas kerukunan beragama tersebut, di sisi lain masyarakat sendiri juga memiliki peran yang penting dalam menjaga kerukunan antar warga bangsa. Bangsa Indonesia yang memiliki norma-norma kemasyarakatan yang di antaranya bersumber pada nilai-nilai agama mendukung terciptanya kerukunan di lingkungan mereka. Nilai-nilai agama mendorong umat penganutnya untuk cinta damai, membangun kerjasama, sikap toleransi dan menghormati agama lain. Ajaran-ajaran inilah yang sebenarnya menjadi landasan sikap dan perilaku masyarakat secara umum dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain yang menganut agama berbeda (Adnan, 2005).

Kerukunan merupakan nilai yang universal, yang dapat ditemukan dalam setiap ajaran agama. Masyarakat Indonesia secara umum mampu enunjukkan diri sebagai masyarakat yang memiliki toleransi terhadap umat agama lainnya. Selain itu,

diperlukan pula kesadaran umat beragama dalam menumbuhkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap toleran ini dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan ketenteraman dan perdamaian. Perwujudan sikap toleransi dalam beragama dapat dicirikan dengan beberapa indikasi. Indikator-indikator sikap toleransi tersebut adalah adanya penerimaan terhadap kelompok lain untuk hidup bersama, terciptanya ruang dialog antar umat beragama, dan saling menghargai terhadap aktivitas keberagamaan pemeluk agama lain (Kartanegara, 2005).

Sikap toleran dan upaya mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama (antarwarga bangsa) ditunjukkan oleh etnis Bali, *penyungsung* (anggota) Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Jayapura, Papua. Keberadaan etnis Bali di Kota Jayapura, Papua dimulai sejak bergabungnya Irian Jaya (Papua) ke Pangkuan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1962. Sejak saat itu, etnis Bali yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), TNI-Polri, transmigran dan profesi lain terus berupaya melaksanakan dharma agama, antara lain dengan membangun tempat peribadatan (pura) sesuai tuntutan dan kebutuhan umat Hindu di Kota Jayapura. Selaras dengan perkembangan umat Hindu di Kota Jayapura, maka pada tahun 1990 diresmikan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB), terletak di daerah Skyline, Kota Jayapura (Gambar 1.1)



Gambar1.1
Posisi Geografis Pura Agung Surya Bhuvana

Pembangunan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) tidak hanya diwarnai dengan sentuhan arsitektur pura yang dibangun di Bali pada umumnya, tetapi juga diwarnai dengan aksentuasi ornamen penghias pura sesuai dengan nilai budaya masyarakat Papua. Fenomena akulturasi dan asimilasi budaya Hindu (Bali) dengan budaya lokal (Papua) mewarnai pendirian Pura Agung Surya Bhuvana. Pura termegah di Kota Jayapura ini dihiasi oleh ornamen tifa dan burung Cenderawasih, ornamen episode cerita Tantri seperti layaknya bangunan pura di Bali.

Tifa merupakan instrument sakral bagi masyarakat Papua. Sedangkan burung Cenderawasih juga sangat dihormati dan disakralkan karena diyakini sebagai burung surga yang diberi nama *bird of paradise* atau berbagai sebutan oleh tiap suku. Relief Tifa di Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) juga terdapat pada balai wantilan *Praja Mandala*, misalnya pada bagian depan wantilan, bagian depan panggung, serta ornamen pada tiang penyangga (Bali: *adegan*) wantilan. Ornamen ini tampak memadukan ornamen gaya Bali dan ornamen gaya Senatani Papua (Rai, 2019).

Pemakaian unsur budaya lokal di Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) memberi kesan tersendiri bagi hubungan masyarakat lokal dengan umat Hindu di Papua yang berasal dari Bali maupun dari daerah lainnya di Indonesia seperti dari Banyuwangi, Belitar, serta dari daerah lainnya di Jawa dan Nusantara. Penduduk lokal Papua serta masyarakat non Hindu menerima dan mengapresiasi Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) sebagai sebuah pusaka budaya atau bangunan tempat suci yang megah dan artistik sehingga layak diapresiasi dan dikunjungi sebagai objek wisata di Kota Jayapura, Papua (Rai, 2019).

Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) hadir di Papua memperoleh tempat tersendiri di hati masyarakat setempat. Pura ini diterima sebagai sesuatu yang baru, tanpa dirasa mengancam keberadaan ideologi masyarakat setempat. PASB hadir menjadi wahana interaksi sosial antar umat beragama di Kota Jayapura, Papua. Interaksi sosial itu bukan hanya di lingkungan umat Hindu yang memang merupakan penyusung PASB, tetapi juga interaksi sosial antara

umat non Hindu, masyarakat lokal dengan umat Hindu setempat. Masyarakat lokal dan umat non Hindu merasaa nyaman berkunjung ke PASB sehingga terjadi dialog antar budaya. Pura termegah di Jayapura ini memang merupakan tempat persembahyangan bagi umat Hindu, akan tetapi masyarakat di Jayapura yang menganut agama lainnyapun sering mengunjungi pura ini.

Pura Agung Surya Bhuana (PASB) adalah sebuah tempat suci bagi umat Hindu yang unik dengan fenomena yang sangat menarik pada era revolusi industri 4.0 dewasa ini. Menurut Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui, revolusi industri telah berjalan dari masa ke masa melalui empat fase. Perubahan fase ke fase memberi perbedaan artikulatif pada sisi kegunaannya. Fase pertama (1. 0) bertumpu pada penemuan mesin yang menitikberatkan (stressing) pada mekanisasi produksi. Fase kedua (2.0) sudah beranjak pada fase produksi massal yang terintegrasi dengan quality control dan standarisasi. Fase ketiga (3.0) memasuki tahapan keseragaman secara massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi. Fase keempat (4.0) telah menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur (Akhmaloka, 2018: 2-3). Revolusi Industri 4.0 merupakan era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), era super komputer, rekayasa genetika, inovasi, dan perubahan cepat yang berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Gejala ini diantaranya ditandai dengan banyaknya sumber informasi melalui kanal media sosial, seperti facebook, youtube, Instagram, dan sebagainya. Revolusi industri fase keempat (4.0) kini diwarnai dengan berkembangnya digitalisasi dan otomatisasi, yakni suatu perpaduan antara internet dengan manufaktur. Proses yang terjadi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi secara cepat, menyangkut dasar kebutuhan pokok (*needs*) dengan keinginan (*wants*) masyarakat. Dasar perubahan ini sebenarnya adalah pemenuhan hasrat keinginan pemenuhan kebutuhan manusia secara cepat dan berkualitas. Oleh sebab itu, dalam era revolusi industri banyak mengubah cara kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi atau digitalisasi (BKSTI 2017).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital dewasa ini berdampak positif terhadap keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB). PASB saat ini telah menjadi wahana pengenalan keberadaan umat Hindu di wilayah Papua. Berkat adanya internet informasi yang menyangkut PASB dan umat Hindu di Papua bisa diketahui oleh masyarakat maya (cybercommunity) secara meluas. Warga masyarakat yang mengenal PASB bukan hanya penduduk Papua, tetapi siapapaun di luar Papua yang bersentuhan dengan dunia maya (internet).

Pura Pura Agung Surya Bhuvana Jayapura dibangun oleh etnis Bali yang mulai hadir di Papua sejak Papua bergabung di NKRI tahun 1962. Pura kebanggan warga Kota jayapura ini sungguh menarik. Pada pintu masuk pura akan terlihat dengan jelas sebuah papan nama bertuliskan Pura Agung Surya Bhuvana Jayapura. Penyangga papan nama pura itu dibuat berbentuk Tifa, dan sangat jelas terlihat dari jalan raya. Selanjutnya ornament Tifa dapat pula dijumpai pada relief yang terdapat pada tembok penyengker pura. Sungguh unik karena pada tembok penyengker pura yang memakai gaya Bali itu dihiasi ornamen episode ceritra Tantri. Perkelahian singa dengan lembu dilukiskan bersanding dengan ornament Tifa, padahal Tifa itu tidak ada disebutkan dalam ceritra Tantri. Pada setiap episode cerita Tantri yang digambarkan tampak selalu ditambahkan ornamen Tifa, baik Tifa secara mandiri maupun Tifa dengan burung Cenderawasih. Penggunaan Tifa dan burung Cenderawasih pada relief Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) menimbulkan berbagai pertanyaan. Tifa merupakan instrumen sakral bagi masyarakat Papua. Sedangkan burung Cenderawasih juga sangat dihormati dan disakralkan karena diyakini sebagai burung surga yang diberi nama bird of paradise atau berbagai sebutan oleh tiap suku.

Relief Tifa di Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) juga terdapat pada balai wantilan Praja Mandala, misalnya pada bagian depan wantilan, bagian depan panggung, serta ornament pada tiang penyangga (Bali: adegan) wantilan. Ornamen ini tampak memadukan ornamen gaya Bali dan ornament gaya Senatani Papua.

Pemakaian unsur budaya lokal di Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) memberi kesan tersendiri bagi hubungan masyarakat lokal dengan umat Hindu di Papua yang berasal dari Bali maupun dari daerah lainnya di Indonesia seperti dari Banyuwangi, Belitar, serta dari daerah lainnya di Jawa dan Nusantara. Penduduk lokal Papua serta masyarakat non Hindu menerima dan mengapresiasi Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) sebagai sebuah pusaka budaya atau bangunan tempat suci yang amegah dan artistik sehingga layak dikunjungi sebagai objek wisata di Kota Jayapura, Papua.

1.2 PERMASALAHAN PENELITIAN

Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) hadir di Papua memperoleh tempat tersendiri di hati masyarakat Papua di Kota Jayapura. PASB diterima sebagai sesuatu yang baru, tanpa dirasa mengancam keberadaan ideologi masyarakat setempat. PASB hadir menjadi wahana interaksi sosial antar umat beragama di Kota Jayapura, Papua. Interaksi sosial itu bukan hanya di lingkungan umat Hindu yang memang merupakan penyungsum PASB, tetapi juga interaksi sosial antara umat non Hindu, masyarakat lokal dengan umat Hindu setempat. Masyarakat lokal dan umat non Hindu merasaa nyaman berkunjung ke PASB sehingga terjadi dialog antar budaya. PASB berkembang menjadi wahana penyemaian kerukunan, membangun semangat multukultural untuk mengukuhkan integrasi bangsa.

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketimpangan antara asumsi dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Semestinya Pura sebagai salah satu tempat persembahyangan bagi umat Hindu hanya dikunjungi umat Hindu untuk melaksanakan persembahyangan saja. Akan tetapi kenyataannya ini berbeda. Walaupun Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) merupakan tempat persembahyangan bagi umat Hindu, akan tetapi masyarakat di Jayapura yang menganut agama lainnyapun sering mengunjungi pura ini. Selain itu, publikasi media maya (*cybermedia*) tentang keber-adaan sebuah pura di luar Pulau Bali biasanya hanya bernilai sebagai sebuah

informasi atau sebuah berita biasa saja, akan tetapi lain halnya dengan pemberitaan atau informasi di cybermedia tentang Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) yang disambut sangat positif oleh umat non Hindu di Nusantara. Keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dewasa ini bukan hanya sebagai tempat ibadah umat Hindu, tetapi sudah menjadi *icon* atau objek pariwisata baru di Kota Jayapura, Papua. Brangkat dari realitas sosial yang demikian, maka permasalahan penelitian dapat di-rumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sejarah keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB)?
- 2) Bagaimana diaspora dan peranan etnis Bali penyung Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dalam dinamika umat Hindu di Jayapura?
- 3) Mengapa Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) berkembang menjadi objek wisata dan media perekat kerukunan antar warga bangsa di Kota Jayapura?.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan memahami makna Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) bagi kerukunan hidup beragama masyarakat di Jayapura pada era global dewasa ini. Selanjutnya secara khusus penelitian memiliki tujuan:

- 1) Memahami sejarah keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB).
- 2) Memahami diaspora dan peranan etnis Bali penyung Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dalam dinamika kehidupan sosial-keagamaan umat Hindu di Jayapura.
- 3) Memahami perkembangan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) menjadi objek wisata dan media perekat kerukunan antar warga bangsa di Kota Jayapura.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang keberadaan tempat ibadah umat Hindu, yakni Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) bagi kerukunan hidup beragama masyarakat di Jayapura pada era global dewasa ini. Selain itu, hasil kajian ini juga merupakan khasanah pengetahuan mengenai diaspora dan peranan etnis Bali penyungung Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dalam dinamika kehidupan sosial-keagamaan umat Hindu di Jayapura. Selanjutnya, secara praktis, penelitian ini menjadi bahan masukan yang berharga bagi pemerintah untuk menguatkan persatuan dan integrasi bangsa Indonesia di tanah Papua.

1.4 TELAAH PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI

1.4.1 Telaah Pustaka

Untuk memperoleh peta jalan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang dikaji, maka tinjauan pustaka menjadi penting. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka yang diperoleh dari penelusuran hasil-hasil penelitian terkait, yang telah dihasilkan para peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hingga kini belum ada ditemukan hasil penelitian yang mengkaji tentang sejarah etnis Bali dan keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Jayapura sebagai media perekat kerukunan hidup beragama pada era global ini. Beberapa pustaka yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, Ni Nyoman Rahmawati dalam laporan hasil penelitiannya yang berjudul *Pergulatan Ideologi Keberagamaan Dalam Keluarga Dayak Katingan di Desa Tewang Tampang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah* (2018). Rahmawati mengatakan bahwa pergulatan ideologi keberagamaan dalam keluarga Dayak Katingan di desa Tewang Tampang berimplikasi

terhadap praktik tradisi yaitu sebagai arena kontestasi *prestige*. Kontestasi ini nampak dalam penggunaan hewan kurban sebagai penanda meningkatnya kesuksesan keluarga. Pergulatan ini juga berimplikasi terhadap kelestarian tradisi dan semakin menguatnya identitas lokal. Kelestarian tradisi terjadi karena intensitas praktik yang terbilang sering dilakukan, sehingga berpengaruh terhadap penguatan emosional peserta ritual terhadap berbagai identitas lokal sebagai penunjang jalannya ritual. Selain itu juga berimplikasi terhadap keberagamaan dalam keluarga, yaitu terjadinya praktik keberagamaan yang terbelah. Hal ini dipicu oleh perbedaan interpretasi dan pengalaman primordial yang di rasakan oleh masing-masing orang dalam keluarga.

Paradoksi sikap keberagamaan ini terjadi dalam tataran ideologis yang sekaligus menjadi dogma bagi penganutnya dengan tataran sosiologi dalam bentuk praktik dalam kehidupan masyarakat, yang menunjukkan praktik keberagamaan yang semakin toleran. Kontestasi ini terjadi lebih dikarenakan keinginan untuk mendapatkan limiditasi agama dalam keluarga. Pergulatan ideologi keberagamaan dalam keluarga Dayak Katingan di daerah tersebut terjadi dalam bentuk praktik tradisi keluarga yang meliputi tradisi memelihara makhluk gaib (*sahur parapah*) sebagai pelindung keluarga, parasih kubur/pambak, adat perkawinan. Pergulatan dalam pelaksanaan ritual meliputi: penggunaan hewan kurban, *hasaki palas*, dan tata cara pelaksanaan ritual. Pergulatan dalam bentuk interaksi sosial keluarga meliputi: komunikasi keberagamaan dalam keluarga, penanaman nilai-nilai keberagamaan, dan jamuan makan. Pergulatan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan ideologi dalam bentuk dogma dan tafsir yang dijadikan acuan dan pedoman nilai dalam menjalankan kehidupan keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, Dwi Andini, dkk. (2018) mengkaji Mitos Dewi Hariti di Pura Candi Dasa, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem: Analisis Struktur, Fungsi dan Makna. Disimpulkan bahwa struktur naratif yang membangun mitos Dewi Hariti di Pura Candi Dasa, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem ada tujuh, yaitu sinopsis, insiden,

alur/plot, tokoh, tema, amanat dan latar. Fungsi yang terkandung dalam mitos Dewi Hariti di Pura Candi Dasa, yaitu fungsi religius dan fungsi sosial. Sedangkan, makna yang terdapat di mitos Dewi Hariti di Pura Candi Dasa adalah makna religius, makna pelestarian budaya. Berbeda dengan hasil penelitian Dwi Andini, dkk. (2018), publikasi ini membahas keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dan kerukunan Hidup antar umat beragama di Jayapura.

Ketiga, Ariyanti (2014) menulis publikasi berjudul “Persembahyangan Purnama dan Tilem: Studi Tentang Persembahyangan Masyarakat Bali Ke Pura Puseh dan Pura Dalem di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Dusun Tirtayoga enggan melaksanakan persembahyangan Purnama dan Tilem di Pura Puseh dan Pura Dalem. Adapun beberapa hal yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan persembahyangan Purnama dan Tilem, yaitu (1) Kurangnya pemahaman akan pentingnya makna persembahyangan Purnama dan Tilem di Pura Puseh dan Pura Dalem, (2) Tidak adanya kegiatan penyuluhan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait makna persembahyangan Purnama dan Tilem, (3) Pekerjaan yang cukup menyita waktu, (4) jarak tempuh antara Pura Puseh dan Pura Dalem dengan tempat tinggal masyarakat yang cukup jauh, (5) kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Keempat, Adhisti dalam Kajian Arkeologis dan Arsitektur Pada Pura Maospati Gerenceng (2008) mengatakan bahwa pendirian Pura Kompleks Pura Maospait didirikan pada abad ke-13 M dan dilanjutkan kembali pada abad ke-14-15 M dan memiliki hubungan serta pengaruh dari Majapahit jika dilihat dari bangunan dan peninggalannya. Hingga saat ini Pura Maospait Gerenceng masih digunakan oleh penyungsungnya dan terdapat bangunan baru pada kompleks pura. Relevansi dari kajian arkeologis dan arsitektur pada Pura Maospati Gerenceng dengan publikasi ini ada lah tentang aspek Arkeologis dan Arsitektur bangunan Pura. Hasil penelitian Adhisti (2008) ini menjadi referensi yang berharga

dalam memahami seni arsitektur Pura Agung Surya Bhuvaana di Jayapura.

Kelima, terkait dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang multi ethnik, Mambal (2016) menulis artikel berjudul Hindu, Pluralitas Dan Kerukunan Beragama. Dinyatakan bahwa pluralitas adalah fakta sosial yang tak terelakkan. Sayangnya, dalam konstelasinya tidak hanya melahirkan kerjasama tetapi juga konflik. Wacana-wacana analitik menjadi sebuah gagasan yang rasional sebagai upaya preventif dan ekpektasif. Dalam kontek kerukunan beragama, partisipasi teorik dan praksis dari elemen agama menjadi signifikan dan efektif. Persamaan persepsi tentang pluralitas menjadi titik tolak penting dalam menentukan langkah-langkah strategis berikutnya. Karenanya, dialog agama adalah jalan yang ideal untuk saling mengenal dan memahami masing-masing pihak. Dari sanalah, mutiara-mutiara kebijakan terwacanakan, terungkap dan menjadi referensi penting untuk mewujudkan ekspektasi kolektif. Isu pluralitas dan kerukunan sungguh berada dalam tantangan bagi agama-agama, termasuk Hindu.

Keenam, pura merupakan tempat ibadah umat hindu sekaligus salah satu daya tarik wisata populer di Bali. Dalam kaitan ini, Karmini (2018) membahas perkembangan Pura Desa Batuan, Sukawati Gianyar sebagai daya tarik wisata budaya dan respons wisatawan terhadap daya tarik wisata ini. Disimpulkan bahwa Pura Desa Batuan sebagai daya tarik wisata sejak tahun 1980-an ternyata mampu membangkitkan kegiatan ekonomi dan memperkuat tradisi budaya masyarakat setempat perlu terus dipertahankan dan dikembangkan. Bagi wisatawan, kunjungan mereka ke Pura Desa Batuan memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang budaya Bali. Mereka lebih mengenal seni-budaya dan tradisi keagamaan orang Bali. Pengakuan atas eksistensi agama Hindu Bali ini merupakan salah satu bentuk dari sikap respek terhadap pluralisme agama.

Ketujuh, pendirian sebuah Pura didasarkan pada kondisi sosial di lingkungannya. Dalam kaitan ini, Supribawa dan Ischak (2018) membahas Pengaruh Karakteristik Lingkungan Sosial

Perkotaan Terhadap Konsep Pembangunan Pura Adhitya Jaya di Rawamangun Jakarta. Mereka menyimpulkan bahwa pengaruh karakteristik lingkungan social perkotaan dan heterogennya umat Hindu di Jakarta Timur sangat besar dalam mempengaruhi konsep pembangunan Pura Adhitya Jaya, yang dengan tetap memegang teguh nilai-nilai filosofi dalam konsep *Tri Hita Karana*. Karena masyarakat Hindu di Jakarta dengan pengaruh karakteristik lingkungan sosial perkotaannya, di dalam membangun kompleks Pura sangat memperhatikan dan mempertimbangkan filosofi *Tri Hita Karana* dalam sifat dan ruangkannya kebutuhan: Fungsi ritual yaitu hubungan manusia dengan Tuhan; Fungsi pendidikan dan pengetahuan tentang agama dan kesenian serta kehidupan kegiatan sosial yang merupakan hubungan harmonis manusia dengan sesama dan lingkungannya.

Kedelapan, Liana (2016) menulis publikasi berjudul “Kerukunan Umat Muslim, Hindu dan Budha di Gampong Keudah Banda Aceh. Disimpulkan bahwa semua agama yang dianut di Gampong Keudah, khususnya Muslim, Hindu dan Budha terjalin rukun. Hal ini ditandai dengan tidak adanya keributan baik itu dalam hal agama dan dalam beraktivitas sehari-hari. Faktor penyebab terciptanya kerukunan di Gampong Keudah karena mereka menerapkan sikap toleransi yang terjalin erat dikalangan masyarakat Gampong Keudah, dalam bidang agama, seperti dalam hal Ibadah mereka saling menghargai. Sementara dalam bidang sosial-budaya dan ekonomi, hubungan antara Muslim, Hindu dan Budha terjalin sangat baik. Masyarakat Muslim sangat terbuka, bersosialisasi dan berinteraksi dengan Umat Hindu dan Budha seperti saling mengunjungi, membantu dan bergotong royong bersama, demikian juga dalam bidang ekonomi, banyak pekerjaan yang sama seperti berbengkel, jualan dan lain sebagainya, mereka tidak menerapkan persaingan dalam berdagang, rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Berbicara tentang penghambat kerukunan masyarakat di Gampong Keudah tidak ada penghambat, masyarakatnya hidup rukun. Publikasi Liana (2016) tentang “Kerukunan Umat Muslim, Hindu dan Budha

di Gampong Keudah Banda Aceh” ini menjadi referensi yang berharga dalam memahami interaksi sosial antar umat beragama yang terkait dengan keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Jayapura pada era 4.0 dewasa ini.

Kesembilan, Arsana (2006) mengkaji Segregasi Sosial dan Pola Adaptasi Budaya Dalam Kehidupan Pluralisme Agama Di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Disimpulkan bahwa secara umum interaksi sosial umat Hindu dan umat kristen di Desa Dalung, Badung cukup harmonis. Teosofi Hindu yang menjadi tatanan dasar dalam sistem kehidupan komunal memunculkan prinsip sistem komunal yang bersifat homogin, sehingga berkecenderungan untuk menafi kan pluralisme agama. Hasil studi ini juga menemukan bahwa terdapat dua varian yang mewarnai pandangan budaya komunal untuk memaknai pluralisme agama yang berkembang di dalam sistem kehidupan masyarakat di desa Dalung, seperti: ada yang memandangnya sebagai fenomena keterputusan (*discontinuity*) hubungan rantai kultural antara warga yang beragama Hindu dengan yang beragama Kristen. Di sisi kehidupan komunal yang lainnya, ada yang dapat memandangnya sebagai tanda keterputusan yang masih dapat disambung kembali (*reconnection*) untuk meneruskan kembali (*recontinuity*) hubungan kultural di antara warga yang berbeda agama. Adanya varian pandangan budaya seperti itu selanjutnya dapat mempengaruhi pola-pola adaptasi dan pertukaran budaya dalam kehidupan masyarakat pluralisme agama di Desa Dalung.

Hasil kajian Arsana (2006) ini menjadi referensi yang berharga dalam memahami interaksi antara umat Hindu dan non Hindu di wilayah Indonesia lainnya, termasuk di Kota Jayapura, Papua. Publikasi hasil penelitian ini secara khusus membahas keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) serta interaksi antara umat Hindu dengan Umat Non Hindu di Kota Jayapura, Papua yang berbeda dengan enam publikasi di atas.

Secara umum, sembilan publikasi hasil penelitian terdahulu tersebut membahas masalah keberadaan tempat ibadah pura serta interaksi antara umat Hindu dan Non Hindu di berbagai kawasan

di wilayah nusantara ini. Namun demikian, kesembilan publikasi hasil penelitian tersebut memberikan gambaran atau suatu peta pengetahuan berharga, terutama yang terkait dengan keberadaan tempat ibadah umat Hindu (Pura) serta interaksi antara umat Hindu dengan umat non Hindu.

1.4.2 Konsep

Penelitian ini mengandung beberapa konsep penting untuk dijelaskan dan didefinisikan secara tegas untuk menghindari kesalahpengertian, kesalahpahaman, dan kesalahmaknaan. Setidaknya, ada tiga konsep kunci yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu konsep Pura Agung Surya Bhuvana (PASB), dan konsep kerukunan hidup Beragama.

a. *Pura Agung Surya Bhuvana (PASB)*

Istilah pura memiliki pengertian sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat Hindu khususnya, tampaknya berasal dari jaman yang tidak begitu tua. Pada mulanya istilah pura yang berasal dari kata Sanskerta itu berarti kota atau benteng yang sekarang berubah arti menjadi tempat pemujaan Hyang Widhi. Sebelum dipergunakannya kata pura untuk menamai tempat suci/tempat pemujaan dipergunakanlah kata kahyangan atau hyang (Prasasti Sukawana A I, 882 M).

Pura dengan pengertian sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat Hindu khususnya di Bali, tampaknya berasal dari jaman yang tidak begitu tua. Pada mulanya istilah pura yang berasal dari kata Sanskerta itu berarti kota atau benteng yang sekarang berubah arti menjadi tempat pemujaan *Hyang Widhi* (Titib, 2003). Sebelum dipergunakannya kata pura untuk menamai tempat suci/tempat pemujaan dipergunakanlah kata kahyangan atau hyang. Pada jaman Bali Kuna dan merupakan data tertua ditemui di Bali, disebutkan di dalam prasasti Sukawana A I tahun 882 M.

Sebagai tempat suci untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan segala manifestasi-Nya serta roh suci leluhur, maka keberadaan pura kini nampaknya tidak hanya bisa kita temui di

Bali saja, namun sudah bisa dijumpai di seluruh Indonesia seperti yang ada di wilayah di Kota Jayapura. Salah satunya adalah Pura Agung Surya Bhuana (PASB). Pura ini terletak di Kelurahan Vim, kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Jalan Abepura No 38 Skyline, Jayapura, Papua.

b. Kerukunan Hidup Beragama

Istilah kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan (Poerwadarmita, 1980). Secara etimologi kata kerukunann pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan.

Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling meng-hindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan (Jirhanuddin, 2010).

Secara umum kerukunan hidup beragama yang dimaksud dalam kajian ini adalah kerukunan antar umat beragama atau antar warga bangsa di Kota Jayapura, Papua. Sebagaimana di wilayah Indonesia lainnya, kerukunan antar umat beragama selalu diprakarsai oleh umat agama tertentu dalam wadah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) daerah setempat. Di Kota Jayapura pemuka umat Hindu yang menjadi *pengempon* Pura Agung Surya Bhuvana cukup aktif melakukan koordinasi dan kerjasama antar umat beragama atau antar warga bangsa untuk memelihara kebersamaan dan persatuan untuk mendukung dinamika kehidupan masyarakat Kota Jayapura yang multi etnik.

1.4.3 Landasan Teori

Landasan Teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori adalah bersifat strategis, artinya memberikan landasan bagi realisasi pelaksanaan penelitian. Selain itu landasan teori juga berfungsi sebagai dasar strategi dalam pelaksanaan penelitian. Secara epistemologi, landasan teori adalah sebagai tuntutan dalam memecahkan masalah penelitian (Kaelan, 2005: 239).

Teori ialah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari: (1) Hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian yang diukur, (2) Mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) Hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apa pun secara langsung (Ikbar, 2012: 87).

Teori berfungsi untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, membantu ramalan atas dasar penemuan, dan menyajikan penjelasan. Unsur-unsur teori meliputi kategori konseptual dan kawasan konseptualnya, hipotesis kerja dan hubungan generaliasasi di antara kategori dan kawasannya, serta integrasi (Moleong, 2010: 62). Adapun beberapa teori yang cukup relevan diterapkan dalam menganalisis keberadaan PASB di Kota Jayapura, Papua serta umat kehidupan umat Hindu setempat adalah teori religi, teori semiotika, dan teori fungsional struktural.

a. *Teori Religi*

Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) merupakan tempat upacara atau tempat ibadah umat Hindu di Kota Jayapura. Untuk itu, salah teori yang berkaitan dengan aktivitas upacara adalah teori religi. Upacara religi dalam kebudayaan dan masyarakat sederhana dan primitif dianggap sebagai usaha untuk mencari asas-asas religi

kuno dan usaha memecahkan masalah asal mula religi. Secara umum, terdapat tiga golongan teori religi, yaitu (1) teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada keyakinan religi atau isi ajaran religi, (2) teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada sikap para penganut religi yang bersangkutan terhadap alam gaib, dan (3) teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada ritus dan upacara religi (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam kaitannya dengan penghormatan manusia terhadap kekuatan alam, terdapat teori kekuatan luar biasa yang dikemukakan oleh seorang sarjana antropologi Inggris R. R. Marett (1909). Menurut Marett, kesadaran tersebut adalah hal yang bersifat terlalu kompleks bagi pikiran manusia yang baru ada pada tingkat permulaan kehidupannya di muka bumi ini. Pangkal daripada segala kelakuan agama ditimbulkan karena suatu perasaan rendah terhadap gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai biasa dalam kehidupan manusia. Alam, tempat gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa itu berasal, yang dianggap oleh manusia dahulu sebagai tempat adanya kekuatan-kekuatan yang melebihi kekuatan-kekuatan yang telah dikenal manusia dalam alam sekelilingnya, disebut the Supernatural. Alam raya, termasuk tumbuh-tumbuhan memiliki kekauatan supernatural.

Masyarakat Hindu Bali menghormati alam (lingkungan hidup) setempat. Secara empiris hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap simbol budaya lokal berupa ornamen Tifa dan Burung Cendera Wasih pada bangunan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Kota Jayapura, Papua.

b. Teori Semiotika

Umat Hindu di Kota Jayapura telah membangun Pura Agung Surya Bhuvana (PASB). Bangunan tempat ibadah umat Hindu berupa Pura ini hadir di Kota Jayapura Papua dengan ornamen yang khas. Ornamen tersebut antara lain berupa Tifa dan burung Cenderawasih yang menjunjung tinggi budaya lokal. Hal ini bisa difahami dengan teori semiotika. Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani simeon yang berarti “tanda”.

Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Van Zoest (dalam Sobur, 2001: 96) mengartikan semiotik sebagai “ilmu tanda (sign) dan segala yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya”.

Menurut Pateda (2001: 29), sekurang-kurangnya terdapat sembilan macam semiotik yaitu: (1) Semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Pierce menyatakan bahwa semiotik berobjekan tanda dan penganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikaitkan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu; (2) Semiotik deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun, dari dahulu hingga sekarang tetap saja seperti itu. Demikian pula jika ombak memutih di tengah laut, itu menandakan bahwa laut berombak besar. Namun, dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya; (3) Semiotik faunal (Zoo Semiotik), yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Misalnya, seekor ayam betina yang berkotek-kotek menandakan ayam itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. Tanda-tanda yang dihasilkan oleh hewan seperti ini, menjadi perhatian orang yang bergerak dalam bidang semiotik faunal; (4) Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Telah diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya yang terdapat dalam masyarakat yang

juga merupakan sistem itu, menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan masyarakat yang lain; (5) Semiotik naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan (Folklore). Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan, ada diantaranya memiliki nilai kultural tinggi; (6) Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan daun pohon-pohonan yang menguning lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, misalnya banjir atau tanah longsor, sebenarnya memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah merusak alam; (6) Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Di ruang kereta api sering dijumpai tanda yang bermakna dilarang merokok; (8) Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Buku Halliday (1978) itu sendiri berjudul *Language Social Semiotic*. Dengan kata lain, semiotik sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa; (9) Semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa.

c. Teori Fungsional Struktural

Keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dan umat Hindu di Jayapura, Papua bisa difahami dengan teori fungsional struktural. Untuk itu, dalam penelitian ini juga diterapkan teori fungsional struktural. Teori fungsional juga populer disebut teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pemuatan teori integrasi, konsesus, atau fungsional ini tidak lain agar pembaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Pengertian Fungsionalisme Struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan

satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain.

Menurut teori fungsional struktural, masyarakat terdiri dari berbagai elemen atau insitusi. Masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Teori ini menekankan keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya antara lain: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan (*equilibrium*). Para penganut pendekatan teori fungsional (*functionalist*) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerjasama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*).

Mereka menganggap tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis. Dalam teori fungsional struktural, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain (Ritzer, 1992: 25).

Selain itu, teori Struktural Fungsional dalam menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mendasarkan pada tujuh asumsi, yang meliputi:

- 1) Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi.
- 2) Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
- 3) Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, dimana penyesuaian yang ada tidak perlu banyak merubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh.
- 4) Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karena itu di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-

ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses pelembagaan.

- 5) Perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian.
- 6) Perubahan adalah merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi.
- 7) Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama (Lauer, 1977).

Kerukunan masyarakat Jayapura, Papua di Kota Jayapura dengan umat Hindu penyung Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dapat dianalisis dengan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson. Menurut Talcott Parson, suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dalam kaitan ini, persyaratan dari sistem sosial, meliputi: (1) Sistem sosial harus terstruktur, sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya; (2) Untuk menjaga kelangsungannya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lainnya; (3) Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proposisi yang signifikan; (4) Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya, (5) Sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu; (6) Bila konflik akan menimbulkan kekacauan, maka harus dikendalikan; dan (7) Untuk kelangsungannya, sistem memerlukan bahasa (Ritzer, 2004).

Menurut Talcott Parson, masyarakat berkecenderungan ke arah ekuilibrium. Prosesnya terjadi pada penerapan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Sistem tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis, tetapi pada dasarnya tiap-tiap sistem memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dan adaptasi demi pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari

para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.

Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Talcott Parson mengemukakan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan”, terkenal dengan skema AGIL yaitu: (1) *Adaptation* (Adaptasi), yakni sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya; (2) *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), yakni sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya; (3) *Integration* (Integrasi), yakni sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi lainnya (A, G, I, L); dan (4) *Latency* (Latensi atau Pemeliharaan Pola), yakni sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultur yang menciptakan dan menopang motivasi.

Skema AGIL tersebut dapat digunakan pada semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Terutama dalam sistem tindakan, yang dapat dicontohkan sebagai berikut: (1) Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan Eksternal; (2) Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya; (3) Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya; dan (4) Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak (Ritzer, 2008).

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini merupakan studi kasus yang mengkaji keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) yang dilakukan di Kota Jayapura, Papua. Menurut Maxfield (Nazir, 1988: 66), studi kasus merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail latar belakang, sifat dan karakteristik yang khas dari suatu kasus baik berupa individu maupun organisasi sehingga dari sifat yang khas ini dapat dijadikan hal-hal yang bersifat umum.

Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu, seperti yang lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis; juga bisa dilakukan terhadap kelompok, seperti yang dilakukan oleh beberapa ahli antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Kasus-kasus yang dijadikan objek studi sengaja dipilih berdasarkan relevansi dan kesesuaiannya dengan tujuan kritis yang hendak dilakukan. Studi kasus mementingkan kedalaman, dan secara lebih spesifik ia harus holistik dan menyeluruh. Tujuannya adalah seperti apa yang dikemukakan Geertz (1973), yakni 'deskripsi kental' yang sangat diperlukan untuk memahami suatu konteks atau situasi. Dalam studi kasus, sejumlah data eklektik tertentu dikumpulkan dan dipadukan dalam suatu proses analisis, serta disajikan sedemikian rupa untuk mendukung tema utama yang tengah diteliti (Kuper, 2000: 97).

Penelitian yang terkait dengan keberadaan umat Hindu di Kota Jayapura, Papua ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif dalam perspektif kajian budaya (*Cultural Studies*). Menurut Sugiyono (1992: 8) pendekatan kualitatif merupakan suatu strategi penelitian yang menghasilkan keterangan atau data yang dapat mendeskripsikan realitas sosial dan berbagai peristiwa terkait dalam kehidupan masyarakat.

Proses penelitian kualitatif bersifat siklus, bukan linier seperti yang diterapkan dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena sifatnya siklus, penelitian yang menerapkan pendekatan kualitatif

dilakukan secara berulang-ulang pada objek dan subjek yang sama sehingga akan dapat digali informasi yang objektif dan konsisten. Melalui pendekatan kualitatif, maka temuan-temuan penelitian yang dihasilkan akan berbeda dengan temuan penelitian yang menerapkan prosedur pengukuran (pendekatan kuantitatif).

Penerapan metode kualitatif ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (a) metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda (bervariasi); (b) metode kualitatif mampu menyajikan secara langsung hakikat antara peneliti dengan informan/responden; (c) metode kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat (Meleong, 1994: 5). Pendekatan kualitatif merupakan strategi yang menghasilkan data tentang realitas sosial dan kejadian-kejadian terkait dalam masyarakat seperti kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsionalisasi organisasi, hubungan kekerabatan, dan pergerakan-pergerakan sosial (Strauss dan Corbin, 1997: 11). Diantara data yang akan digali melalui pendekatan kualitatif ini adalah interaksi yang terjadi antara umat non Hindu dan umat Hindu penyungsum PASB. Penelitian ini juga merupakan suatu bentuk kajian budaya terhadap masyarakat Hindu di Kota Jayapura Papua. Pendekatan umum yang diterapkan dalam kajian budaya adalah etnografi, tekstual, dan resepsi (Barker, 2005: 35-45). Melalui pendekatan etnografi diharapkan dapat difahami bentuk atau gambaran tentang struktur permasalahan yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama masyarakat di Jayapura pada era global dewasa ini.

1.5.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Sebagai objek studi dalam penelitian ini adalah Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Kota Jayapura, Papua. Penentuan objek dan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Pertama, PASB merupakan tempat ibadah utama umat Hindu yang ada di Kota Jayapura, Papua. Kedua, keberadaan PASB bukan hanya sebagai tempat ibadah umat Hindu, tetapi juga telah berkembang menjadi objek wisata yang dikunjungi masyarakat

non hindu. Ketiga, selain itu PASB kini menjadi ajang dialog budaya, bahkan menjadi semacam bukti akulturasi budaya umat Hindu (Bali) dengan budaya umat non Hindu (masyarakat Papua) di Kota Jayapura yang bisa memperkokoh integrasi masyarakat di tanah Papua.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data.

Secara umum jenis data dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan deskripsi kata atau kalimat, bukan data kuantitatif yang berupa data numerik dan statistik. Selanjutnya sumber data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian yaitu keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Kota Jayapura, Papua dan kegiatan penyungsungunya. Data primer yang diperoleh langsung di lapangan antara lain adalah data hasil observasi dan wawancara mendalam terkait dengan opini, sikap dan perilaku masyarakat penyungsung PASB.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah penelitian. Beberapa data sekunder ini antara lain dalam data etnografi dan profil umat Hindu penyungsung Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Kota Jayapura, Papua. Selain itu, data sekunder yang dipakai referensi penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan dalam bentuk publikasi ilmiah yang menyangkut kehidupan umat Hindu penyungsung PASB di Kota Jayapura, Papua.

1.5.4 Instrumen Penelitian dan Penentuan Informan

a. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dilengkapi dengan pedoman diskusi kelompok terfokus dan pedoman wawancara atau *interview guide* yang dibantu dengan perekam suara dan gambar, kamera, dan alat dokumentasi lainnya seperti alat tulis. Dengan kelengkapan instrumen diharapkan apa yang ingin diperoleh dalam penelitian ini dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

b. Penentuan Informan

Menjelaskan objek dan informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkrit tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2010:76).

Ada dua jenis karakter objek penelitian dan penguasaan informasi peneliti tentang objek penelitian, yaitu pertama, peneliti sebelumnya sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian, dan kedua, peneliti benar-benar buta informasi tentang objek penelitian. Kedua karakter inilah yang membedakan cara memperoleh informan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Ruslan, 2008: 157). Selaku informan dalam penelitian ini adalah pengurus Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dan wakil umat Hindu penyungsong pura setempat.

1.3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni:

- 1) Teknik dokumen atau kajian kepustakaan (Library Research), dilakukan dengan membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Di dalamnya juga berupa referensi yang diperoleh melalui bahan dokumen dari internet.
- 2) Teknik wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri dari pengurus dan warga penyung Pura Agung Surya Bhuvana (PASB).
- 3) Teknik observasi, yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat aktifitas umat Hindu penyung Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Kota Jayapura, Papua.
- 4) Teknik triangulasi, yakni mengecek keabsahan data baik yang dihasilkan melalui studi dokumentasi, hasil wawancara maupun data hasil observasi. Asmadi Alsa (2003: 80) menyatakan bahwa logika triangulasi hasil penelitian dari satu tipe penelitian (kuantitatif misalnya) dapat dicek dengan hasil penelitian yang diperoleh dari tipe penelitian yang lain (kualitatif). Ini umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian". Triangulasi merupakan upaya untuk meningkatkan validitas pengamatan atau interview dalam konteks penelitian, triangulasi termasuk jenis validitas silang, proses triangulasi dilakukan dengan cara mengamati suatu kasus dengan cara yang berbeda atau memperoleh informasi tentang sesuatu hal dari sumber lain yang berbeda, bila suatu data yang diperoleh dari metode yang berbeda tetap memberikan informasi yang sama (serupa) maka pengamatan tersebut dianggap objektif. Selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, triangulasi juga dapat diterapkan untuk untuk memperkaya data. Teknik triangulasi dapat digunakan untuk menyelidiki validitas

tafsiran peneliti terhadap data, karena triangulasi bersifat reflektif (Moloeng, 2004:330; Nasution, 2003:115).

1.5.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Analisis data dilakukan melalui langkah sebagai berikut: (a) menyusun satuan-satuan (*unityzing*) seluruh data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi dibagi satu persatu, dikumpulkan sesuai golongannya; dalam proses ini dilakukan reduksi data, yakni mengeliminir data yang kurang relevan, menyusun abstraksi dan menyusun satuan-satuan data; (b) melakukan kategorisasi data sehingga proses kategorisasi dan pengelompokan data bisa menjadi lebih baik; (c) menyusun hubungan antar kategori, membandingkan satu kategori data dengan kategori data lainnya, dan melakukan interpretasi tentang makna-makna setiap hubungan data tersebut; (d) memberikan interpretasi dan hubungan antarkategori data yang sudah dikelompokkan sehingga dapat ditemukan makna dan kesimpulannya (Moleong, 1993). Data yang dianalisis disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

2

ETHNOGRAFI MASYARAKAT PAPUA DI KOTA JAYAPURA

Di samping memahami sejarah keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB), penulisan buku ini juga bertujuan memahami penyebaran (diaspora) etnis Bali di Kota Jayapura dan peranan mereka sebagai *penyungsurung* PASB. Pada bagian ini juga dibahas perkembangan fungsi PASB sebagai objek wisata dan media perekat kerukunan antar warga bangsa di Kota Jayapura. Sebelum membahas beberapa topik tersebut, dipaparkan Ethnografi Masyarakat Papua di Kota Jayapura, meliputi: Gambaran Umum Wilayah Kota Jayapura, Sejarah Singkat Kota Jayapura, Profil Kependudukan Kota Jayapura, Organisasi Sosial dan sistem kekerabatan, serta sistem kepercayaan dan religi etnis Papua.

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA JAYAPURA

Kota Jayapura yang terletak di timur Indonesia merupakan pusat permukiman terpadat di Provinsi Papua. Dengan luas wilayah hanya 940 km², kota ini harus menampung penduduk pada tahun 2017 sebanyak 293.690 orang atau bertambah 1,7 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Abepura dengan jumlah 83.457 orang. Sedangkan Distrik Muara Tami merupakan distrik dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 12.854 orang.

Dengan luas wilayah 940 km² berarti kepadatan penduduk Kota Jayapura 312 jiwa/km². Kota Jayapura terletak di bagian utara Provinsi Papua pada 1°28'17,26"-3°58'0,82" Lintang Selatan

dan $137^{\circ}34'10,6''$ – $141^{\circ}0'8,22''$ Bujur Timur. Secara Geografis, Kota Jayapura terdiri dari 5 (lima) distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dengan, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami. Topografi daerah Kota Jayapura cukup bervariasi, mulai dari daratan, yang landai sampai berbukit-bukit/ gunung, di mana terdapat $\pm 60\%$ daerah tidak layak huni (non budidaya) karena terdirdari daerah perbukitan yang terjal dengan kemiringan di atas 40% , rawa-rawa berstatus konservasi atau hutan lindung.



Gambar 2.1
Peta Kota Jayapura

Kota Jayapura berada pada ketinggian 1 – 700 M di atas permukaan laut (dpl) dan hanya $\pm 40\%$ lahan yang layak huni (budidaya) dan hamparan itu sebagian besar di Distrik Muara Tami yang merupakan wilayah perbatasan dengan Negara PNG. Iklim

di Kota Jayapura adalah tropis basah. Suhu udara rata-rata berkisar 30°C dengan suhu udara minimum berkisar 29°C dan suhu udara maksimum 31,8°C. Curah hujan bervariasi antara 45-255 mm/tahun dengan hari hujan rata-rata antara 148-175 hari hujan/tahun. Kelembaban udara bervariasi antara 79% - 81%. Menurut pencatatan Badan Meteorologi dan Geofisika wilayah V Jayapura Tahun 2017 suhu udara rata-rata 23,0 °C - 32,2°C. Kelembaban udara berkisar antara 77% -82%, sedang curah hujan tertinggi pada bulan Maret 2005 yaitu 500 mm dan terendah bulan Desember 2005 yaitu 100 mm. Kota Jayapura memiliki 17 sungai/kali, yaitu:a) Distrik Jayapura Utara : Kali Anafre, Kloofk amp, Bahabuaya, APO, Yapis dan Dok IX.b) Distrik Jayapura Selatan: Kali Acai, Siborogonyi, Entrop I, II, III dan dan Hanyaan.c) Distrik Abepura: Kali Kampwalker, dan Buperd) Distrik Muara Tami : Sungai Tami, Skamto, dan BuayaArah aliran sungai bermuara ke Laut Pasifik kecuali Sungai Kamp wolker dan Buper yang bermuara ke Danau Sentani.

Sungai-sungai yang terdapat di wilayah kota Jayapura secara umum mengalir ke arah utara dan selatan yang dipisahkan oleh suatu pemisah morfologi yang membentang dari barat ke timur, sehingga memisahkan aliran permukaan (*Surface run off*) pada dua area tangkapan hujan secara makro.

Arah aliran sungai pada umumnya sejajar dengan sungai utama yaitu Kali Kamp Wolker, Kali Acai, Kali Entrop, Kali Anafre, Kali Kloofk amp, Kali APO, Kali Dok IX dan Kali Tamiyang menyebar di Kota Jayapura dan sebagian besar bermuara ke lautan Pasifik kecuali Kali Kamp Wolker yang bermuara ke danau Sentani. Curah hujan rata-rata 1.500 - 2. 500 mm/tahun dan jumlah hari hujan rata-rata bervariasi antara 148 – 175 hari hujan/tahun. Iklim Kota Jayapura yang karena pengaruh letaknya, maka dapatlah dikategorikan beriklim tropis, dengan suhu rata-rata 21°C - 31°C, musim Hujan dan Musim Kemarau tidak teratur sebagai akibat pengaruh gerakan angin dari antar Benua Australia dan Asia serta lautan Pasifik dan lautan Hindia. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 77% - 82%.

Untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah (hidrologi) di wilayah Kota Jayapura, maka perlu pengelolaan dan pemanfaatan alam secara optimal dan tidak menimbulkan dampak terhadap air tanah itu sendiri. Sumber air tanah di Kota Jayapura ada yang termasuk tipe “uncounfined aquifer” atau sumber air tanah dengan permukaan air tanah bebas. Di samping itu, juga terdapat sumber air dalam dengan tipe “*confined aquifer*”. Penggunaan air bersih di Kota Jayapura digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (masak, minum, mandi, cuci, dll), untuk kebutuhan industri dan kebutuhan lain. Untuk keperluan tersebut, masyarakat pada umumnya menggunakan air sumur, mata air, dan sumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Jayapura. Sedangkan untuk keperluan pengairan sawah digunakan sumber air yang berasal dari Ingar ataupun limpahan air yang berasal dari mata air. Sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber air perlu dibatasi guna menjaga kelestariannya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjaga serta membatasi pembangunan pada kawasan-kawasan lindung.

Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di kawasan ini tidak diperkenankan adanya aktifitas atau kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung di Kota Jayapura, baik dalam konteks internal wilayah maupun regional, harus membentuk suatu kesatuan yang secara sinergis memberikan perlindungan dari daerah hulu hingga hilir, tanpa di batasi oleh batasan-batasan administratif. Kriteria yang dipergunakan untuk menentukan kawasan lindung ini didasarkan pada Keppres No. 32 Tahun 1980. Berdasarkan kriteria tersebut, maka kawasan lindung yang terdapat di Kota Jayapura adalah hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.

Upaya pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna sumberdaya serta untuk

menghindari konflik pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan sasaran yang diinginkan dari pengelolaan kawasan budidaya adalah: (1) terselenggaranya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) terhindarnya konflik pemanfaatan sumberdaya dengan pengertian pemanfaatan ruang yang berdasarkan pada prioritas pemanfaatan bagi kehidupan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat.

Pengelolaan kawasan budidaya dilakukan secara seksama dan berdaya guna bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek teknis serta aspek-aspek keruangan. Untuk itu, dalam penetapan kegiatan-kegiatan budidaya dibutuhkan pertimbangan teknis sektoral dan kriteria keruangan, yaitu ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan budidaya.

Kriteria teknis sektoral adalah ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan dalam kawasan memenuhi ketentuan-ketentuan teknis, daya dukung, kesesuaian lahan, dan bebas bencana alam. Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari: (1) kawasan hutan produksi terbatas; (2) kawasan pertanian; (3) kawasan pertambangan; (4) kawasan peruntukan industri; dan (5) kawasan pariwisata.

2.2 SEJARAH SINGKAT KOTA JAYAPURA

Kota Jayapura yang sekarang yang telah berkembang menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat II Jayapura dan Kota Madya Jayapura. Perubahan dan kontak yang terjadi antara lain dengan bangsa Portugis yang dikenal dengan perjalanan Bartholomeus Diaz, Vasco da Gama, Marco Polo, dan seterusnya. Perjalanan ini kemudian membuat orang Eropa melakukan penemuan dunia-dunia baru dengan tujuan mencari rempah-rempah. Era pelayaran ini membawa orang Portugis tiba juga di Indonesia pada umumnya dan secara khusus di Irija.

Orang-orang Spanyol pun pernah menginjakkan kaki di Irian Jaya. Sejarah arung samudera mencatat seorang berbangsa Spanyol bernama Ynico Ortis de Fretes pada tanggal 16 Mei 1545 berangkat dari Tidore ke Meksiko dengan kapal disebut San Juan. Dalam perjalanan, ia tiba di Sungai Mamberamo, 16 Juni 1545, kemudian memberi nama wilayah itu beserta orang-orang yang menghuninya, (Nova Guinea).

Kemudian muncul lagi penjelajah samudra lainnya bangsa Prancis, yakni Alvaro Memdana de Neyra (1567), Antonio Martha (1591-1593). Tanggal 13 Agustus 1768 satu rombongan dengan kapal laut berangkat dari Nantes, Perancis dipimpin pelaut LA Bougenville datang di Papua, sempat berlabuh di Teluk Yos Sudarso, Jayapura. Ia memberi nama Gunung Dofonsoro (Dobonsolo) menjadi Gunung Cyclops. Nama ini diambil dari nama seorang raksasa Yunani dalam mitos Yunani, raksasa bermata satu dan wajahnya sangat seram. Ia juga memberi nama sebuah gunung di sebelah timur Jayapura di sekitar Skow dengan nama Bougainville (<http://epenka.jw.lt/Sejarah+Kota+Jayapura>).

Dalam (surat keputusan) Gubernur en Hindia Belanda Nomor 4 Tahun tanggal 28 Agustus 1909 kepada asisten Residen, menyebutkan di Manokwari, Irja, diperbantukan satu detasemen yakni empat perwira dan 80 tentara. Detasemen ini diperbantukan untuk mengadakan persiapan bagi komisi pengaturan perbatasan antara Belanda-Jerman yang akan melakukan tugas pada tahun berikutnya. Ini berdasarkan petunjuk Residen Ternate untuk mengeksplorasi secara teratur daerah tersebut.

Tanggal 28 September 1909 Kapal “Edi” mendaratkan satuan detasemen dibawah komando Kapten Infanteri FJP Sache. Mereka seharusnya mendarat di Manokwari, namun akhirnya memilih mendarat di dekat Sungai Nau O Bwai (bahasa daerah Kayupulo berarti menghiasi diri) atau lebih populer di masyarakat Kayupulo disebut Numbay artinya airnya sangat jernih. Kapten Sache dibantu tiga perwira di antaranya Dr Gyllerup dan perwira laut kelas satu JH Luumes yang mengepalai tim komisi perbatasan. Mereka mulai menebang pohon-pohon untuk membuat barak. Di

antaranya pohon kelapa sebanyak 40 batang, tetapi segera pula diberikan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya seharga 40 ringgit atau $40 \times f\ 2,50 = f\ 100$ (seratus gulden). Ganti rugi tersebut dinilai sangat besar waktu itu (tahun 1910).



Gambar 2.2
Kota Jayapura Tempo Dulu

Seorang ahli sejarah Belanda bernama Kiellich menulis, "*Hollandia kostte vierting (40) rijk daalders*" artinya Jayapura dibeli dengan harga 40 ringgit atau f 100 sehingga berdirilah permukiman Belanda pertama dekat dua sungai Numbay dan sungai Anafri. Kedua sungai ini menyatu dan bermuara di Teluk Numbay (Yos Sudarso) dengan sebutan Sungai Numbay. Sungai Numbay mengalir melalui satu ngarai yang berawa-rawa penuh dengan pohon-pohon sagu dan bermata air di Pegunungan Cyclop. Kapten Sache pada tanggal 7 Maret 1910 secara resmi, berubahlah nama tempat itu dari Numbai menjadi Hollandia.

Hollandia yang dimaksudkan Sache adalah tempat di Taman Imbi sekarang ini, sebagai pusat Kota Jayapura. Di Taman itu sekarang berdiri Tugu Yos Sudarso sebagai tempat peristirahatan warga pada sore hari. Di sekitar tugu dijual makanan ringan oleh

pedagang kaki berkeliaran menawarkan jasa kepada masyarakat yang ingin mengabadikan wajahnya di depan tugu. Kelompok masyarakat tertentu di Irja melihat Taman Imbi dan sekitarnya sebagai tempat bersejarah bagi suku bangsa Papua. Di Taman Imbi itulah menurut masyarakat bendera bintang fajar pertama dikibarkan, 1 Desember 1961, dan diperingati sebagai hari lahir suku bangsa Papua. Persiapan hari lahir Irja terjadi di dalam Gedung Dewan Papua yang sekarang disebut Gedung Dewan Kesenian. Gedung itu dikuasai Satgas Papua sampai akhir Desember 2000 setelah diambil paksa oleh Brimob. Masyarakat pun mengibarkan bendera bintang fajar di depan Gedung Dewan Kesenian sejak Desember 1999-Mei 2000.

Hollandia berarti tanah yang berlekuk atau berbukit, sementara kondisi geografi di Nederland berteluk-teluk. Geografi Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda. Penjajah Belanda menyebut Holandia. Dibalik penyebutan nama ini, terkandung keinginan bangsa Belanda untuk menguasai wilayah yang kaya akan potensi alam tersebut. Buktinya, ketika menancapkan bendera Belanda, Kapten Sachse (2010) berkata “semoga bendera ini berkibar selamanya” (Hari Suroto, 2020).,

Kini, Kota Jayapura menjadi ibukota Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia. Kota ini terletak di teluk Jayapura. Seperti disebutkan di atas, sebelum bernama Jayapura, ibu kota Provinsi Papua ini punya beberapa nama. Sejak pertama kali Kapten Infanteri FJP Sachse mendarat di Teluk Youtefa pada 7 Maret 1910 memberi nama Hollandia. Nama ini terus bertahan selama Belanda masih memerintah di wilayah Nederlands Nieuw Guinea hingga 1963.

Pada masa Hindia Belanda, Kota Jayapura bernama Hollandia. Setelah Belanda menyerahkan Papua ke UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), maka Hollandia diubah menjadi Kota Baru. Pada masa Orde lama (Orla), Jayapura menjadi Kota Baru dan sebagai penghargaan kepada Presiden Sukarno, nama ibukota Provinsi Irian Barat berubah lagi menjadi Soekarnopura (tahun 1969-1975). Selanjutnya, sejak tumbang rezim Orla,

Presiden Soeharto kembali mengganti nama Kota Soekarnopura menjadi Kota Jayapura yang berarti kota kemenangan pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Arti literal dari Jayapura, sebagaimana kota Jaipur di Rajasthan, adalah 'Kota Kemenangan' (bahasa Sanskerta: jaya yang berarti "kemenangan"; pura: "kota").

Ibu kota Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi 1 kota administratif (Kotif) Jayapura. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1979 tanggal 28 Agustus 1979 tentang pembentukan Kotif Jayapura, dengan pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1979 dan Instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 1979. Kota Jayapura menjadi Kotif pada 14 September 1979 diresmikan oleh H Amir Machmud, Mendagri waktu itu. Pada hari yang sama dilantik Drs Florens Imbiri sebagai Wali Kota Jayapura. Secara administrasi pemerintahan di Kota Jayapura dapat digambarkan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Lima wilayah Distrik Kota Jayapura

No	Distrik	Ibukota Distrik	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung	Luas Wilayah	
					Km ²	% Thd Total
1.	Abepura	Kotabaru	8	3	155,7	16,56
2.	Jayapura Selatan	Entrop	5	2	43,4	4,62
3.	Jayapura Utara	Tanjung Ria	7	1	51	5,43
4.	Muara Tami	Skow Mabo	2	6	626,7	66,67
5.	Heram	Waena	3	2	63,2	6,72
Jumlah			25	14	940,00	100,00

Sumber : Kota Jayapura Dalam Angka, 2018

Secara administratif, Pemerintah Kota Jayapura terdiri dari 5 distrik dengan 39 Kelurahan/kampung terdiri dari 25 kelurahan dan 14 kampung. Distrik Abepura merupakan distrik dengan jumlah Kelurahan dan Kampung terbanyak dengan rincian 8 jumlah kelurahan dan 3 jumlah kampung. Sedangkan distrik dengan jumlah kelurahan/kampung terkecil Distrik Heram dengan rincian 3 jumlah kelurahan dan 2 jumlah kampung.

2.3 PROFIL KEPENDUDUKAN KOTA JAYAPURA

Jumlah penduduk Kota Jayapura tahun 2017, tercatat sebanyak 293.690 orang. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Abepura dengan jumlah 83.457 orang. Sedangkan Distrik Muara Tami merupakan distrik dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 12.854 orang. Dengan luas wilayah 940 km² berarti kepadatan penduduk Kota Jayapura 312 jiwa/km² (lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Sebaran Penduduk Kota Jayapura

NO	Distrik	Luas Area		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		km ²	%	Jumlah	%	
1	Muara Tami	626,7	66,67	12.854	4,38	21
2	Abepura	155,7	16,56	83.457	28,42	536
3	Heram	63,2	6,72	46.019	15,67	728
4	Jayapura Selatan	43,4	4,62	76.848	26,17	1.771
5	Jayapura Utara	51,0	5,43	74.512	25,37	1.461
Total		940	100,00	293.690	100,00	312

Sumber : Kota Jayapura Dalam Angka, 2018

Jumlah penduduk Kota Jayapura tahun 2017, tercatat sebanyak 293.690 orang atau bertambah 1,7 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Abepura dengan jumlah 83.457 orang. Sedangkan Distrik Muara Tami merupakan distrik dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 12.854 orang. Dengan luas wilayah 940 km² berarti kepadatan penduduk Kota Jayapura 312 jiwa/km². Tahun 2017, jumlah rumah tangga di Kota Jayapura tercatat 69.140 rta. Dengan jumlah penduduk laki-laki 157.710 jiwa dan perempuan 135.980 jiwa, rasio jenis kelamin di Kota Jayapura sebesar 116 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 16 persen daripada penduduk perempuan. Penduduk Kota Jayapura didominasi oleh kelompok penduduk usia 20-24 tahun. Sementara itu kelompok penduduk usia tua (60 tahun keatas) mempunyai proporsi yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian penduduk usia lanjut sangat tinggi.

Tabel 2.3 Penduduk Kota Jayapura Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	16.569	14.673	31.242
5-9	15.305	13.937	29.242
10-14	13.710	12.194	25.904
15-19	14.134	12.681	26.815
20-24	19.678	16.699	36.377
25-29	18.397	15.512	33.909
30-34	15.480	13.040	28.520
35-39	12.074	10.608	22.682
40-44	10.344	8.877	19.221
45-49	7.874	6.389	14.263
50-54	5.436	4.544	9.980
55-59	3.675	2.927	6.602
60-64	2.485	1.818	4.303
65+	2.549	2.081	4.630
Total	157.710	135.980	293.690

Sumber : Kota Jayapura Dalam Angka, 2018

Pada tahun 2017, jumlah rumah tangga di Kota Jayapura tercatat 69.140 juta. Dengan jumlah penduduk laki-laki 157.710 jiwa dan perempuan 135.980 jiwa, rasio jenis kelamin di Kota Jayapura sebesar 116. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 16 persen dari pada penduduk perempuan. Penduduk Kota Jayapura didominasi oleh kelompok penduduk usia 20-24 tahun. Sementara itu kelompok penduduk usia tua (60 tahun ke atas) mempunyai proporsi yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian penduduk usia lanjut sangat tinggi (Lihat Tabel 2.3).

Kemajuan masyarakat secara mendasar ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Keberadaan pendidik dan fasilitas pendidikan untuk mendukung pendidikan di Kota Jayapura cukup memadai. Tahun 2017, jumlah fasilitas pendidikan di Kota Jayapura tercatat 165 unit TK, 106 unit SD, 46 unit SLTP, 23 unit SLTA dan 13 unit SMK. Jumlah murid TK sebanyak 6.987 orang, SD sebanyak 33.708 orang, jumlah murid SLTP sebanyak 14.376 orang, dan jumlah murid SMA/SMK ada sebanyak 13.717 orang. Sedangkan jumlah guru di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK

masing-masing sebanyak 947 orang, 868 orang, 494 orang, dan 1.177 orang (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Sekolah, Tenaga Guru dan Siswanya

No	Sekolah	Jumlah Gedung (unit)	Jumlah siswa	Jumlah guru
1	TK	165	6.987 orang	947 orang
2	SD	106	33.708 orang	868 orang
3	SMP	46	14.376 orang	494 orang
4	SMA/SMK	36	13.717 orang	1.177 orang

Sumber : Kota Jayapura Dalam Angka, 2018

Tahun 2017, jumlah pencari kerja di Kota Jayapura tercatat 4.467 orang, terdiri dari 2.164 pencari kerja laki-laki dan 2.303 pencari kerja perempuan. Sebagian besar tingkat pendidikan pencari kerja adalah SLTA/ sederajat yang mencapai 2.468 orang atau 55,6 persen. Pencari kerja paling banyak berumur antara 20-29 tahun yang mencapai 3.238 orang atau 73.06 persen (Kota Jayapura Dalam Angka, 2018).

2.4 ORGANISASI SOSIAL DAN SISTEM KEKERABATAN

Organiasi sosial dan sistem kekerabatan suatu masyarakat bisa dipahami dengan melihat realitas hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat tersebut, bagaimana cara mereka berinteraksi, hal-hal yang mereka katakan dan lakukan dalam hubungan mereka satu sama lain. Selain itu, juga perlu dipahami gagasan mereka tentang hubungan sosial antar mereka, konsepsi masing-masing tentang pihak yang lain, serta strategi dan pengharapan yang menuntun perilaku mereka (Keesing, 1989).

Dalam kehidupan orang Papua di Kota Jayapura terdapat organisasi sosial yang berkaitan dengan status dan kedudukan masyarakat adat setempat. Dalam masyarakat adat orang Papua, kedudukan kepala adat yang dikenal dengan sebutan Ondoafi menjadi yang utama dan menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Kepala adat bagi mereka

adalah status yang terberi (ascribed status) yang menjadi ketua pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat (Amin, dkk, 2013:179).

Sebagai penduduk asli Kota Jayapura (orang Port Numbay) yang berada dalam wilayah adat Mamta (bersama dengan orang Sentani, Genyem, Depapre, Demta, Sarmi, Bonggo, dan Mamberamo), kedudukan Ondoafi selaku kepala adat memegang peran penting dalam kehidupan organisasi sosial orang Papua yang berada di Kampung Nafri, Tobati Enggros, Kayu Batu, Kayu Pulo, Waena, dan Skouw. Demikian pula orang Biak yang berada dalam wilayah adat saireri dengan kepala suku sebagai pemimpin informalnya.

Terdapat beberapa suku bangsa asli Papua yang bermukim di Kota Jayapura. Diantaranya adalah Masyarakat Adat Waena, Masyarakat Adat Nafri, Masyarakat Adat Tobati-Enggros, Masyarakat Adat Kayu Pulo, Masyarakat Adat Kayu Batu, Masyarakat Adat Skouw, dan Masyarakat Adat Biak (Yuliana. 2018).

(1) Masyarakat Adat Waena

Masyarakat adat Waena berada dalam wilayah distrik Heram Kota Jayapura. Masyarakat adat Waena masih merupakan satu rumpun dengan masyarakat asli Kampung Harapan (Nolokla) yang berada di distrik Sentani Timur. Seperti masyarakat adat lainnya yang ada di Kota Jayapura, orang Waena (suku Sentani) juga menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Masyarakat adat ini memiliki struktur adat yakni membawahi beberapa suku kecil yang dipimpin oleh masing-masing ondoafi, yaitu Asei (Asei Pulau dan Asei Besar) yang dikepalai oleh Ondoafi Kleofla, Masyarakat adat Waena yang dikepalai oleh Ondoafi Ramses Ohee, dan suku Ayapo dikepalai oleh Ondoafi Enos Deda. Kepemimpinan adatnya pun diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan anak laki-laki tertua (hak kesulungan). Dalam masyarakat waena, sebutan untuk ondoafi atau kepala adat adalah ondofolo.

Keputusan seorang ondofolo bagi segenap warganya didasarkan pada pertimbangan dewan Khoselo. Posisi dewan khoselo adalah mewakili mata rumah (kepala klen), orang yang dituakan dan berpengaruh di kampung setempat. Beberapa marga yang terdapat dalam masyarakat adat kampung Waena, meliputi: Ohee/Modouw, Hendambo, Pumoko, Dasim/Yepese, Kambu/Yepese, Kaegere dan Ongge.

(2) Masyarakat Adat Nafri

Masyarakat adat Nafri yang berdiam di Kampung Nafri termasuk dalam wilayah administratif Distrik Abepura. Batas-batas wilayahnya adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Asano, Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Holtekamp, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tobati, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Vim.

Mata pencaharian penduduk kampung Nafri adalah meramu sagu yang masih menjadi mata pencaharian pokok, diselingi dengan bertani atau bercocok tanam berupa tanaman jangka panjang di ladang. Sebagian kecil masyarakat Nafri mulai menjalankan beberapa jenis usaha kecil, seperti membuka kios, menjual pinang, berjualan sayuran di pasar Youtefa, dan juga usaha hewan ternak seperti babi dan ayam.

Masyarakat adat kampung Nafri sebagian besar masih memegang aturan dan norma adatnya. Dalam stratifikasi sosialnya, kedudukan seorang kepala adat yang disebut ondoafi (ontofro dalam bahasa orang Nafri) adalah menempati status yang lebih tinggi. Masyarakat adat Nafri ini mengenal dua keondoafian yakni Awi Warke dan Awi Sembekra yang masing-masing juga memiliki pesuruh (washe) serta kepala-kepala klennya. Keondoafian Awi Warke terdiri dari beberapa marga yaitu; Awi, Awi Nero, Finkreuw, Wamuar, Uyo, dan Tjoe, sedangkan marga-marga dalam keondoafian Awi Sembekra terdiri dari; Awi, Taniauw, Merahabia, Mramra, Kay, Hanuebi, Sibri, dan Wamiauw. Sementara status terendah adalah pada golongan masyarakat biasa.

Umumnya persoalan kemasyarakatan diserahkan dan diselesaikan oleh dewan adat. Kedudukan sebagai *ondoafi* dalam stratifikasi sosial masyarakat adat Nafri sangat dihormati dan terlihat jelas dalam penyelesaian perkara adat. Bagi masyarakat adat Nafri keputusan dari *Ondoafi* (kepala adat) yang berdasarkan hukum atau norma-norma adat Nafri sangat dipatuhi sebab jika tidak maka ada tumbal atau bala (musibah/kesialan) pada dirinya dan keluarganya. Keputusan atau suara dari *Ondoafi* dipercaya terikat dengan roh-roh nenek moyang dulunya hingga sekarang. Bagi warga yang bertikai akan diselesaikan oleh *ondoafi* secara kekeluargaan. Setelah berdamai, kedua belah pihak yang bertikai berjabat tangan, berpelukan dan berdoa – makan bersama. Mereka menjadi saudara, satu keluarga besar adat Nafri.

(3) Masyarakat Adat Tobati-Enggros

Tobati-Enggros adalah nama dua kampung yang terletak di Teluk Youtefa. Keduanya berada dalam dua distrik (kecamatan) dan kelurahan yang berbeda. Letak geografis Kampung Tobati berada di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas; Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Hamadi, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Enggros, sebelah timur berbatasan dengan laut pasifik, dan sebelah barat berbatasan dengan Waimhorok. Sedangkan Kampung Enggros termasuk dalam wilayah administratif distrik Abepura Kota Jayapura. Adapun batasbatasnya adalah, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Asano, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Tobati, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Vim, dan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Holtekamp.

Orang Tobati-Enggros menganut sistem kekerabatan yang dikenal dengan istilah *matarumah*. Masyarakat adat Tobati-Enggros mulanya samasama menghuni satu rumah besar yang dibagi menjadi beberapa kekerabatan. Bilik-bilik keluarga inilah yang kemudian terpecah dan disebut *matarumah* kemudian berkembang menjadi beberapa *keret* yang merupakan satu sub-klen. Penduduk

kampung Tobati-Enggros terdiri dari beberapa keret atau marga yang mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal).

Gelar Pimpinan tertinggi masyarakat adat Tobati-Enggros adalah Harsori Mehai atau Ondoafi. Kedudukan Harsori Mehai (Ondoafi) di dalam melaksanakan tata pemerintahan adat dibantu oleh pesuruh yang disebut “rowes”. Rowes bertugas menyampaikan hal-hal prinsip kepada setiap Kepala Suku berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan adat. Tugastugas pemerintahan adat yang dipegang “Harsori Mehai” adalah: (1) menjaga keutuhan batas-batas adat bila ada pelanggaran-pelanggaran secara adat, (2) menjaga kesejahteraan rakyat dari kedua kampung tersebut, (3) menegakkan aturan hukuman dan sanksi bila ada pelanggaran-pelanggaran secara adat, dan (4) mengadakan pesta rakyat gunanya untuk menjaga persatuan/kesatuan diantara masyarakat adat dengan Ondoafi dan Kepala Suku (Yuliana. 2018).

Hidup Gotong Royong telah dianut oleh setiap marga di Kampung Tobati, seperti: Berkebun, membuat pagar kebun, menarik perahu dari hutan, dan sebagainya. Selain Ondoafi Besar Tobati-Enggros, ada juga Ondoafi khusus dalam Kampung Tobati, yaitu: Ondoafi Tobati Laut (dari marga Ireeuw), tugasnya mengatur marga-marga yang diawasinya seperti: marga Srem-Srem, marga Meraudje, marga Haay, dan marga Hassor.

Diantara marga (*keret*) utama dan marga/keret lainnya terdapat pembagian peran menurut kedudukannya. Marga Hamadi sebagai Ondoafi Besar berperan mengawasi, mengatur, dan memutuskan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama masyarakat kedua kampung. Ondoafi dibantu oleh seorang Rowes (pesuruh) yang disebut Rowes Mhai. Marga Itaar adalah Kepala Suku Babi, artinya dia berhak mengatur perburuan babi hutan atau membeli babi peliharaan kerabatnya untuk keperluan suatu pesta adat. Drunyi adalah Kepala Suku jaring berhak mengatur dan menyimpan alat-alat penangkapan tradisional yang dibutuhkan untuk menangkap ikan.

(4) Masyarakat Adat Kayu Pulo

Kampung Kayu Pulo atau kampung Tahima Soroma sudah ada sejak dahulu kala, tetapi belum diketahui kapan dan bagaimana terbentuknya. Orang Kayu Pulo telah berada ratusan tahun yang lalu di Kampung Tahima Soroma. Mereka adalah klen Sibi Rumah Cone, yang pertama-tama mendiami pulau ini, bersama klen Sibi Rahabeam, klen Hai dan klen Soro. Sedangkan klen Youwe yang berasal dari daerah Cycloop, datang dan mendiami Pulau Kosong, atau pulau yang saat ini mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Buton.

Klen Sibi berada di wilayah ujung Barat. Sedangkan klen Hai di ujung Timur, klen Youwe yang terdiri dari dua bersaudara mendapat bagian wilayah di tengah-tengah dan bertugas mengatur kampung serta menjadi penguasa laut dan klen Soro yang bertugas sebagai pesuruh. Mereka hidup berdampingan di bawah Satu Tifa dan Satu Para-para Adat. Sebagai contoh, saat Sibi mengadakan acara adat, Youwe akan berdansa dan Sibi memberikan jamuan makan, begitupun sebaliknya.

Di para-para adat, orang Kayu Pulo mengangkat klen Youwe menjadi bagian dari keluarga besar mereka dengan cara tinggal sekampung dan diberikan batas-batas wilayah yang dibagikan oleh orang Kayu Pulo. Kedudukan ondoafi selaku kepala adat adalah berlaku turun temurun, tidak melalui pemilihan. Tugas utama sebagai ondoafi besar adalah mengawasi Kampung Tahima Soroma (Kayu Pulo) dan Pulau kosong. Setiap kepala klen dibantu oleh roweshe (pesuruh). Roweshe bertugas menyampaikan hal-hal prinsip kepada setiap kepala klen berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan adat. Orang Kayu Pulo (Tahima Soroma) juga menganut sistem kekerabatan patrilineal. Namun, dalam tatanan hukum adat di Kayu Pulo, perempuan mendapat tempat yang sangat dihormati.

Dalam kehidupan masyarakat Kayu Pulo, perempuan yang menafkahi laki-laki dianggap tabu, karena menjatuhkan harga diri kaum laki-laki. Perempuan dilarang untuk mencari nafkah.

Perempuan dapat meminta tolong kepada keluarganya yang lain, apabila laki-laki tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

(5) Masyarakat Adat Kayu Batu

Kampung Kayu Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah perkampungan yang ada di lingkungan Port Numbay, Kota Jayapura. Kampung Kayu Batu merupakan satu-satunya kampung di wilayah administratif distrik Jayapura Utara yang berbatasan dengan Teluk Humbolt di sebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Pasifik di sebelah Utara dan di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Ria di sebelah Baratnya. Selain penduduk yang berasal dari kampung lain yang menetap di Kayu Batu, juga terdapat penduduk asli yang berasal dari klen Makanuay dan Puy. Dalam perkembangannya klen Makanuay dibagi dalam dua bagian yaitu Makanuay I (*rei*) dan Makanuay II (*remta*). Sedangkan klen Puy dalam bahasa asli disebut C'thargu. Kondisi perekonomian masyarakat kampung kayu batu umumnya adalah hidup dan bekerja dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam. Disamping sebagai nelayan, ada pula yang menjual jasa sewaan lokasi pantai wisata Base G.

Sejak dahulu, masyarakat adat Kampung Kayu Batu memiliki lembaga masyarakat adat sebagai lembaga tertinggi dalam organisasi sosial atau struktur pemerintahan adatnya. Pengambilan keputusan adat tertinggi berada di tangan ondoafi selaku kepala adat. Bagi masyarakat Kayu batu, seorang kepala adat adalah pemimpin yang disegani dan dipatuhi karena dipercaya sebagai seorang yang menerima kekuatan-kekuatan sakti. Ondoafi sebagai kepala adat memiliki posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat.

Adapun pelapisan sosial yang berlaku dalam masyarakat adat Kampung Kayu Batu yaitu menempatkan ondoafi (kepala adat) sebagai status tertinggi yang membawahi kepala-kepala klen, para rowese, hingga masyarakat adat. Dalam masyarakat kayu Batu, jabatan ondoafi adalah bersifat turun temurun melalui sistem

pewarisan. Peranan ondoafi sangat penting dalam penyelesaian sengketa adat mereka. Istilah “Para-para Adat” juga berlaku dalam masyarakat yang mengenal sistem perkawinan exogami ini. Para-para adat merupakan proses penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sehingga di antara para pihak yang bertikai hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan harmonis.

(6) Masyarakat Adat Skouw

Masyarakat adat Kampung Skouw sebagai bagian dari kota Jayapura pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Kekayaan alam yang terdapat di Kampung Skouw masih mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Menurut Karubaba (2008) bahwa masyarakat Jayapura termasuk orang Skouw masih memandang kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan sebagai bahan makanan yang cukup untuk keperluan hidupnya. Oleh karena itu, mereka menggantungkan hidupnya terutama atau bahkan secara umum pada sumber kekayaan alam setempat.

Masyarakat adat Kampung Skouw memiliki pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengelola tanah pertaniannya secara sederhana. Mereka menanam berbagai jenis tanaman, seperti ketela pohon, ketela rambat, petatas, talas, dan lainlain, untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Banyak pula tanah yang sudah dianggap tanah dari suatu marga, pernah ditanami, ditinggalkan dan tidak digarap lagi oleh warga lain dari fam itu. Hal itu disebabkan karena tanah itu sudah ditanami dengan tumbuh-tumbuhan berjangka panjang seperti pohon buah-buahan, pohon nangka, pohon pinang, atau kelapa.

Selain bertani dan meramu, masyarakat adat Kampung Skouw terutama yang laki-laki juga berburu. Mereka terbagi dalam kelompok-kelompok kecil (antara dua tiga orang laki-laki saja) berburu babi, rusa, burung, dan ikan. Dalam segala aktivitas kesehariannya, orang Skouw selalu membawa buah pinang (bersama kapur-sirih) untuk dikunyah. Serih-pinang ini dipercaya untuk menahan lapar, memberi tenaga, dan menghangatkan tubuh.

Masyarakat adat kampung Skouw yang berada di wilayah distrik Muara Tami ini memiliki ketua adat, yakni ondoafi besar (Bari Magite) sebagai pemimpin yang dihormati. Dari ketiga kampung masing-masing memiliki ondoafi (Bari, dalam bahasa Skouw) dan pesuruh dalam dan pesuruh luar. Pesuruh dalam bertanggung jawab atas ritual dan urusan sosial, sedangkan pesuruh luar bertugas sebagai pembawa atau pemberi berita (humas).

(7) Masyarakat Adat Biak

Secara tradisional masyarakat Biak terorganisir dalam keret dan mnu kampung). Setiap keret memiliki pemimpin yang disebut mamri yang merupakan orang kuat di keret itu. Seorang mamri harus memiliki kelebihankelebihan agar bisa melindungi keretnya. Model kepemimpinan ini diperoleh dengan cara diperjuangkan sendiri, bukan dari hasil pewarisan.

Seorang mamri yang perkasa, apabila bisa memimpin perang menguasai keret-keret lain, ia bisa menjadi kepala suku yang disebut Mananwir. Menurut tradisi Biak, seorang yang diangkat oleh tua-tua suku menjadi Mananwir harus memenuhi kriteria yang terdiri dari: bisa menjadi panglima perang, bisa memimpin rakyatnya, mempunyai (menguasai) tanah ulayat tertentu untuk memberi makan rakyatnya. Jadi ditekankan, mananwir harus bisa memberi makan rakyatnya. Sebagai mananwir, harus dapat menangani persoalan-persoalan masyarakatnya termasuk sengketa yang timbul antara warga keretnya sendiri. Seorang Mananwir harus berakhlak, bermoral. Apa yang ia ucapkan harus sesuai, dan tidak dibenarkan menarik kembali apa yang sudah ia ucapkan. Seorang Mananwir yang menyalahi adat tradisi Biak, menurut kepercayaan mereka, ia akan dimakan tanah.

Dalam stratifikasi sosialnya, masyarakat Biak mengenal dua golongan yaitu golongan masyarakat bebas yang disebut manseren (yang dipertuan) dan golongan masyarakat yang disebut budak atau women berasal dari tawanan-tawanan perang. Tugas utama golongan ini adalah membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi siapa mereka dipertuan, seperti berkebun, mencari

ikan, membangun rumah dan lain-lain. Oleh karena tugas yang demikian, maka seorang budak sering dinamakan juga dalam bahasa Biak *manfanwan*, artinya yang dapat disuruh untuk melaksanakan pekerjaan tertentu (Yuliana. 2018).

2.5 SISTEM KEPERCAYAAN DAN RELIGI

Berbagai keterangan etnografi tentang sistem kepercayaan orang Papua menunjukkan bahwa dewa atau tuhan tertinggi itu diakui dan dihormati karena dianggap sebagai dewa pencipta yang mempunyai kekuasaan mutlak atas nasib kehidupan manusia, namun ada juga kesan kuat bahwa kekuasaan dewa itu telah dikuasakan pada makhluk-makhluk yang tidak nampak tetapi terdapat didalam unsur alam tertentu seperti misalnya angin, hujan, dan petir atau berdiam dalam benda tertentu disekitar alam tempat tinggal manusia seperti dalam pohon-pohon besar, dalam sungai, pusaran air sungai, dasar laut atau tanjung tertentu.

Pada umumnya masyarakat adat di Papua meyakini bahwa makhluk-makhluk halus memiliki kekuatan yang mengontrol kehidupan manusia. Mereka harus ditakuti dan dihormati dengan cara memberikan sesaji atau pelaksanaan ritus tertentu. Tindakan seperti ini menyatakan pengakuan manusia terhadap kehadiran dan kekuasaan roh-roh halus. Dengan memberikan sesaji atau ritus (upacara) tertentu, orang Papua mengharapkan agar kekuatan-kekuatan alam berbaik hati terhadap kehidupannya. Kekuatan-kekuatan alam itu dibujuk untuk melindungi manusia melalui upacara ritus atau pemberian sesaji.

Orang Papua juga percaya bahwa roh-roh dari orang yang telah mati mendapat kekuatan dari dewa pencipta untuk menguasai manusia yang hidup. Itulah sebabnya orang yang masih hidup harus menjalin hubungan baik dengan orang yang telah mati agar mereka terlindung dari bermacam-macam malapetaka yang dapat diakibatkan oleh roh-roh orang mati.

Pada umumnya masyarakat nusantara meyakini bahwa di luar dirinya ada yang menimbulkan kekuatan, tetapi sikap menghadapi

kekuatan itu berbeda. Misalnya, manusia modern tidak menguasai gunung berapi, tetapi ia hanya dapat mempelajari, menerangkan, dan meramalkannya berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga dapat mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk memperkecil bahaya atau akibat yang ditimbulkan olehnya. Demikian pula apabila berhadapan dengan objek-objek lainnya, semuanya dipergunakan sesuai dengan kemampuan manusia dengan keperluan hidupnya. Sedangkan masyarakat tradisional bersikap sebaliknya, karena gunung dianggap sebagai makhluk berpribadi, maka apabila gunung meletus berarti ada kekuatan yang menguasai gunung tersebut, sehingga masyarakat tradisional berusaha mendekatinya dengan saji-sajian dan bahkan memujanya dengan tujuan agar tidak menimbulkan bencana lagi (Ghazali 2011:25-26).

Para pakar tradisi sejarah lisan mengemukakan bahwa sejarah sosiologi dan kultural, kehidupan semua suku bangsa yang mendiami wilayah nusantara pada kenyataannya sebelum masuknya pengaruh unsur-unsur agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen (Katolik dan Protestan) sudah mempunyai agama atau sistem religi. Masyarakat nusantara memiliki sistem kepercayaan setempat atau kepercayaan asli dalam bentuk animisme dan dinamisme atau kepercayaan kepada arwah orang-orang yang sudah meninggal. Mereka juga meyakini adanya roh yang terkandung dalam sebuah benda tertentu, termasuk batu besar, pohon besar, gunung, dan tempat-tempat yang mempunyai kekuatan rahasia serta menakutkan yang dari semuanya itu akan diperoleh suatu kekuatan gaib (Kambu 2009:56).

Orang Papua juga memiliki sikap hidup yang serba magis serta pandangan terhadap alam semesta atau pun menyakralkan obyek tertentu. Sebagaimana ditunjukkan pada kebiasaan dan kepercayaan mereka tentang adanya larangan-larangan seperti larangan memasuki kebun atau larangan menangkap ikan pada masa-masa tertentu. Bahwa barang siapa melanggar larangan tersebut akan mengalami musibah bahkan kehilangan nyawanya. Kambu (2009:51) mencontohkan larangan untuk memasuki kebun yang dilakukan dengan menempatkan patung-patung ular atau

hewan lainnya ataupun gambar yang dibuat dari daun pisang atau daun sagu. Benda-benda tersebut dibuat di rumah berhala dan siapa yang melanggar akan segera menemui ajalnya, karena benda-benda itu telah diisi dengan tenaga gaib. Orang-orang yang lewat dekat benda-benda ini hanya diperbolehkan berbisik.

Oleh karena itu berbagai upacara adat pada masa lampau yang masih ada di masa kini adalah bukti sejarah agama dan kepercayaan asli. Jadi, meskipun injil dan agama Kristen serta agama-agama lain sudah masuk dan berkembang serta meresap dalam kehidupan masyarakat di berbagai tempat, namun mereka tidak menghancurkannya, hanya dalam kondisi terdesak saja. Artinya, nilai-nilai kepercayaan asli tersebut tetap hidup dan dipelihara bahkan dipertahankan karena dibutuhkan serta dimanfaatkan pada moment tertentu sesuai kebutuhan masyarakat (Kambu 2009:56)

Sistem kepercayaan (religi) orang Papua ini sekarang sudah mulai pudar, sejak kehadiran agama islam dan Kristen di tanah Papua (Irian Jaya). Agama-agama besar seperti Islam dan Kristen masuk di daerah Irian Jaya pada periode waktu yang berbeda-beda. Agama besar pertama yang masuk di Irian Jaya adalah Agama Islam. Agama Islam yang masuk di Irian Jaya, yaitu di daerah kepulauan Raja Ampat dan daerah Fak-fak berasal dari Kepulauan Maluku dan disebarkan melalui hubungan perdagangan yang terjadi antara kedua daerah tersebut. Menurut Van der Leeden (1980:22), agama Islam masuk di kepulauan Raja Ampat ketika daerah tersebut mendapat pengaruh dari Kesultanan Tidore tidak lama sesudah agama tersebut masuk di Maluku pada abad ke 13.

Agama besar lain yang datang dari luar adalah agama Kristen. Agama Kristen masuk di Irian Jaya pada pertengahan abad ke 19, jadi kurang lebih enam abad sesudah agama Islam dikenal oleh sebagian besar penduduk Papua. Kendati agama Nasrani masuk di Papua sudah relative lama (lebih dari setengah abad lalu), namun penyebaran dan penerimaannya berbeda antara satu golongan etnik lainnya. Golongan etnik yang menerima pengaruh nasrani lebih awal, antara lain adalah penduduk di Teluk Doreri,

Manokwari, penduduk di sepanjang Teluk Wandamen dan pulau-pulau yang terletak di Teluk Cenderawasih (Kamma 1953), tetapi ada juga yang baru menerimanya tidak lebih beberapa belas tahun yang lalu, terutama di antara penduduk yang berdiam di pegunungan Tengah, misalnya orang Mek di Lembah Selah yang baru mengenal dan menerima agama Nasrani pada tahun 1980 (Godschalk 1993:23).



Gambar 2.3
Gereja Katedral Kristus Raja di Jayapura

Para pekabar injil Nasrani pertama yang membawa masuk agama Kristen di daerah Papua adalah Ottow dan Geisler. Dua orang penginjil ini diutus oleh Pdt Gossner dari Berlin, Jerman atas inisiatif Pdt. Heldring untuk pekabaran Injil di New Guinea

(Kamma 1953:96). Para pekabar injil, Ottow dan Geisler, tiba di Pulau Mansinam, Teluk Doreri di Papua pada tanggal 5 Februari 1855. Penginjil Ottow bekerja kurang lebih tujuh tahun lamanya (1855-1962), meninggal dunia dan dikubur di Kwawi, Manokwari, sedangkan penginjil Geisler bekerja lebih 14 tahun (1855-1870), kemudian kembali dan meninggal di negeri asalnya, Jerman. Usaha pengkristenan yang dilakukan oleh Ottow dan Geisler, yang pada mulanya kurang berkembang itu, kemudian dilanjutkan oleh pendeta-pendeta Belanda yang diutus oleh badan pekabaran injil bernama *Utrechtsche Zendingen Vereniging* (UZV) yang tiba di Mansinam pada tahun 1862.

Sebagian masyarakat Papua masih memiliki kepercayaan totemisme. Hal tersebut sebagai bentuk kepercayaan yang memandang asal-usul manusia berasal dari dewa-dewa nenek moyang, juga mewarnai penduduk asli kota Jayapura yang tersebar di lima distrik yakni Abepura, Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Muara tami. Namun walaupun begitu sebagian dari mereka telah memeluk beberapa agama resmi yang diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Kathoik, Hindu dan Budha.

Sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk Kota Jayapura yang memeluk agama Protestan tercatat 287.335 orang atau 44,57 persen dari total penduduk Kota Jayapura. Sementara pemeluk agama Islam dan Katolik mencapai 41,46 persen dan 13,26 persen, sedangkan sisanya merupakan pemeluk agama Hindu dan Budha. Tahun 2017, jumlah tempat peribadatan paling banyak yang ada di Kota Jayapura adalah tempat peribadatan umat Protestan yang tercatat sebanyak 350 unit. Sedangkan jumlah tempat peribadatan Katolik mencapai 36 unit, tempat peribadatan Islam mencapai 200 unit, tempat peribadatan Hindu sebanyak 5 unit dan tempat peribadatan Budha ada 6 unit. Jumlah jemaah haji yang berasal dari Kota Jayapura pada tahun 2017 mencapai 310 orang.

3

DIASPORA ETHNIS BALI DAN SEJARAH PURA AGUNG SURYA BHUVANA

Keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dan perkembangan kegiatan sosial-keagamaan di pura kebanggaan masyarakat Kota Jayapura ini tidak bisa dilepaskan dengan peranan etnis Hindu Bali di Kota Jayapura. Oleh karena itu, pada bagian ini dibahas Diaspora Etnis Hindu Bali di Jayapura, serta sejarah dan Profil Pura Agung Surya Bhuvana, pura Padma Bhuvana di Indonesia bagian Timur. Selain itu, juga dibahas tentang dinamika sosial-keagamaan umat Hindu di Jayapura.

3.1 DIASPORA ETHNIS BALI DI KOTA JAYAPURA

Kata diaspora berasal dari bahasa Yunani kuno (586 SM) yang berarti penyebaran atau penaburan benih. Kata itu mulanya digunakan bangsa Yunani untuk merujuk warga kerajaan yang bermigrasi ke suatu daerah jajahan untuk tujuan membuat koloni demi mengasimilasi wilayah itu ke dalam wilayah kerajaan. Kata itu juga muncul dalam kitab perjanjian lama untuk merujuk orang yahudi yang dibuang dari jerusalem. dalam merriam-webster dictionary, diaspora berarti: pengendapan koloni yang tersebar dari orang-orang yahudi di luar palestina setelah pembuangan babel, orang-orang yahudi yang tinggal di luar palestina atau israel modern, gerakan, migrasi, atau hamburan dari orang jauh dari ke didirikan atau tanah air leluhur, atau orang menetap jauh dari tanah air leluhur mereka (Perdana, 2017).

Selanjutnya, William Safran (1991), seorang ahli ilmu politik dari Universitas Colorado Boulder, memberikan batasan

istilah diaspora yang mempunyai enam karakteristik, meliputi: (1) berpencar dari pusat (asal) aslinya ke dua atau lebih daerah *peripheral* (pinggiran), atau wilayah asing; (2) ingatan, visi, atau mitos kolektif tentang asal-muasal asli mereka — lokasi fisik, sejarah dan pencapaian-pencapaian (*achievements*) yang telah dilakukan; (3) rasa keterasingan dan isolasi dari masyarakat tuan rumah; (4) idealisasi tanah leluhur mereka sebagai tempat yang benar, ideal dan tempat yang mereka atau keturunan mereka akhirnya akan kembali (pulang kampung); (5) komitmen untuk memelihara atau memulihkan tanah leluhur mereka yang asli, aman, dan makmur; dan (6) kesadaran dan solidaritas etnokomunal yang didefinisikan oleh hubungan berkelanjutan dengan tanah kelahiran (Safran 1991: 83–4).

Menurut Missbach (2011, 2012), diaspora merupakan proses formasi identitas sekumpulan orang —individu maupun komunitas— yang berada di luar tanah asalnya sebagai bentuk aspirasi dan rekognisi di tengah kondisi politik daerah/negara asal maupun daerah/negara penerima. Diaspora menjadi istilah yang memayungi kelompok lain karena migrasi. Status seseorang atau kelompok dapat disebut sebagai diaspora bukan perihail faktor pendorong migrasi atau seberapa lama mereka menetap, melainkan kondisi pasca migrasi dan bagaimana kelompok tersebut beradaptasi.

Konsepsi diaspora menurut Missbach (2012) tersebut senada dengan konsepsi migrasi menurut Mantra (2003) yang menyatakan bahwa migrasi adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan niatan menetap di daerah tujuan. Sebaliknya mobilitas penduduk non-permanen adalah gerak penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Perindahan dari suatu daerah ke daerah lain merupakan bagian dari bentuk migrasi permanen.

Migrasi permanen etnis Bali ke Papua secara umum dilatarbelakangi oleh tiga faktor, **Pertama**, faktor penugasan pemerintah, yakni mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri ke daerah yang baru karena daerah tersebut memerlukan tenaga mereka. Sebagian etnis Bali yang ada di Kota Jayapura saat ini adalah

mereka yang menjalankan tugas negara sejak Papua bergabung dalam NKRI pada tahun 1962, **Kedua** program transmigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk Pulau Jawa dan Bali yang terlalu padat. Sejak tahun 1950-an, Pemerintah Indonesia mengembangkan program transmigrasi dari Pulau Jawa dan Bali ke Pulau lain, termasuk ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (Papua). Menurut Kementerian Transmigrasi RI, sejak program transmigrasi dicanangkan pada tahun 1950-an, sudah lebih dari 2 juta keluarga atau hampir 8 juta penduduk yang dipindahkan ke luar Jawa dan Bali. Transmigrasi mampu menciptakan 2 ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan, dan 1.336 kawasan program revitalisasi yang telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare. Dalam kurun waktu 2015-2019, kata Eko, transmigrasi menghasilkan pembangunan sarana prasarana, pengembangan ekonomi, sosial, budaya, serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru (Halik, 2019). **Ketiga**, perpindahan penduduk (migrasi) swakarsa (kemampuan sendiri) karena yang bersangkutan ingin merubah nasibnya, ingin hidup sukses di daerah yang baru di luar tempat tinggalnya.

Secara umum penyebaran etnis Hindu Bali ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk yang kini menetap di Kota Jayapura adalah karena ketiga faktor tersebut. Etnis Bali telah mampu *survive*, bahkan sukses di tempat rantauan di luar Pulau Bali, termasuk yang berada di Pulau Sumatera), Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Karena alasan menjalankan tugas pekerjaan, mengembangkan karir, atau alasan untuk mengadu nasib di tempat perantauan, sebagian dari etnis Hindu Bali sengaja pindah dari kampung halamannya Pulau Bali dan sekarang menetap di Kota Jayapura. Sebagaimana yang dinyatakan Missbach (2012) di atas, diaspora etnis Bali pemeluk Hindu di Jayapura ini bukan sekadar pindah tugas atau ingin kehidupannya sukses di tempatnya yang baru, tetapi mereka sekaligus menjalankan misi etnokomunal mereka dalam mengembangkan ajaran agama Hindu di Tanah Papua.

Jejak sejarah menunjukkan bahwa arus migrasi etnis Hindu Bali di Jayapura terjadi secara intensif sejak Provinsi Papua (dulu disebut Irian Jaya) bergabung ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1962. Kala itu, jumlah etnis Hindu Bali masih terbatas, hanya puluhan jiwa (sekitar 10 KK). Pada saat ini, jumlah pemeluk agama Hindu di Kota Jayapura, Papua terus bertambah, termasuk etnis Hindu Bali. Sampai tahun 2018, jumlah umat Hindu *penyungsung* Pura Agung Surya Bhuvana Kota Jayapura adalah 648 KK atau 1940 jiwa (PHDI Kota Jayapura, 2019).

Kecenderungan perkembangan jumlah etnis Bali tersebut sesuai dengan pendapat Lee (1976) yang mengungkapkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor-faktor positif (+), negatif (-), dan faktor netral (0). Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai menguntungkan kalau bertempat tinggal di daerah tersebut. Faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif di daerah yang bersangkutan, sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk. Banyak sedikitnya arus migrasi juga dipengaruhi oleh rintangan antara, seperti biaya pindah yang tinggi, jarak yang jauh, dan transportasi yang terbatas. Faktor yang tidak kalah penting dari keputusan melakukan migrasi adalah faktor individu. Faktor inilah yang menilai positif dan negatif suatu daerah dan/atau menentukan daerah tujuan. Oleh karena itu, Lee menyebutkan proses migrasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: (a) faktor individu, (b) faktor-faktor di daerah asal, (c) faktor-faktor di daerah tujuan, dan (d) rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan (Mantra, 2003).

Ketika berada di Papua, etnis Hindu Bali melakukan adaptasi sekaligus menyemai kerukunan antar warga bangsa di Jayapura yang dilakukan melalui beberapa langkah/strategi sebagai berikut. **Pertama**, etnis Hindu Bali yang hadir di Kota Jayapura, Papua

bisa membawa dan memerankan diri mereka sesuai status dan profesi pekerjaan masing-masing. Walaupun status mereka sebagai pendatang, etnis Hindu Bali bisa menjalankan dan mengaktualisasikan diri sesuai bakat, minat dan kompetensinya. Sebagian mereka berperanan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri – dan menjadi bagian dari warga negara yang membangun Papua sejak integrasi Papua ke pangkuan NKRI pada tahun 1962,

Kedua, etnis Hindu Bali menunjukkan sikap yang menerima, mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya lokal dengan memasang ornament bangunan pura dengan gambar tifa dan burung Cenderawasih, Kehadiran etnis Hindu Bali di Jayapura cukup adaptif. Mereka bisa berbaur secara cukup harmonis dengan penduduk lokal Papua, bahkan etnis Hindu Bali mampu melakukan akulturasi dan asimilasi budaya Hindu Bali dengan budaya setempat seperti yang tercermin dalam penggunaan ornament tifa dan burung Cenderawasih pada bangunan Pura Agung Surya Bhuvana (Rai, 2019). Dalam kaitan ini, etnis Hindu Bali berupaya melaksanakan filosofi *Tri Hita Karana*, yakni tiga hal penentu kebahagiaan hidup manusia, yaitu: (1) membina hubungan yang harmonis dengan *Hyang Widdhi Wasa (parahyangan)*, (2) membina hubungan harmonis antara manusia dengan manusia tanpa membedakan asal usul, ras, suku, agama, kebangsaan dan lain lain (*pawongan*), dan (3) membina hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan atau *palemahan* (Mantra, 1996). Mereka mampu membangun budaya bersama, tanpa merusak tatanan nilai-nilai budaya lokal.

Ornament tifa dan burung Cenderawasih pada bangunan Pura Agung Surya Bhuvana tersebut merupakan bentuk pertemuan budaya dan tradisi serta adanya identitas bersama masyarakat nusantara (Bali-Papua), sehingga hubungan etnis Bali dengan etnis Papua di Jayapura menjadi harmonis. Karena terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat yang berbeda etnis tersebut, telah menciptakan persatuan yang kokoh, sehingga membawa banyak perkembangan untuk Kota Jayapura, diantaranya dalam aspek kehidupan sosial, keagamaan, ekonomi,

dan aspek kehidupan lainnya. Kerjasama antara etnis menjadikan masyarakat saling terintegrasi antara satu sama lain, dan saling merasa tergantung (Firdaus, 2012).

Kehadiran etnis Hindu di Papua amat adaptif, karena menghormati nilai-nilai budaya lokal. Terciptanya hubungan sosial yang baik diantara etnis yang berbeda budaya tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi dapat berlangsung melalui interaksi yang baik dan intens melalui struktur sosial yang ada (Rahmad, 2015).



Gambar 3.1
Prof I Wayan Rai bersama Pemuka Agama Kota Jayapura
(Dokumentasi: I Wayan Rai, 2019)

Ketiga, etnis Hindu Bali terlibat aktif dalam memelihara kerukunan, baik kerukunan antarumat beragama maupun kerukunan antar warga bangsa. Hal ini tercermin melalui peran aktif mereka dalam organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura. Sebagai pengurus FKUB, tentu mereka peduli dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama, dan persatuan antarwarga bangsa di Papua. Tanah Papua yang rawan gejolak konflik memerlukan peran aktif pemuka agama, agar tiap pemuka

agama bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan umat beragama di Papua. Dalam kaitan ini, pengelola Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) seringkali memberikan fasilitasi dan tempat pertemuan para tokoh agama di Jayapura.

Keempat, etnis Hindu Bali yang berada di Kota Jayapura terus mengembangkan kegiatan sosial keagamaan yang inklusif, membuka diri dengan agama lain dalam membina kebersamaan dan kerukunan antar warga bangsa di Kota Jayapura. Hal ini jelas tercermin dalam berfungsinya Pura Agung Surya Bhuvana sebagai objek wisata dan media perekat kerukunan antar warga bangsa (Bab IV)

Kelima, etnis Hindu Bali di Kota Jayapura juga mendukung pengembangan kreativitas seni-budaya yang memperkuat kerukunan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh para tokoh Hindu Bali yang bekerja di Kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua. Mereka terus mengembangkan karya seni-budayanya yang diorientasikan untuk mendukung persatuan dan integrasi bangsa (Bab V).

3.2 SEJARAH PURA AGUNG SURYA BHUVANA

Keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana tidak terlepas dari sejarah tanah Papua. Papua adalah bagian paling timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG). Papua, yang dikenal dengan sebutan Bumi Cenderawasih, terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura, dan provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari. Provinsi Papua adalah provinsi induk sedangkan provinsi Papua Barat adalah provinsi pemekaran sejak tahun 2003.

Nama Papua berasal dari pelaut Portugis, ketika pertama kali mereka melihat pulau ini pada tahun 1511 yang kemudian mereka namakan *ilhas dos Papuas* yang berarti kurang lebih pulau yang dihuni orang berambut halus. Pelaut Belanda kemudian menyebut Papua sebagai New Guinea karena kulit orang Papua yang hitam,

mengingatkan mereka dengan orang Guinea di Afrika, sedangkan New artinya Baru (Wetipo & Wedlama, 2015; 1). Setelah New Guinea, maka pada masa pemerintahan Belanda, Papua dikenal dengan sebutan Dutch Nieuw Guinea. Selanjutnya, ketika wilayah ini menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963, namanya diubah menjadi Irian Barat, lalu diganti lagi menjadi Irian Jaya. Pada masa pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur) nama pulau ini dikembalikan menjadi Papua. Papua (wilayah NKRI dan PNG) adalah pulau terbesar kedua didunia setelah Greenland Kanada, dengan penduduk termasuk rumpun Melanesia yang memiliki ciri-ciri seperti berkulit hitam, berambut keriting dan berombak, memiliki badan yang kekar dan tinggi.

Melalui sentuhan dengan dunia luar, terutama terjadinya perkawinan silang, telah menghasilkan keturunan yang memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dengan penduduk asli. Kenyataan itu tampak jelas pada penduduk yang hidupnya didaerah pesisir atau pantai. Secara garis besarnya, Papua terbagi menjadi tujuh wilayah budaya, yaitu: wilayah budaya Mamta, Seireri, La Pago, Mi Pago, Anim Ha yang terletak di provinsi Papua, sedangkan wilayah budaya Bomberei dan Domberei terletak di provinsi Papua Barat. Penduduk Papua terdiri atas berbagai kelompok etnik, hidup berkelompok dalam unit-unit kecil, memiliki adat-istiadat, budaya, dan bahasa tersendiri. Letak geografis, kekayaan alam, biodiversity, serta keragaman seni budayanya menyebabkan Papua memiliki identitas serta keunikan tersendiri sebagai objek pariwisata di Indonesia.

Keberadaan Pura Pura Agung Surya Bhuvana dan perkembangan umat Hindu di Kota Jayapura tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan ethnisi Bali di Kota Jayapura. Secara umum, Ethnisi Bali menjadi pioner pendirian Pura Agung Surya Bhuvana. Mereka memiliki andil yang cukup menentukan dalam memajukan kehidupan umat Hindu di Kota Jayapura (lihat Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Ethnis Bali sebagai Pioner Pendirian Pura Agung Surya Bhuvana dan Kemajuan Agama Hindu di Jayapura

Tahun	Kiprah Ethnis Bali
1962	Umat Hindu mendirikan Pura Agung Surya Bhuvana di Jayapura
1962 – 1979	Umat Hindu di Papua yang kebanyakan PNS, TNI/Polri itu sebelum mereka memiliki puramelaksanakan aktivitas sosial keagamaan di rumah I Made Matra (pegawai Pemprov di Papua)
1979	Para tokoh Hindu di Kota Jayapura menyepakati untuk membangun Pura sebagai tempat melaksanakan kegiatan sosial keagamaan
1980-an	Dibentuk Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Irian Jaya
1982	Ethnis Hindu Bali memprakarsai pendirian PASB di Bukit Skyline, Jayapura.
1990	Peresmian pendirian PASB
2011	PASB dikukuhkan menjadi Pura Padma Bhuvana
2012-2014	Renovasi PASB menjadi bangunan pura yang megah dan artistik seperti sekarang
2014	Peresmian Renovasi lanjutan PASB

Saat ini, umat Hindu yang ada di Kota Jayapura memang berasal dari berbagai etnis di Nusantara ini, termasuk etnis Bali, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, serta etnis lokal Papua. Akan tetapi bisa dinyatakan bahwa etnis Bali lah sebagai pioneer yang memprakarsai pendirian Pura Agung Surya Bhuvana (PASB), pura termegah di Kota Jayapura ini. Etnis Bali juga yang memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan masyarakat hindu di Papua. Berdasarkan informasi dari Ketua Parisadha Hindu Dharma Provinsi Papua dan Kota Jayapura, Komang Alit Wardhana dan Ida Bagus Suta Kertya, saat ini tercatat ada sekitar 6300 orang Bali yang ada di Papua. Mereka itu bekerja sebagai petani, pegawai negeri, TNI-Polri, dan profesi lain. Jumlah terbanyak terdapat di kabupaten Keerom, provinsi Papua. Mereka itu adalah orang-orang Bali yang bertransmigrasi ke Papua, kebanyakan berasal dari daerah Karangasem.

Sampai saat ini, di Papua terdapat lebih dari 36 buah pura, tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satu pura terbesar dan termegah di Papua adalah Pura Agung Surya Bhuvana, terletak di daerah Skyline, Distrik Abepura, Jayapura.

Keberadaan etnis Bali di Jayapura berawal dari integrasinya Irian barat menjadi bagian wilayah NKRI tahun 1962. Pendirian Provinsi Irian Barat 1962 membutuhkan tenaga/ pegawai dari berbagai daerah, termasuk pegawai beragama Hindu dari Bali. Semula umat Hindu di Jayapura umumnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI yang bertugas berkaitan dengan pembebasan Irian Barat yang berstatus bujangan, serta sebagian kecil yang sudah berkeluarga, termasuk Bapak Drs. I Made Marta sebagai Pegawai Gubernur Provinsi Irian Jaya. Pada Tahun 1962, umat Hindu di kota Jayapura berjumlah kurang lebih 10 KK dengan tempat tinggal yang terpencar. Belum ada konsentrasi umat Hindu yang terkumpul dalam satu tempat. Untuk kegiatan persembahyangan, pada saat itu dilakukan sementara di rumah kediam Pak Made Marta.

Dalam pereode tahun 1964 – 1979 umat Hindu di Kota Jayapura sudah mulai bertambah dengan tempat kerja yang bervariasi baik di Pemda, TNI/POLRI, Bank dan instansi lainnya. Dengan mempertimbangkan jumlah umat Hindu yang semakin besar, maka sejak tahun 1979 dipandang perlu untuk membuat tempat sembahyang (Pura) sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan pendidikan. Pada saat itu, para tokoh Hindu mengadakan rapat untuk memikirkan tentang kebutuhan pura sebagai persembahyangan yang representatif baik dari segi sekala maupun dari segi niskala.

Semula disepakati bahwa pura akan didirikan di lokasi bukit dekat pantai Base G, namun tidak mendapat kesepakatan dengan adat. Setelah itu di cari bukit di sekitar Dok II juga tidak mendapat kesepakatan dan akhirnya dicarilah suatu lokasi yang berada di bukit skyline yang berhadapan langsung dengan teluk Yotepa yang berhubungan langsung dengan samudra Pasifik. Tanah bukit skyline pada saat itu merupakan tanah wilayah Kantor pertanian

dan sementara di jadikan kebun. Karena kemudahan yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanian, yakni Bapak Bas Yowe sehingga lebih mudah berurusan dengan adat, maka terjadilah kesepakatan untuk mengambil bukit skyline itu menjadi lokasi bangunan Pura Agung Surya Bhuvana.

Di samping pengurusan secara sekala kepada yang terkait, para tokoh juga mengadakan meditasi untuk mendapatkan restu niskala di ketiga lokasi yang dicari itu, ternyata ketika mereka bermeditasi di bukit skyline ini ada cahaya yang sangat besar turun di tempat ini, yang disimpulkan pada saat itu tempat ini sangat tepat untuk tempat suci. Setelah itu, mulailah diadakan kegiatan untuk meratakan tanah kebetulan saat itu dengan adanya Bapak Ida Bagus Jayakesuma sebagai Wakil Kepala PU yang memberikan bantuan untuk meratakan dengan menggunakan doser (alat Berat). Sehingga proses pendirian turus lumbung saat itu bias lebih cepat dan langsung digunakan untuk persembahyangan dengan kondisi seadanya.



Gambar 3.2

Komplek Pura Agung Surya Bhuvana di Bukit Skyline, Jayapura

(Sumber: <https://indonesia.transresortbali.com>)

Seiring dengan berjalannya waktu, umat Hindu di Kota Jayapura terus berusaha untuk membangun pura yang representatif untuk dijadikan tempat bersembahyang, tempat kegiatan sosial dan tempat pendidikan sehingga tahap demi tahap diadakan pembangunan Padmasana dan kelengkapan yang lain. Dari tahun 1982 tahap demi tahap Pura Agung Surya Bhuvana di skyline tersebut dibangun dan akhirnya dapat diresmikan oleh Gubernur Irian Jaya Bapak Barnabas Suebu SH pada tanggal, 4 Oktober 1990. Bangunan Pura Agung Surya Bhuvana, selanjutnya juga dilengkapi dengan balai pertemuan, yakni Wantilan Praja Loka diresmikan oleh Bapak J. P. Solosa, MSi. Gubernur Provinsi Papua Pada tanggal 20 April 2002. Sejalan dengan perkembangan pemerintahan Kota Jayapura, pembangunan pisik pura terus berlanjut. Hal ini dimungkinkan berkat dukungan berbagai pihak, termasuk: (a) dukungan bantuan moril maupun materiil umat Hindu setempat; (b) adanya kemudahan yang diperoleh dari tokoh masyarakat adat setempat atau status tanah pura yang harus menjadi hak pakai pura dengan sertifikat; (c) bantuan dari pejabat-pejabat yang pernah bertugas di Irian Jaya (Papua), antara lain: Bapak Maijen I Ketut Wirdana (Pangdam Tri Kora), Bapak Irjen Pol. Made Mangku Pastika (Kapolda Papua) dan lain-lain; dan (d) bantuan dari Pemda Provinsi Papua dan Kota Jayapura.

Secara kelembagaan dinamika kehidupan umat Hindu di Kota Jayapura juga didukung oleh organisasi agama Hindu, yakni Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI). Sejak tahun 1980-an dibentuk Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Irian Jaya yang diketuai oleh Bapak Drs. I Made Marta, mantan Sekda Provinsi Irian Jaya. Pada bulan Oktober tahun 2011 Maha sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia yang digelar di Denpasar. Melalui Surat keputusan Mahasabha X nomor :VIII/TAP/MAHASABHA X/2011 ditetapkan bahwa Pura Agung Surya Bhuvana Jayapura Sebagai Padma Bhuvana Nusantara yang paling timur di Inonesia. Selama 23 tahun (sejak diremikan pertama kali oleh Gubernu Irian Jaya tahun 1990 sampai dengan tahun 2013), kondisi bangunan Pura Agung Surya Bhuvana sudah mulai

mengalami kerusakan, dan perlu direnovasi. Untuk itu, pada tahun 2012 disepakati untuk mengadakan pemugaran Pura baik di Utama Mandala Maupun Madya mandala dan tembok Penyeker (pagar) keliling.

Berkat kemurahan Hyang Widi Wasa, maka pada tanggal 9 Mei 2013 rencana itu dapat diwujudkan dengan peletakan batu pertama oleh Pinandita IGM Snartha. Dana pemugaran pura bersumber dari Gubernur Papua, Bupati Waropen, Walikota Jayapura, Bupati Keerom, Bupati Jayapura, Bupati Timika, Bupati Supriori, sumbangan (punia) dari luar Papua dan umat hindu yang ada di Kota Jayapura. Pembangunan Pura Agung Surya Bhuvana dapat dirampunkan pada bulan September 2014 dan upacara peresmian dilaksanankan pada Sasih Kapat saka warsa 1936, tanggal 8 Oktober 2014 dengan ketua Panitia Pinandita IGM Sunartha.

Peresmian Pura Agung Surya Bhuvana oleh Gubernur Papua yang didampingi Sekda Provinsi Papua tersebut juga dihadiri oleh para pemuka Hindu dari Bali, meliputi: Yajamana Karya Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda dari Griya Kutuh Kuta Bali, sarati Ida Pandita Sri Istri Acarya Nanda dari Griya serongga, pemuput karya Ida Pedanda gede Ketut sebalu tiang Arimbawa, Ida Pedanda Gede Dyelantik Sogata, Ida Pandita Mpu Jaya 40Wijayananda, Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda griya Kutuh Kuta Bali dan Ida Pandita Mpu Satwikananda Griya Taman Bali.

3.3 PROFIL PURA AGUNG SURYA BHUVANA

Pura yang diberi nama Pura Agung Surya Bhuana (PASB) ini terletak di Kelurahan Vim, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Jalan Abepura No 38 Skyline, Jayapura. PASB dibangun di atas tanah seluas 7. 790 M². PASB ini diresmikan oleh Gubernur Irian Jaya, Barnabas Suebu SH pada tanggal 4 Oktober 1990. Selanjutnya Balai Wantilan Praja Mandala diresmikan oleh bapak J. P. Solosa, Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 20 April 2002.



Gambar 3.3
Pura Agung Surya Bhuvana
(Dokumentasi : PHDI Jayapura, 2019)

Dalam kehidupan masyarakat Bali, rumah (umah), apalagi tempat ibadah merupakan duplikat atau miniatur alam raya merupakan pelindung dan wadah kehidupan manusia, adalah merupakan konsep personifikasi, yang bukan saja menyamakan arsitektur dengan makrokosmos tetapi juga menyamakannya dengan mikrokosmos.

Keberadaan tempat pemujaan, tempat kegiatan manusia, dan pekarangan merupakan pengejawantahan dari upaya menciptakan keseimbangan antara alam dewa, alam manusia, dan alam butha atau lingkungan fisik (Pemda Bali, 1988:116; 1994:109). Susunan struktur ruang atas tiga kawasan (*trimandala*), sebagai pengejawantahan konsep triangga tubuh fisik manusia atau triloka alam semesta. Lingkungan fisik dalam bentuk teritorial atau pekarangan pada dasarnya di bagi tiga kawasan yang disebut dengan istilah *trimandala* sedangkan sosok fisik bangunan juga pada dasarnya dibagi tiga disebut *triangga* (Kaler, 1982: 86-89).

Sesuai filosofi *trimandala*, pembangunan PASB ini didasarkan konsep Tri Mandala yang terdiri atas: Utama Mandala (Jeroan), Madya Mandala (Jaba Tengah), dan Nista Mandala (Jaba Sisi). Di

Utama Mandala terdapat bangunan Padmasana, Bale Pelik, Taman Sari, Ngerurah, dan Piyasan.



Gambar 3.4
Padmasana Pura Agung Surya Bhuvana
(Dokumentasi : I Wayan Rai, S., 2019)

Gambar 3.4 menunjukkan Padmasana Pura Agung Surya Bhuvana nampak begitu megah. Padmasana atau (Sanskerta: padmāsana) merupakan sebuah tempat untuk bersembahyang dan menaruh sajian bagi umat Hindu, terutama umat Hindu di Indonesia. Kata padmasana berasal dari bahasa Sanskerta:

“padma” artinya bunga teratai dan “asana” artinya sikap duduk (Zoetmulder, 1995).

Padmasana berasal dari Bahasa Kawi: Padma” artinya bunga teratai, atau bathin, atau pusat, “Sana” artinya sikap duduk, atau tuntunan, atau nasehat, atau perintah (Wojowasito, 1977). Padmasana berarti tempat duduk dari teratai merah sebagai stana suci Tuhan Yang Maha Esa (Titib, 2003). Berdasarkan dua pendapat ini, bahwa bunga teratai adalah simbol dari tempat duduk dari dewa-dewa dan Hyang Widhi sehingga Padmasana tidak lain dari gambaran alam semesta (makrokosmos) yang merupakan stana dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dalam Lontar “Padma Bhuana”, Mpu Kuturan menyatakan bahwa Bali sebagai Padma Bhuwana. Bunga teratai (padma) dijadikan simbol alam semesta stana Hyang Widhi yang sebenarnya. Dalam Lontar “Dasa Nama Bunga” disebut, bunga teratai adalah rajanya bunga (Raja Kesuma) karena hidup di tiga alam — akarnya menancap di lumpur, batangnya di air, sedangkan daun dan bunganya di atas air (udara). Karenanya, bunga ini adalah simbol Tri Loka atau Tri Bhuwana Stana Hyang Widhi Wasa dan bunga daunnya yang berlapis-lapis sebagai perlambang dari sembilan arah penjuru mata angin alam semesta (Wiana, 2004).

Di Madya Mandala terdapat Pengapit Lawang, Bale Gong, Perantenan suci, dan Bale Kulkul. Utama Mandala dan Madya Mandala dibatasi oleh tembok penyengker keliling dengan pintu masuk Candi Bentar dan Kori Agung. Terdapat dua pelinggih di luar tembok penyengker (di belakang Utama Mandala) yaitu pelinggih Padma sari Ratu Nyoman Sakti dan penyawangan Sanghyang Baruna. Selanjutnya di bagian paling luar (Nista Mandala/Jaba sisi), terdapat beberapa bangunan seperti Balai wantilan (Praja Mandala) Gedung untuk kantor PHDI provinsi Papua, PHDI Kota Jayapura, Peradah, gedung perpustakaan, gedung pendidikan, rumah penunggu pura, dan halaman parkir. Secara umum, profil Pura Agung Surya Bhuana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Profil Pura Agung Surya Bhuvana Jayapura

Tahun Pendirian	1990
Alamat Pura	Distrik Abepura, Jalan Abepura No 38 Skyline, Jayapura
<i>Pengempon</i> (Penanggungjawab)	Selaku Penanggungjawab Pura Agung Surya Bhuvana Jayapura adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Jayapura,
Penyungsong (Pendukung)	Selaku penyungsong Pura Agung Surya Bhuvana di Kota Jayapura adalah masyarakat Hindu setempat yang terbagi atas tiga tempek yaitu tempek Base G, tempek Jayapura dan tempek Abepura serta yang non tempek dengan jumlah jiwa 648 KK atau 1940 jiwa.
Aset/kekayaan	Aset yang dimiliki Pura Agung Surya Bhuvana adalah berupa tanah seluas 7.790 M2 dan bangunan baik berupa bangunan tempat persembahyangan dan bangunan penunjang kegiatan umat di kota Jayapura.
Piodalan	Purnama Kapat sekitar Oktober
Aktifiats sosial keagamaan	Upacara kagamaan umat Hindu (galungan, kuningan, beratha penyepian) dll, kegiatan pesantian, kegiatan pasraman, pertemuan koordinasi pengurus pura, pertemuan sosial lainnya

Sumber: PHDI Kota Jayapura, 2018.

Selaku *pengempon* atau penanggungjawabnya adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Jayapura. Pura Agung Surya Bhuvana Kota Jayapura memiliki penyungsong yang terbagi menjadi tiga tempek yaitu tempek Base G, tempek Jayapura dan tempek Abepura serta yang non tempek dengan jumlah seluruhnya adalah 648 KK atau 1940 jiwa (PHDI Kota Jayapura, 2019).

Pertama, Tempek Base G terdiri dari warga Hindu yang tinggal disekitar Base G. Tempek ini beranggotakan sebanyak 26 Kepala Keluarga (KK). Susunan Pengurus Tempek Base G:

Ketua : I Wayan Sukarya

Wakil Ketua : I Nyoman Tri Suarjana

Sekretaris : I Ketut Alit Sugiarta

Bendahara 1 : Desi Suteja Bendahara 2 : Wayan Sriyani.

Agenda utama dari anggota tempek G adalah memupuk rasa kebersamaan sesama anggota baik dalam suka maupun duka. Setiap bulan sekali, anggota tempek ini mengadakan pertemuan

secara rutin dengan tempat yang berpindah-pindah dari satu rumah kerumah yang lain. Dengan kegiatan yang berpindah-pindah seperti ini maka setiap anggota akan mengenal lebih dekat tempat tinggal serta kehidupan keluarga masing-masing. Tempat tinggal mereka ada yang sudah merupakan rumah milik sendiri, rumah dinas, maupun rumah kontrakan.

Kegiatan rutin bulanan disebut dengan istilah arisan, diadakan pada setiap hari libur, Sabtu atau Minggu. Kegiatan arisan diawali dengan persembahyangan bersama dan berjapa setelah itu dilanjutkan dengan Dharma Wecana, serta penyampaian informasi penting lainnya seperti adanya kegiatan keagamaan di PASB, perayaan terkait dengan Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan dan Kuningan, Upacara di Pura yang berlokasi di luar Jayapura misalnya Pura di Arso, kabupaten Keerom, Pura di Nimbokrang, dll. Untuk kegiatan arisan, setiap anggota tempek (KK) dikenakan iuran se besar Rp. 150.000. Untuk konsumsi arisan dialokasikan dana sebesar Rp. 350.000. yang diambilkan dari iuran anggota.

Apabila ada anggota tempek yang sakit sampai diopname atau melahirkan maka akan diserahkan uang suka/duka sebesar Rp. 300. 000. Kalau ada yang meninggal akan diberikan uang suka duka dari tempek sebesar Rp. 500.000, serta tambahan sukarela dari setiap anggota. Pihak yang berhak menerima uang suka duka dari Tempek adalah anggota KK, orang tua dari keluarga suami dan istri, serta anak-anak dari Kepala Keluarga. Adapun sisa dana arisan akan dimasukkan sebagai kas Tempek. Apabila kas Tempek mencukupi jumlahnya maka pada setiap hari raya Galungan diadakan kegiatan Nampah Celeng secara bersama-sama. Apabila kas tidak mencukupi maka acara nampah celeng tidak diadakan sesuai kesepakatan bersama.

Kedua, Tempek Jayapura, adalah anggota semeton Hindu yang bertempat tinggal di kota Jayapura. Jumlah anggota Tempek Jayapura ini adalah 36 KK. Pengurus Tempek Jayapura terdiri atas:

Ketua : Ketut Sukrada

Wakil Ketua : I Nyoman Polos

Sekretaris : I Gede Sudama

Bendahara : Ibu Siti Munawaroh

Kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Tempek Jayapura adalah setiap bulan mengadakan arisan yang berpindah-pindah dari satu rumah kerumah setiap anggota. Pada setiap arisan diawali dengan persembahyangan bersama dan berjapa, dilanjutkan Dharmawacana serta penyampaian informasi penting lainnya. Untuk arisan setiap KK membayar iuran sebesar Rp. 130.000.-, dengan perincian penggunaan Rp. 100.000. Untuk arisan dan masing-masing Rp. 10. 000, untuk Kas Tempek, Kas Duka, dan Kas Nampah. Setiap Hari Raya Galungan, Tempek Jayapura ini selalu nampah babi satu ekor.

Ketiga, Tempek Abepura, adalah anggota semeton Hindu yang bertempat tinggal di kota Jayapura yang berjumlah 45 KK. Pengurus Tempek Jayapura terdiri atas:

Ketua : Ida Bagus Ariana

Wakil Ketua : Nengah Redes Sekretaris : Dewa Putu Raka

Bendahara : Wayan Putra

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Tempek Abepura adalah arisan bulanan, kerja bakti setiap satu bulan sekali di Pura, kegiatan sosial lainnya, menghadiri undangan kegiatan keagamaan. Setiap arisan masing-masing anggota membayar iuran Rp. 50.000,- dengan perincian untuk arisan Rp. 20.000,- dana babi Rp. 15.000,-, dana konsumsi Rp. 5000, dana sosial Rp. 7000,- dana punia Rp. 3.000. Selain itu masih ada iuran Koperasi masing-masing Rp. 5000,-. Setiap anggota bisa meminjam sesuai kebutuhan dengan bunga 2% menurun.

Pura Agung Surya Bhuvana Kota Jayapura memiliki aset (kekayaan) berupa tanah dan bangunan baik berupa bangunan tempat persembahyangan dan bangunan penunjang kegiatan umat, meliputi: tanah Pura seluas 7.790 M2 berdasarkan surat ukur tanggal 19 Nopember 1979 nomor 195/1979, bersertifi kat Nomor 14 tanggal 29 September 1989 dengan setatus Hak Pakai.



Gambar 3.5
Bangunan Wantilan Pura Agung Surya Bhuvana
(Dokumentasi : I Wayan Rai, S., 2019)

3.4 KEGIATAN SOSIAL-KEAGAMAAN

Dengan adanya Pura Agung Surya Bhuvana di Kota Jayapura, kegiatan umat Hindu setempat menjadi semakin dinamis. Bersama PHDI Kota Jayapura, pengempon Pura Agung Surya Bhuvana berupaya mengembangkan kegiatan sosial keagamaan yang bertujuan untuk: (1) Mengembangkan dan memelihara kebudayaan baik dengan setiap badan, lembaga, organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan; (2) Mengembangkan tugas-tugas dimaksud PHDI bersama organisasi Hindu lainnya di Kota Jayapura seperti Wanita Hindu Darma Indonesia (WHDI) Kota Jayapura dan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Kota Jayapura. Karena statusnya sebagai pura untuk umum, Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dewasa ini telah menjadi wahana dalam upaya pemersatu dalam wawasan nusantara.

Pura Agung Surya Bhuvana sebagai Pura Padma Bhuvana telah memberikan inspirasi baru, nuansa baru, serta kekuatan baru bagi umat Hindu di nusantara. Pura adalah sarana atau tempat suci untuk memuja Ida Sanghyang Widi Wasa, para dewa dan roh leluhur melalui serangkaian upacara yang tidak pernah putus. Dengan mempertimbangkan fungsi pura yang demikian, pola

dan sistem pengelolaan serta desain dan rencana pembangunan pura pun mengikuti ketentuan yang diisyaratkan oleh Lontar Kosa Kosali, antara lain pembangunan pura mengikuti proses ngeruak, nyukat pelinggih, nangum pelinggih, memakuh, melaspas dengan sebelumnya memilih lokasi pura harus berorientasi ke utara atau ke tempat yang dianggap suci dan sakral (Indradewi, 2016).



Gambar 3.6
Aktivitas Keagamaan *Penyungsung* Pura Agung Surya Bhuvana
(Dokumentasi: PHDI Kota Jayapura, 2019)

PASB merupakan sebuah pura teritorial yang berada di Kota Jayapura, Papua. Ciri khas suatu pura teretotial (Pura Desa) adalah pura yang memiliki tiga buah pura disebut Kahyangan Tiga yaitu: Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem yang merupakan tempat pemujaan bersama. Dengan perkataan lain, bahwa Kahyangan Tiga itulah merupakan unsur mengikat kesatuan masyarakat bersangkutan. Pura Agung Surya Bhuvana termasuk Padma Bhuvana (Awigawig PASB, Pasal 7, ayat 1). Padma adalah bunga terai, sedangkan Bhuvana adalah alam semesta, termasuk Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta. Padma bhuvana menjadi penyangga (sukertining) nusantara dari segala arah (dilambangkan oleh bunga teratai yang mempunyai 11 arah yaitu: Timur, Tenggara, Selatan, Barat daya, Barat, Barat laut, Utara, dan Timur laut, sedangkan yang di tengah adalah bawah tengah dan atas).

Selanjutnya, konsep Padma Bhuvana meliputi 8 mata angin dan ditambah tiga lagi bawah tengah dan tas (Urdu, Madya, Ardah)

sehingga menjadilah konsep 11, yang juga dilambangkan *weakness* (kelemahan) dan sekaligus kekuatan manusia ada pada 5 bagian penggerak Indria karya (Panca karma) dan 5 bagian penggerak pikiran (panca budi) indria, dan satu motorik sebagai 48 *leader*-nya adalah Cita yang totalnya menjadi 11 Weaknesses, namun sekaligus juga sumber *super power* (kekuatan) yang luar biasa (Anonim, 2015).

Mata angin = arah kekuatan berasal dari 9 penjuru mata angin, meliputi: (1) Purwa = Timur Dewanya adalah Iswara, dengan Bajra senjatanya sweta/ putih warnanya dan Sang aksara sucinya, (2) Gneya = Tenggara Dewanya adalah Mahesora, dengan Dupa senjatanya, Dadu warnanya, dan Nang aksara sucinya, (3) Daksina = Selatan Dewanya adalah Brahma, dengan Gada senjatanya, Rakta merah warnanya dan BANG aksara sucinya, (4) Neriti = Barat daya Dewanya adalah Rudra, Moksala senjatanya, Jingga warnanya dan MANG aksara sucinya, (5) Pascima = Barat Dewanya adalah Mahadewa, dengan Naga pasa senjatanya, Kuning / Jnar warnanya dan TANG aksara sucinya, (6) Wayabia = Barat laut Dewanya Sangkara, dan wilis / hijau warnanya, Angkus senjata ya, dan SING aksara sucinya, (7) Utara = Utara Dewanya Wisnu, dengan krsna / hitam, cakra senjatanya dan ANG aksara sucinya, (8) Ersania = Timur laut Dewanya adalah Cambu, dengan senjatanya Trisula, dengan warna biru laut, aksara sucinya WANG, (9) Madya = Ditengah Urdah Madya Ardah, Dewanya Ciwa Sadasiwa, dan Pramasiwa, mancawarna wananya, padma senjatanya, dan ING dan HYANG aksara sucinya (Anonim, 2014).

Bangunan Pura yang tergolong Padma Bhuana terdapat di Pulau Bali maupun di luar Bali. Di Pulau Bali yang termasuk pura padma bhuana adalah: (1) Timur Iswara Puranya Lempuyang, (2) Tenggara Maheswara Pura Goa Lawah, (3) Selatan Brahma Puranya Andakasa, (4) Barat Daya Rudra Puranya Rambut siwi, (5) Barat Mahadewa Puranya Luhur Batu karu, (6) Barat laut Sangkara Puranya Luhur watu klotok, (7) Utara Wisnu Puranya Luhur puncak manggu, (8) Timur laut Sambu Puranya Besakih, dan (9) Tengah Siva Besakih – Siva, Sada Siva, Paramasiva, Besakih.

Selanjutnya, Pura Bhuvana Nusantara (di luar Bali) menurut pihak Sabha Walaka meliputi Sembilan pura di Indonesia, yaitu: (1) Wisnu arah utara di Kalimantan Timur, (2) Sambu arah Timur laut Pura Tarakan di Menado, (3) Iswara arah Timur di Jayapura, (4) Mahesora arah Tenggara di Kupang, (5) Brahma arah Selatan di Balim (6) Rudra arah Barat Daya di Gunung Salak, (7) Mahadewa arah Barat di Padang, (8) Sangkara arah Barat Laut di Batam, dan (9) Siva arah Tengah di Kutai.

Sebagai sebuah pura yang terbesar di Papua saat ini, Pura Agung Surya Bhuvana telah ditetapkan oleh Parisadha Hindu Dharma Pusat sebagai Padma Bhuvana Nusantara bagian timur. Menurut Pasal 4, Awig-awig Pura Agung Surya Bhuvana (PASB), ada beberapa maksud dan tujuan pendirian pura ini, yang meliputi: (1) Menegakan agama Hindu dan norma agama dan norma masyarakat yang sesuai dengan perkembangan jaman dan aturan sastra; (2) Meningkatkan Sradha, puja bhakti ke hadapan Hyang Widhi yang berstana di Pura Agung Surya Bhuvana Jayapura; (3) Meningkatkan pelaksanaan dharma agama dan dharma negara; dan (4) Meningkatkan hubungan persatuan dan persaudaraan umat Hindu yang ada di Kota Jayapura.

Sesuai pasal 4 Awig-awig Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) tersebut, Pura kebanggaan milik umat Hindu di Kota Jayapura ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ritual upacara umat hindu, tetapi juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial keagamaan lainnya. Upacara kagamaan umat Hindu yang diselenggarakan di Pura antara lain adalah upacara dalam rangka menyambut hari raya galungan dan kuningan setiap 6 bulan, upacara yang berkaitan dengan beratha penyepian, dan lain-lain. Sedangkan, kegiatan social-keagamaan yang berlangsung di lingkungan PASB antara lain adalah pesantian, kegiatan pasraman, pertemuan koordinasi pengurus pura, serta pertemuan-pertemuan sosial lainnya.

Kegitan sosial keagamaan di lingkungan PASB, yaitu bakti sosial yang biasanya dilaksanakan menjelang perayaan hari raya nyepi seperti donor darah, kunjungan kasih ke masyarakat jompo di Nimbokrang dan Arso Keerom. Setiap hari sabtu dan minggu

melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan kepada anak-anak dan generasi muda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kegiatan TNI/Polri menyelenggarakan sosialisasi Kamtibmas, kegiatan olahraga, senam ibu-ibu Hindu, Yoga Massal, serta WHDI misalnya umat non hindu yang ingin belajar cara sembahyang umat hindu. Selain itu, juga ada kegiatan yang sifatnya mengolah keterampilan tertentu sesuai minat dan bakat anggota, seperti membuat kerajinan berupa piring lidi kerja sama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW).



Gambar 3.7
Kegiatan Pasraman di Wantilan Pura Agung Surya Bhuwana
(Dokumentasi : I Wayan Rai, S , 2019)

Program pendidikan agama Hindu non formal yang sudah rutin dilakukan adalah kegiatan pasraman. Istilah pasraman berasal dari kata “asrama” (sering ditulis dan dibaca ashram) yang artinya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan. Pendidikan *pasraman* menekankan pada disiplin diri, mengembangkan akhlak mulia dan sifat-sifat yang rajin, suka bekerja keras, pengekangan hawa nafsu dan gemar untuk meno-

long orang lain. Proses pembelajaran dalam pasraman merupakan suatu system yang utuh. Dalam proses ini ada beberapa komponen yang saling terkait dalam rangka mencapai tujuan. Komponen-komponen tersebut adalah siswa, guru, materi/bahan ajar, strategi/model pembelajaran. strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pola umum aktivitas guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan kegiatan belajar-mengajar.

Dari pola umum kegiatan itu dapat dilihat macam dan urutan kegiatan yang ditampilkan oleh guru dan siswa. Dalam hal ini ada strategi yang lebih menekankan pada aktivitas guru, namun ada juga yang menekankan kegiatan pada siswa. Orientasi dan pendekatan ke depan haruslah ditekankan pada aktivitas siswa (Syaiful, 2010: 37- 41). Secara regular, kegiatan pasraman dilakukan saat hari libur sekolah. Tujuan pasraman adalah untuk membentuk manusia Hindu yang berspiritual, maka keberadaan pasraman sangat penting. Generasi muda Hindu tersebut dibekali dengan kegiatan seperti olahraga, praktek maupun outbound begitupula materi-materi agama. Diharapkan, melalui kegiatan pasraman yang intensif, generasi muda Hindu Kota Jayapura tidak hanya paham tentang ajaran agama, tetapi juga secara ruhaniah mampu mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka diharapkan mampu menangkal segala bentuk perilaku destruktif, termasuk pergaulan bebas, menjadi pecandu narkoba, terjerumus melakukan seks bebas dan sebagainya.

Masyarakat Hindu hadir di tanah Papua dengan menjunjung tinggi tradisi dan menghormati adat-istiadat setempat. Sesuai teori fungsional Talcott Parson (Ritzer, 2004), umat Hindu melakukan proses adaptasi dengan baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat Papua. Sikap adaptif ini antara lain diwujudkan dalam bentuk pembangunan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) yang artistik. Pura ini telah menghiasi wajah kota Jayapura, Papua, bahkan saat ini menjadi bagian dari icon wisata budaya Kota Jayapura. Kegiatan pasraman Sengaja digelar karena sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, yakni meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti,

memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan (UU No. 20/2003).

Tujuan pendidikan nasional tersebut selaras dengan tujuan agama Hindu, yaitu menumbuh kembangkan dan meningkatkan *Sradha* (keyakinan) dan bakti siswa terhadap *Ida Sanghyang Widhi Wasa* melalui pelatihan. Kegiatan pasraman sengaja diadakan untuk mengisi waktu libur bagi anak-anak Hindu tersebut sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat positif. Generasi muda Hindu setempat diajari dengan ajaran-ajaran iman untuk mengkokohkan ketahanan iman anak dalam menangkal pengaruh-pengaruh luar.

Kegiatan *pasraman* yang diselenggarakan oleh pengempon Pura Agung Surya Bhuvana sangat positif bagi generasi muda Hindu. Melalui pasraman, generasi muda Hindu dibekali pengetahuan agama, serta materi-materi pengetahuan tambahan seperti olahraga, praktek maupun *outbound*, serta materi keterampilan (*skill*) sesuai minat dan bakat pesertanya. Diharapkan, generasi muda Hindu mampu menghadapi tantangan kehidupannya di masa depan, mampu menangkal segala bentuk perilaku destruktif, termasuk dapat menghindari pengaruh buruk narkoba dan sebagainya.

4

PURA AGUNG SURYA BHUVANA SEBAGAI OBYEK WISATA DAN MEDIA PEREKAT KERUKUNAN

Keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Hindu di Kota Jayapura, tetapi PASB juga memilikifungsi lainnya, yakni sebagai objek wisata dan sebagai media perekat kerukunan antar umat beragama di Kota Jayapura.

4.1 PURA AGUNG SURYA BHUVANA: OBYEK WISATA

Masyarakat Hindu hadir di tanah Papua dengan menjunjung tinggi tradisi dan menghormati adat-istiadat setempat. Sesuai teori fungsional Talcott Parson, umat hindu melakukan proses adaptasi dengan baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat Papua. Sikap adaptif umat hindu asal Bali antara lain diwujudkan dalam bentuk pembangunan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) yang artistik. Pura ini telah menghiasi wajah kotaJayapura, Papua, bahkan saat ini menjadi bagian dari icon wisata budaya Kota Jayapura. Dewasa ini, Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) menjadi objek pariwisata budaya di Kota Jayapura.

Pariwisata budaya mencakup semua jenis pariwisata yang menyangkut kebudayaan, baik dalam pengertian ideofact, sociofact, dan artefak, sehingga pariwisata pada obyek-obyek budaya atau bangunan bersejarah merupakan bagian dari wisata budaya. Pusaka budaya yang berbentuk peninggalan-peninggalan arkeolog dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan pariwisata. Komponen budaya dapat dijadikan produk untuk dikonsumsi

oleh para wisatawan. Komponen budaya tersebut meliputi: (1) situs arkeolog dan museum, (2) arsitektur, (3) seni (art), patung, kerajinan, festival budaya, (4) musik dan tari, (5) drama (teater, film), (6) bahasa dan sastra, (7) upacara agama, dan (8) budaya tradisional (Ardika, 2004: 23). Beberapa unsur pariwisata budaya ini melekat pada bangunan PASB. Pura ini merupakan sebuah karya arsitektur yang artistik, digunakan untuk aktivitas upacara adat dan agama Hindu, serta kegiatan sosial-budaya lainnya.



Gambar 4.1
Pemandangan alam Teluk Yotepe dari bukit skyline

Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) merupakan bangunan pura yang megah dan artistik. Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) yang diresmikan pada tahun 1990 ini berada di bukit Skyline – yang berhadapan langsung dengan teluk Yotepe di Kota Jayapura Pura (Lihat Gambar 4.1). Pura terbesar di Kota Jayapura ini menjadi objek wisata budaya yang menarik. Hal ini diakui oleh berbagai kalangan, termasuk oleh wisatawan yang berikunjung ke pura di tengah Kota Jayapura ini seperti pernyataan dua orang informan berikut ini.

“Bangunan dan ukiran PASB sangat bagus, indah, dan dari pelataran pura ini dapat dinikmati keindahan pemandangan teluk

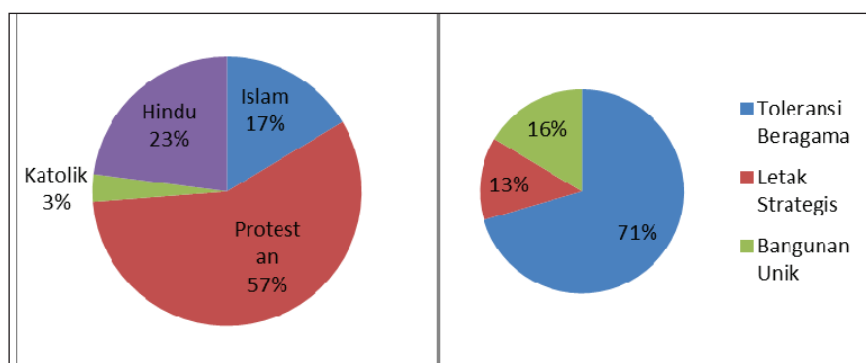
Youtefa" (Vera Lisurante, 42 tahun, wawancara, 15 Agustus 2019). "Umat Hindu yang mengelola pura ini sangat ramah dan santun sehingga kami sebagai umat non Hindu merasa nyaman berkunjung ke pura ini" (Aprilynn CS, 35 tahun, wawancara, 20 Agustus 2019).

Selain menarik, para pengelola dan umat Hindu penyungsu pura teritorial di kota Jayapura ini juga dikenal terbuka dan bersikap ramah terhadap masyarakat setempat. Mereka juga melayani pengunjung pura dengan sopan dan ramah. Keramahan ini telah membangun citra positif di kalangan masyarakat lokal dan wisatawan yang berkunjung ke Pura Agung Surya Bhuvana. Pada era revolusi Industri 4.0 yang diwarnai sistem informasi *online* dan digitalisasi dewasa ini, keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) semakin dikenal banyak orang, tidak hanya dari lingkungan masyarakat Papua sendiri, tetapi juga orang luar Papua. Informasi *online* yang intensif menjadikan PASB semakin dikenal masyarakat Nusantara, bahkan masyarakat dunia. Berita-berita positif yang menyangkut keberadaan PASB menjadi promosi gratis keberadaan PASB sebagai tempat ibadah umat Hindu yang artistik di Kota Jayapura.

Pura di Distrik Abepura, Kota Jayapura ini telah menjadi bagian dari objek wisata budaya. Sejak beberapa tahun belakang ini, Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) mulai berkembang menjadi daya tarik pariwisata di Papua. PASB mulai dikenal secara nasional dan internasional lewat promosi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung lewat medsos seperti YouTube, Google, Facebook, WA, Telegram, dan yang lainnya. Ketua PHDI Kota Jayapura, IB Suta Kertya menjelaskan sebagai berikut: "Kebanyakan dari wisatawan mengetahui adanya PASB melalui media maya atau medsos sehingga ingin melihatnya secara langsung. Hal ini membuktikan bahwa era digitalisasi yang mewarnai revolusi industri 4.0 tidak selalu negatif. Berita *online* yang tersaji di internet justru telah berdampak positif akan keberadaan PASB di tengah-tengah kekhawatiran akan terjadinya erupsi dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

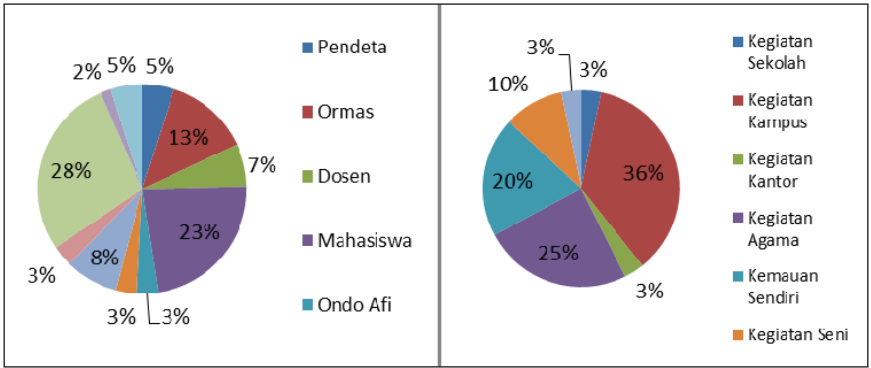
Pada revolusi industri 4.0, ternyata PASB muncul menjadi sebuah contoh dalam menyemai peradaban (Hasil wawancara, 25 Agustus 2019). Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) semakin dikenal sebagai objek pariwisata budaya di Kota Jayapura. Rata-rata kunjungan tamu atau wisatawan pertahun adalah 1. 800. 000 orang. Objek wisata Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) tergolong unik dan menarik minat wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ke PASB terdiri atas wisatawan domestik dan internasional. Mereka adalah wisatawan domestik baik dari Papua maupun dari daerah lainnya di Indonesia. Wisatawan internasional juga sering datang ke PASB bahkan ada yang secara khusus mengunjungi pura karena mereka mengenalnya lewat medsos.

Dari evaluasi terhadap 61 orang pengunjung PASB pada awal Semester II tahun 2019 diketahui bahwa secara umum, para pengunjung PASB adalah umat non Hindu. Mayoritas pengunjung PASB adalah Protestan (57%), Islam (17%) dan Katolik (3%). Pengunjung PASB yang beragama Hindu hanya 23%. Para pengunjung PASB ini menilai bahwa posisi keberadaan PASB amat strategis (13%), bangunan PASB tergolong unik (16%) dan keberadaan pura di Kota Jayapura ini telah menjadi ajang dalam mewujudkan toleransi antarumat beragama (71%) (lihat Gambar 4.2).



Gambar 4.2
Agama dan Persepsi Pengunjung terhadap PASB (N=61)
(Dokumentasi: I Wayan Rai S., 2019)

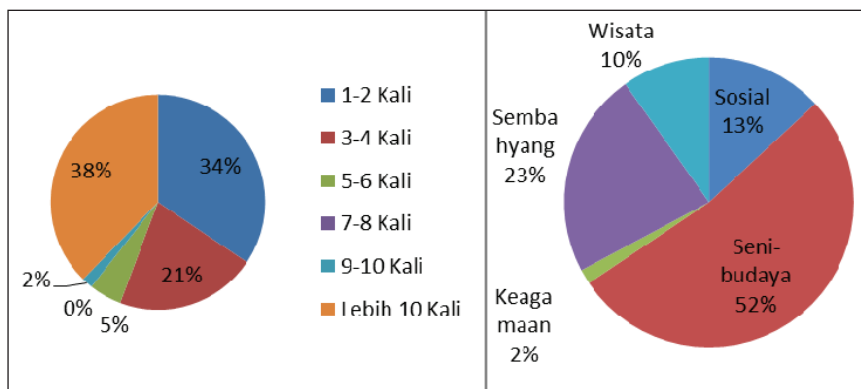
Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) terdiri dari berbagai macam profesi, termasuk pendeta, pengurus Ormas, dosen, guru, mahasiswa, ondo aji, tokoh adat, seniman, wartawan, pegawai pemerintah, swasta, dan aparat desa. Mereka berkunjung ke PASB dengan berbagai motivasi.



Gambar 4.3
Profesi dan Motivasi Pengunjung PASB (N=61)
(Dokumentasi: I Wayan Rai S., 2019)

Seperti divisualisasikan pada Gambar 4.3, motivasi pengunjung Pura Agung Surya Bhuvana adalah untuk kegiatan kampus 22 orang (36.07%), kegiatan agama 15 orang (24.59%), kemauan sendiri 12 orang (19.67%), kegiatan seni 6 orang (9.84%), kegiatan kantor 2 orang (3.28%), kegiatan sekolah 2 orang (3.28%), kegiatan lainnya 2 orang (3.28%).

Karena menjadi tempat wisata yang menarik, masyarakat mengunjungi PASB tidak cukup hanya sekali, tetapi berkali-kali. Mereka berkunjung ke PASB, bukan sekedar berwisata, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan di lingkungan pura terbesar di Kota Jayapura ini, termasuk terlibat dalam kegiatan sosial, seni-budaya, keagamaan (lihat Gambar 4.4).



Gambar 4.4
Frekuensi Kunjungan dan Kegiatan Pengunjung PASB (N=61)
(Dokumentasi: I Wayan Rai S., 2019)

Pendapat dari non hindu atau turis asing amat positif terhadap objek wisata Pura Agung Surya Bhuvana (PASB). Mereka sangat senang berkunjung ke PASB karena bangunan yang unik dan artistik, mereka merasa nyaman, lokasi PASB strategis, orang-orangnya ramah serta merupakan tempat kunjungan wisata. Tamu-tamu atau wisatawan asing yang berkunjung berasal dari Hindia, Belanda dan Australia.

Selain sebagai objek pariwisata, Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) kini juga berkembang menjadi pusat laboratorium sosial budaya tentang tradisi Hindu (Bali). Hal ini tercermin dengan adanya kunjungan anak-anak sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, setingkat SMP, SMA, sampai ke Perguruan Tinggi ke tempat ini. Pada umumnya mereka datang secara berkelompok. Untuk anak-anak PAUD sampai SMA mereka dibimbing oleh guru-gurunya yang juga seorang pendeta. Dalam kunjungan tersebut, selain mendengar penjelasan tentang agama Hindu, mereka juga ikut sembahyang meskipun agama mereka berbeda.

Untuk kalangan mahasiswa mereka datang untuk berekreasi sekaligus juga melakukan penelitian, seperti diutarakan Ketua PHDI Provinsi Papua, selaku informan sebagai berikut. Umumnya, pelajar atau mahasiswa non hindu yang datang ke PASB ingin

mengenal pura sekaligus mengenal agama Hindu baik secara teori maupun praktek keagamaan pada saat adanya upacara tertentu di PASB. Namun, ada juga anak-anak muda yang datang untuk menikmati indahnya pemandangan dan mengabadikan kunjungan melalui foto dan video, bahkan ada yang membuat film secara khusus dengan mengambil lokasi di jaba pura.



Gambar 4.5
Siswa berkunjung di Pura Agung Surya Bhuvana
(Dokumentasi : I Wayan Rai S., 2019)

Materi dasar yang selalu disampaikan dalam rangka sosialisasi agama Hindu kepada para siswa yang berkunjung ke Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) adalah tentang penanaman konsep Tri Hita Karana yaitu tiga konsep keseimbangan dan keharmonisan; (1) Parahiangana, yaitu konsep yang harmonis antara manusia dengan sang pencipta melalui kegiatan upacara keagamaan; (2) Pawongan, yaitu konsep keseimbangan dan keharmonisan antara sesama ma-

nusia dan ciptaan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan social; dan (3) Palemahan, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam lingkungan. Misalnya bagaimana kita bersama-sama menjaga alam lingkuran pura agar bersih dan suci melalui kegiatan menanam pohon dan gotong royong. Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) kini telah menjadi pihak objek studi wisata bagi siswa di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dalam kaitan ini, salah seorang informan PASB menyatakan sebagai berikut:

“Siswa yang berwisata ke PASB dapat mengetahui dan belajar sesuatu yang baru untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan seni budaya, khususnya tradisi agama Hindu. PASB memang sangat cocok sebagai objek wisata religi dan wisata edukasi (I Komang A Wardhana, 55 tahun, 27 Agustus 2019).”

Dalam menyikapi semakin banyaknya wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke PASB, Ketua PHDI Jayapura pada setiap pertemuan dan persembahyangan selalu mengingatkan pentingnya untuk terus menjaga kesucian pura, keberasihan pura dan lingkungan. Warga penyungung Pura bersama sama menjaga dan memperhatikan Kesucian Pura baik secara sekala maupun niskala di Pura Agung Surya Bhuvana (Pasal 35, Awig-awig PASB, 2017). Setiap hari ada petugas dan pemangku yang selalu standby di pura untuk menerima kunjungan wisatawan sekaligus memberi penjelasan tentang PASB dan agama Hindu secara lebih luas.

4.2 PURA AGUNG SURYA BHUVANA: MEDIA PEREKAT PERSATUAN

Umat Hindu penyungung Pura Agus Surya Bhuvana Papua dan Umat non Hindu setempat menjalani hidup kesehariannya secara rukun. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perber Menag dan Mendagri, 2006). Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa me ngurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri.

Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu (Wahyuddin, 2009). Secara empiris, kerukunan umat Hindu penyungsong Pura Agung Surya Bhuvana Papua dan masyarakat lokal terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek kehidupan sosial-keagamaan, sosial-budaya, dan sosial politik-ideologis.

4.2.1 Aspek Kehidupan Sosial Keagamaan

Kerukunan antara umat Hindu penyungsong Pura Agung Surya Bhuvanadengan umat non Hindu di Kota Jayapura, Papua antara lain terwujud dalam aspek kehidupan sosial-keagamaan. Di antaranya adalah berupa adanya tradisi silaturahmi antarpemuka agama pada hari raya besar agama. Tradisi silaturahmi antar pe muka agama agamadi lingkungan umat Hindu penyungsong Pura Agung Surya Bhuvana dengan umat Nasrani di Papua pada hari raya Galungan dan Kuningan serta pada hari raya Natal merupakan bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura, Papua.

Dengan adanya Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) di Kota Jayapura, kegiatan umat Hindu setempat menjadi semakin dinamis. Umat Hindu di Kota Jayapura menjadikan PASB sebagai objek wisata sekaligus sebagai wahana interaksi sosial yang inklusif. Selain sebagai tempat ibadah umat Hindu, PASB terbuka untuk umum. Sebagai objek wisata, PASB boleh dikunjungi oleh siapapun, termasuk umat non Hindu. Secara langsung dan tidak langsung keberadaan PASB dan kegiatan umat Hindu di Jayapura memberikan keteladanan (*best practice*), bagaimana menjalani hidup rukun sesama warga bangsa.

Bersama PHDI Kota Jayapura, *pengempon* PASB berupaya mengembangkan kegiatan sosial keagamaan yang bertujuan untuk: (1) Mengembangkan dan memelihara kebudayaan baik dengan setiap badan, lembaga, organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan; (2) Mengembangkan tugas-tugas dimaksud PHDI bersama organisasi Hindu lainnya di kota Jayapura seperti Wanita Hindu Darma Indonesia (WHDI) Kota Jayapura dan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Kota Jayapura; dan (3) mendukung Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura dalam menciptakan kerukunan antar warga bangsa di bumi Papua. PHDI dan FKUB Kota Jayapura terlibat aktif dalam membina kerukunan antarumat beragama di Jayapura (Gambar 4.6).



Gambar 4.6
Pertemuan Pengurus PASB dan PHDI Kota Jayapura

(Dokumentasi: I Wayan Rai S., 2019)

Hubungan dan kerjasama antarumat beragama di Kota Jayapura cukup harmonis. Kebersamaan umat Hindu dengan umat kristiani serta masyarakat Lokal Papua difasilitasi oleh Forum Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura. FKUB Kota Jayapura beranggotakan tokoh-tokoh lintas agama setempat. Fungsi pokok FKUB adalah sebagai lembaga koordinasi dan fasilitasi antar umat beragama agar semua pemeluk agama bisa melaksanakan kegiatan sosial-keagamaanya dengan semestinya. FKUB adalah wadah yang merupakan tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya. FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan, memelihara dan membiasakan kerukunan hidup umat beragama salah satu tugas FKUB adalah melakukan forum dialog. Dalam forum dialog tersebut semua pihak dapat saling mendengarkan informasi dari pihak lain dan dapat saling mengemukakan permasalahannya masing-masing (Mukti, 1975). Pura Agung Surya Bhuvana Kota Jayapura menjadi ajang komunikasi dan interaksi masyarakat baik di lingkungan intern umat hindu maupun antara umat Hindu dengan umat pemeluk agama lain sehingga tercipta suatu jalinan persaudaraan antar warga bangsa. Dalam kaitan ini, salah seorang umat Hindu setempat menyatakan:

“Pura ini menjadi tempat untuk berkomunikasi dalam rangka mempererat persaudaraan dan merekat bangsa. Saya dan keluarga merasa senang dapat berpartisipasi melalui seni budaya Papua pada saat upacara piodalan di PASB. Pura ini merupakan contoh dari sebuah tempat suci yang mencerminkan toleransi serta penghormatan terhadap keragaman dan kearifan lokal sebagaimana terlihat dalam relief tembok penyengker pura dan ornamen pada balai wantilan, serta pemasangan baliho ucapan selamat hari raya terhadap agama lain (I Gusti Ngurah Wardhana, 53 tahun, wawancara, 27 Agustus 2019).

4.2.2 Aspek Kehidupan Sosial-Budaya

Di samping dalam aspek kehidupan sosial keagamaan, wujud kerukunan antara umat Hindu penyungsur Pura Agung Surya Bhuvana Kota Jayapura, Papua juga menyangkut aspek kehidupan sosial-budaya sehari-hari. Diantaranya adalah adanya tradisi gotong royong. Gotong royong berasal dari kata dalam Bahasa Jawa, atau setidaknya mempunyai nuansa Bahasa Jawa. Kata gotong dapat dipadankan dengan kata pikul atau angkat, sebagai contoh ada pohon yang besar roboh menghalangi jalan di suatu desa. Masyarakat mengangkatnya bersama-sama untuk memindahkan kayu itu ke pinggir jalan. Orang desa menyebutnya dengan nggotong atau menggotong.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, terdapat berbagai macam bentuk gotong royong. Menurut Koentjaraningrat, jenis gotong royong itu meliputi: (1) Tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, (2) Tolong-menolong dalam aktivitas-aktivitas sekitar rumah tangga, (3) Tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara, dan (4) Tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana dan kematian (Koentjaraningrat, 2009). Kerjasama atau gotong royong yang berlangsung dalam kehidupan umat Hindu penyungsur Pura Agung Surya Bhuvana dengan umat non Hindu di Kota Jayapura, Papua terjadi ketika ada kerja bhakti untuk pengelolaan fasilitas umum seperti pemeliharaan kebersihan got, jalan, kebersihan lingkungan masing-masing. Jadwal kerja bhakti bersama ini umumnya dilaksanakan tiap bulan pada hari Minggu, menyertakan seluruh warga yang bermukim di lingkungan setempat.

Dalam sekup terbatas, gotong royong juga terjadi ketika salah seorang warga memperbaiki atau mendirikan rumah. Pihak famili atau keluarga dekat ada yang terlibat dalam pendirian rumah ini. Pada zaman sekarang, gotong royong yang menyangkut kegiatan keluarga, khususnya dalam rangka pembangunan rumah ini di lingkungan umat penyungsur Pura Agung Surya Bhuvana Kota Jayapura, Papua semakin jarang, karena umumnya warga mem-

bangun rumah dilakukan secara borongan kepada penyedia jasa bangunan (kontraktor). Sebagaimana masyarakat nusantara lainnya, masyarakat Kota Jayapura secara umum memang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial-budaya setempat.

Hak-hak komunal masih kental, sikap guyub atau solidaritas mekanik dalam istilah Emile Durkheim, masyarakat Indonesia kerap menjadi acuan dalam berperilaku. Begitupun budaya tenggang rasa terhadap orang lain sudah menjadi nilai hidup dominan dan universal masyarakat Indonesia. Sikap ini menjadikan seseorang tahu diri dan tahu menempatkan diri dalam lingkungan di mana dia tinggal, dan ketika dia berpindah ke tempat yang baru. Dalam praktiknya, setiap orang bebas mengekspresikan agama dan keyakinannya selama dia menghormati agama dan sistem keyakinan pemeluk agama yang dominan dipeluk di masyarakat dia tinggal.

Ketiga, kerukunan antara umat Hindu penyungsu Pura Agung Surya Bhuvana Papua dengan umat non Hindu juga termanifestasi dalam aspek kehidupan seni budaya masyarakat setempat. Diantaranya adalah pengembangan seni-budaya berupa Tari Kecak Rasa Papua oleh ISBI Papua. Sebutan tarian kecak rasa Papua didasarkan pada alasan bahwa penari yang membawakan tarian kecak tersebut terdiri dari keberagaman agama yang ada di dalamnya, ada yang dari Kristen, Islam, Hindu, Budha dan juga dari Katolik. Kenapa dibilang ala Papua karena penarinya berasal dari masyarakat Papua yang tergabung dalam Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua (Ratumakin, 2015). Dalam Kaitan ini, Ketua Panitia Upacara Pujawali di Pura Agung Surya Bhuvana, Ida bagus Suta Kertya menyatakan:

“Sebagai bentuk pengabdian masyarakat oleh ISBI, pertunjukan tari kecak rasa Papua ini amat positif. Di samping anak-anak kami (generasi muda Hindu) telah diajari menari, tari (kecak) ini mencerminkan perdamaian masyarakat nusantara yang multi etnis dan multikultur (Bali Post, Senin, 12 Oktober 2015).”

Sebagai bentuk Akultuarsi Budaya Bali dan budaya masyarakat lokal Papua, kreasi baru tari Tari Kecak Rasa Papua ini muncul

untuk mencari solusi terhadap kompleksitas dan keragaman yang ada di Papua melalui media komunikasi antar budaya secara estetik dan non-verbal. Tarian ini adalah sebuah kolaborasi seni yang berbasis pada tari Kecak (Bali) dipadukan dengan seni budaya Papua dan seni budaya Nusantara lainnya. Dalam hubungan ini, salah satu hal yang terpenting adalah prinsip bahwa seni budaya dapat dijadikan sebagai media komunikasi untuk membangun rasa kebersamaan, saling hormat menghormati, untuk membangun suasana sejuk dan damai. Tari Kecak Rasa Papua yang dibawakan oleh sekitar 100 penari yang terdiri atas mahasiswa dan dosen ISBI Tanah Papua, “ngayah” untuk pertama kalinya pada saat upacara piodalan di PASB tanggal 15 September 2015.

Kerukunan umat Hindu dengan umat non hindu serta masyarakat lokal Papua yang harmonis tersebut secara mendasar juga didasari oleh adanya adaptasi dan akulturasi budaya Hindu ke dalam budaya masyarakat lokal Papua. Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk ornament Tifa dan burung cenderawasih pada bangunan PASB. Ketika berkunjung ke PASB, di pintu masuk pura akan terlihat dengan jelas sebuah papan nama pura yang bertuliskan “PURA AGUNG SURYA BHUVANA JAYAPURA”. Penyangga papan nama pura itu dibuat berbentuk Tifa, dan sangat jelas terlihat dari jalan raya. Selanjutnya ornament Tifa dapat pula dijumpai pada relief yang terdapat pada tembok penyangker pura (Gambar 4.7).



Gambar 4.7 Papan Nama Pura Agung Surya Bhuvana

(Dokumentasi : I Wayan Rai S., 2019).

Uniknya, tembok penyengker pura yang memakai gaya Bali dihiasi dengan ornament episode ceritera Tantri yang menggambarkan perkelahian singa dengan lembu, diisi pula ornament Tifa, padahal Tifa itu tidak ada disebutkan dalam ceritra aslinya. Demikian seterusnya, pada setiap episode cerita Tantri yang digambarkan selalu ditambahkan dengan Tifa, baik Tifa secara mandiri maupun Tifa dengan burung Cenderawasih (Gambar 4.8).



Gambar 4.8
Ornamen Burung Cendrawasih Pada Tembok Pura Agung Surya Bhuvana
(Dokumentasi : I Wayan Rai S., 2019).

Gambar 4.8 memvisualisasikan perpaduan simbol antara budaya Hindu Bali dengan budaya Papua, yakni lukisan cerita tantri dengan cerita lokal tentang Burung Cenderawasih. Karya seni pahat ini tentu amat unik, dan diterima oleh masyarakat lokal Papua yang juga memiliki bakat seni yang ekspresif.

Masyarakat Papua adalah masyarakat yang ekspresif. Mereka mengekspresikan jiwa keseniannya dalam bentuk alat musik tradisional, maupun ukiran-ukiran dan tarian. Setiap momen penting dalam mereka selalu dirayakan dan diiringi dengan musik-musik tradisional, salah satunya alat musik Tifa. Alat musik ini memiliki

keunikannya tersendiri bahkan saat ini alat musik tifa, sudah menjadi simbol dari Papua sendiri. Alat musik yang bernama Tifa ini adalah sejenis alat musik pukul yang terbuat dari kayu. Suku-suku yang ada di Papua memiliki tifa dengan ciri khas masing-masing. Tifa biasa dimainkan saat mengiringi ritual-ritual tradisional.

Alat musik tifa merupakan benda penting bagi masyarakat Papua termasuk masyarakat Papua yang berada di Distrik Abepura, Jayapura. Tifa dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh, bentuknya mirip dengan gendang. Alat musik Tifa dibuat dari batang kayu yang diberi motif berupa ukiran, sehingga terlihat lebih indah. Bagian tengahnya dibuang sehingga menjadi berlubang dan pada salah satu sisinya ditutup. Kulit biawak atau soa-soa digunakan sebagai penutup dan diikat dengan tali rotan. Kulit biawak atau soa-soa sebelumnya telah dikeringkan sehingga menghasilkan bunyi yang merdu pada saat dipukul atau ditabuh. Biji damar ditempelkan di kulit biawak atau soa-soa agar suaranya makin nyaring.



Gambar 4.9
Alat Musik Tifa

(Sumber: <https://www.google.com/search>)

Tifa adalah alat musik yang populer dalam kehidupan masyarakat Papua (Gambar 4.9). Alat musik Tifa ini merupakan sejenis alat musik bentuknya menyerupai gendang atau tabung yang cara memainkannya di pukul terbuat dari kayu terbuat dari kayu yang di lubangi tengahnya supaya tercipta suara yang nyaring dan indah. Bilamana dilihat sekilas memang alat musik tifa ini bentuknya hampir sama dengan alat musik Gendang, bedanya suara alat musik Tifa ini terdengar lebih ringan. Tifa merupakan salah satu alat musik yang terkenal di kalangan masyarakat Maluku dan Papua (Sroyer dkk., 2018).

Menurut para ahli budaya Papua, makna filosofi dalam alat musik Tifa adalah alat untuk memersatukan dan menghimpun warga. Ia mampu menggerakkan anggota komunitas masyarakat untuk berkumpul bersama. Umumnya masyarakat akan tergerak dan menuju arah asal lantunan tetabuhan Tifa. Ia mampu menyihir masyarakat untuk bersatu padu dalam kebersamaan. Ia adalah alat penggerak modal sosial (social capital). Sebagaimana disinggung di atas, Tifa adalah sebuah instrument sakral bagi masyarakat Papua, sedangkan burung Cenderawasih juga sangat dihormati dan disakralkan karena dipercaya sebagai burung surga yang dikenal dengan nama bird of paradise atau berbagai sebutan oleh tiap suku. Relief Tifa di PASB dapat disaksikan pula pada balai wantilan Praja Mandala, misalnya pada bagian depan wantilan, bagian depan panggung, serta ornament pada tiang penyangga (Bali: adegan) wantilan. Ornamen ini merupakan perpaduan ornament gaya Bali dan ornament gaya Senatani Papua yang dibuat oleh pak Ketut dari Gianyar.

Pemasangan ornament Tifa dan burung Cenderawasih sebagai relief bangunan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) didasari dengan pertimbangan kultural yang kuat. Menurut penjelasan dari beberapa orang pemuka umat Hindu di Papua (Pemangku Gede, Ida Bagus Suta Kertya, Komang Alit Wardana, dll.), bahwa pemakaian Tifa dan Cenderawasih sebagai relief pura, dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan umat Hindu kepada kepercayaan dan kearifan lokal Papua. Lebih lanjut dijelaskan bahwa

dalam kaitannya dengan pendirian pura baru di suatu tempat atau daerah, hendaknya dapat dilakukan secara fleksibel tanpa mengurangi substansinya sebagai tempat suci. Pendirian pura itu dianalogikan bagaikan aliran sungai Gangga yaitu ketika air sungai Gangga itu mengalir ke anak sungai maka air itu selalu akan menyesuaikan dengan tempatnya yang baru. Konsep desa, kala, patra (tempat, waktu, dan keadaan) juga dijadikan sebagai pertimbangan penting.

Pemakaian relief Tifa dan burung Cenderawasih di PASB memberi dampak yang sangat positif terhadap hubungan antara masyarakat lokal dengan umat Hindu di Papuabaik yang berasal dari Bali maupun dari daerah lainnya di Indonesia seperti dari Banyuwangi, Belitar, serta dari daerah lainnya di Jawa dan Nusantara. Ornament tifa dan burung Cenderawasih merupakan ekspresi simbol budaya masyarakat Papua yang dapat dikategorikan sebagai wujud simiotika kultural yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu (Pateda, 2001). Ornamen tifa dan burung Cenderawasih pada bangunan Pura Agung Surya Bhuvana tiada lain adalah sebuah penghormatan cultural umat Hindu terhadap keberadaan budaya lokal, seperti pernyataan Dr. Don Flassy, seorang cendekiawan dan budayawan terkemuka Papua sebagai berikut.

“Kami sangat berterimakasih kepada saudara-saudara kami dari Bali. Pemakaian relief Tifa dan burung Cenderawasih di PASB menunjukkan bahwa kami sangat dihormati sehingga kami merasa sangat dekat” (Wawancara 1 September 2019).

“Saya merasa sangat nyaman bila datang ke PASB. Atmosfir pura ini sangat menyenangkan, apalagi teman-teman di pura ini saya rasakan sangat ramah dan bersahabat” (Yanes Koyari, seorang seniman Biak, wawancara 5 September 2019).

Komentar senada juga diberikan oleh beberapa orang seniman, budayawan, tokoh adat, dan mahasiswa serta dosen ISBI Tanah Papua yang sering “ngayah” di PASB maupun pura lainnya seperti di kabupaten Keerom dan Nimbokrang, Jayapura. Dengan ornament tifa dan burung Cenderawasih tersebut, bangunan Pura

Agung Surya Bhuvana (PASB) terasa menyatu dengan kepercayaan dan masyarakat lokal. PASB memiliki unsur tangible (yang dapat dilihat dan dipergang) serta intangible berupa nilai-nilai luhur yang sangat penting untuk kehidupan sosial budaya. Selain sebagai tempat suci, PASB merupakan pusat pendidikan, pusat seni budaya Nusantara, pusat untuk memupuk rasa toleransi, semangat kebersamaan dan saling pengertian sesama hamba ciptaan Tuhan.

Toleransi antarumat beragama mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) memberikan kebebasan atau kemerdekaan Dimana setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih suatu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dilindungi. Setiap individu berhak memilih satu agama atau kepercayaan yang diyakininya, tanpa ada paksaan dari siapapun (Abdullah, 2001); (2) mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing, tanpa melanggar hak orang lain; (3) menghormati keyakinan dan kepercayaan orang lain; (4) saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan yang lain (Hasyim, 1979).

Umat Hindu penyungsu Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dan masyarakat lokal non Hindu di Kota Jayapura telah menjalankan toleransi, dan telah mempraktekkan sebuah pola interaksi sosial antar umat beragama yang harmonis. Kerukunan umat beragama seperti yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Kota jayapura merupakan bagian penting dari kerukunan nasional untuk menunjang pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, seperti harapan Mukti Ali, kerukunan hidup antarumat beragama merupakan prakondisi yang harus diciptakan bagi pembangunan di Indonesia (Ali, 1975).

Secara mendasar, arah pembinaan kerukunan hidup beragama tertuang dalam GBHN sebagai berikut: “Kehidupan Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat”. Secara umum terdapat tiga klasifikasi kerukunan hidup beragama di Indonesia, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antar umat beragama, dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah (Depag RI, 1997).

4.2.3 Aspek Kehidupan Sosial Politik-ideologis

Sesuai dengan teori fungsional struktural Parson (Ritzer, 2008), secara teologis-kultural umat Hindu di Kota Jayapura telah berhasil melakukan pola adaptasi dengan masyarakat setempat. Keberhasilan adaptasi kultural ini secara nyata dibuktikan melalui keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) berhasil menjadi wahana interaksi sosial antar umat beragama di Kota Jayapura. Di samping sebagai tempat ibadah umat Hindu, PASB berkembang menjadi objek wisata yang mempesona yang dikunjungi oleh umat non Hindu.

Kerukunan antar umat beragama di Kota Jayapura tidak hanya sebatas dalam aspek sosial keagamaan dan sosial-budaya, tetapi kerukunan antara umat Hindu penyungsu Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dengan umat non Hindu setempat juga menyangkut aspek kehidupan sosial politik-ideologis. Sebagai bagian dari masyarakat Nusantara, penyungsu PASB dan masyarakat Kota Jayapura menjunjung tinggi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar tersebut adalah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Prinsip NKRI.

Pertama, Pancasila dipedomani sebagai satu-satunya dasar, ideologi, dan falsafah hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai landasan idiil Negara RI, Pancasila telah berfungsi sebagai: (a) alat pengendalian sosial (*a tool of social control*), (b) alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*), (c) alat ketertiban dan pengaturan masyarakat, serta (d) sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

Kedua, selain menjunjung tinggi dasar, negara RI, Pancasila, masyarakat Kota Jayapura juga menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

Ketiga, kerukunan antara umat Hindu penyungung PASB dan masyarakat lokal Kota Jayapura juga menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Diterjemahkan per patah kata, kata *bhinneka* berarti “beraneka ragam” atau berbeda-beda. Kata *neka* dalam bahasa Sanskerta berarti “macam” dan menjadi pembentuk kata “aneka” dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti “satu”. Kata *ika* berarti “itu”. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Keempat, kerukunan antara umat Hindu penyungung Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) dan masyarakat lokal Kota Jayapura juga dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI merupakan bentuk dari negara Indonesia, dimana negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, selain itu juga bentuk negaranya adalah republik, kenapa NKRI, karena walaupun negara Indonesia terdiri

dari banyak pulau, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan dalam sebuah negara dan bangsa yang bernama Indonesia. Kerukunan antar umat beragama di Kota jayapura yang menyangkut aspek kehidupan sosial politik-ideologis tersebut sesuai dengan tujuan pendirian Pura Agung Surya Bhuvana, yang meliputi: (1) Menegakkan agama Hindu dan norma agama dan norma masyarakat yang sesuai dengan perkembangan jaman dan aturan sastra; (2) Meningkatkan Sradha, puja bhakti terhadap Hyang Widhi yang berstana di Pura Agung Surya Bhuvana Jayapura; (3) Meningkatkan pelaksanaan dharma agama dan dharma Negara; (4) Meningkatkan hubungan persatuan dan persaudaraan umat Hindu yang ada di Kota Jayapura (Pasal 4, Ayat 3, Awig-awig PASB, 2017). Kehidupan beragama harus sejalan dengan hidup bermasyarakat dan kesadaran nasionalisme.

4.3 PURA AGUNG SURYA BHUVANA: MEDIA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) merupakan simbol Hindu di tanah Papua, Kota Jayapura yang didasari oleh nilai teologis hindu dan nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat hindu dan non hindu setempat. Nilai merupakan suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang, karena menarik, menyenangkan, memuaskan berguna, menguntungkan atau merupakan suatu sistem keyakinan.

Nilai adalah penilaian yang diperoleh individu dalam kehidupan masyarakat pada saat menanggapi rangsangan tertentu mengenai mana yang diinginkan dan mana yang tidak diinginkan. Nilai menumbuhkan sikap pada individu, yaitu kecenderungan yang dipelajari individu untuk menjawab atau menanggapi rangsangan yang hadir di hadapan atau di sekitar dirinya. Dengan kata lain kecenderungan ini tergantung pada nilai-nilai yang dipertahankan individu (Bambang, 2000). Sistem nilai budaya merupakan konsepsi abstrak mengenai masalah dasar yang penting

dan bernilai di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga nilai budaya itu menjadi tujuan bagi masyarakat pendukungnya.

Nilai merupakan segala sesuatu yang dipentingkan manusia menyangkut segala sesuatu yang baik dan buruk sebagai abstraksi pandangan manusia dalam masyarakat. Basis nilai yang mendasari kerukunan antara umat Hindu penyungsong Pura Agung Surya Bhuvana Kota Jayapura, Papua dengan masyarakat lokal Papua, meliputi nilai teologis, nilai budaya, dan nilai Politik-Ideologis. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan inter aksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual.

Umat Hindu penyungsong Pura Agung Surya Bhuvana Kota Jayapura, Papua bersama umat non Hindu setempat mampu menjalani hidup secara rukun dan damai. Mereka bisa bekerjasama dalam model kehidupan sosial yang harmonis. Model kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis ini tidak terlepas dari pemahaman dan penghayatan ajaran agama yang mereka imani. Dalam kaitan ini, Max Weber (1864-1920) menyodorkan tesis bahwa agama dengan seperangkat ajarannya adalah spirit untuk menentukan harmoni sosial dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat (Richard, 1989).

Sebaliknya dalam tesis Emile Durkheim (1857-1917) dinyatakan bahwa realitas sosial (harmoni sosial) adalah spirit untuk menentukan tata kelola kehidupan keagamaan (Robertson, 1986). Sesuai dengan tesis Max Weber di atas, sikap, perilaku dan realitas kerukunan umat beragama di Kota Jayapura, Papua merupakan ekspresi dari nilai-nilai keagamaan yang mereka imani. Umat Hindu memiliki dasar-dasar nilai agama yang kemudian mereka terapkan sebagai acuan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Begitu pula umat nasrani setempat memiliki dasar nilai agama yang mereka imani sebagi acuan dalam menjalin kerjasama dengan orang lain. Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) merupakan simbol

Hindu ditanah Kota Jayapura, Papua yang didasari oleh nilai teologis Hindu.

Banyak ajaran atau nilai teologi Hindu yang terkait dengan kerukunan umat manusia dalam Kitab Weda (Kitab suci Umat Hindu). Diantaranya adalah nilai teologi yang memerintahkan manusia untuk selalu menjalankan *Tri Hita Karana* yaitu: selalu berbakti kepada Hyang Widdhi, hidup rukun dengan alam lingkungan, serta hidup rukun dengan sesama umat manusia. Dalam menjalin hubungan dengan umat manusia, diperintahkan untuk selalu rukun tanpa memandang:ras, kebangsaan, suku, agama, orang asing, pribumi maupun pendatang, sehingga umat Hindu selalu memanjatkan doa sebagai berikut: Samjnanam nah svebhih, Samjnanam aranebhih, Samjnanam asvina yunam, ihasmasu ni 'acchalam. Artinya: Semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang yang dikenal dengan akrab, Semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang asing, semoga Engkau memberkahi kami dengan keserasian ,kerukunan/keharmonisan (Atharvaveda VII. 52. 1).

Janam bibhrati bahudha vivacasam, nanadharmanam prthivi yathaukasam, sahasram dhara dravinasya me duham, dhruveva dhenur anapasphuranti. Artinya: Semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, dan memeluk Agama (kepercayaan) yang berbeda-beda, sehingga Bumi Pertiwi bagaikan sebuah keluarga yang memikul beban. Semoga Ia melimpahkan kemakmuran kepada kita dan menumbuhkan penghormatan diantara kita, seperti seekor sapi betina kepada anak-anaknya (Atharvaveda XII. I. 45). Umat Hindu juga senantiasa berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup, seperti bait ke 5 Puja Trisandya yangwajib dilantunkan 3 (tiga) kali dalam sehari oleh umat Hindu yang taat: Om Ksamasva mam mahadewa, sarwaprani hitangkara, mam moca sarwa papebyah, palayaswa Sadasiwa yang artinya: Hyang Widdhi ampunilah hamba, semoga semua makhluk hidup (Sarwaprani) memperoleh keselamatan (hitangkara), bebaskanlah hamba dari segala dosa dan lindungilah hamba.

Sebagai ajaran Hindu, perintah-perintah Hyang Widdhi kepada manusia agar menjalin kerja sama dengan sesamanya dan mengembangkan kehidupannya secara rukun. Menurut para pemuka Hindu di Jayapura, di dalam pustaka suci weda terdapat perintah-perintah Hyang Widhi tentang hidup rukun diantaranya adalah: *Tri Hita Karana*, *Tat Twam Asi*, *Tri Kaya Parisudha*, dan *Catur paramita*.

Pertama, *Tri Hita Karana* merupakan filosofi yang terkait dengan kebahagiaan lahir batin masyarakat Hindu Bali. Kebahagiaan hidup manusia bisa dicapai apabila manusia: (1) mampu membina hubungan yang harmonis dengan *Hyang Widdhi Wasa (Parahyangan)*, (2) Membina hubungan harmonis antara manusia dengan manusia tanpa membedakan asal usul, ras, suku, agama, kebangsaan dan lain lain (*Pawongan*), dan (3) Membina hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*). Ketiga bentuk hubungan yang harmonis ini dapat mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, kerukunan bagi kehidupan manusia.

Tri Hita Karana bertitik sentral pada manusia, dengan kata lain *Tri Hita Karana* bisa terwujud jika manusia mempunyai tekad yang kuat melaksanakannya. Tekad yang kuat harus disertai dengan pengertian yang mendalam dan kebersamaan sesama umat manusia. Trihitakarana tidak bisa diwujudkan hanya oleh seorang diri atau sekelompok orang saja. Itu harus dilakukan bersama-sama oleh semua manusia, bahkan manusia beragama apapun. Manusia yang pendakian spiritualnya cukup akan mencintai Tuhan (Hyang Widhi). Cinta kepada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih luas disebut “bhakti”. Ruang lingkup ini misalnya: bhakti kepada Tuhan, negara, bangsa, rakyat, dll. Tinjauan khusus tentang bhakti kepada Hyang Widhi, wujudnya adalah kasih sayang kepada semua ciptaan-Nya, yaitu makhluk hidup: manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan; demikian pula kepada ciptaan Tuhan lainnya (Mantra, 1996).

Kedua, *Tat Twam Asi* adalah sikap hidup yang menganggap bahwa kondisi orang lain adalah kondisi dirinya sendiri. *Tat Twam Asi* berarti Itu adalah Aku atau kamu adalah aku. Dalam pergaulan

hidup sehari-hari manusia diperintahkan selalu berpedoman kepada *Tat Twam Asi*, sehingga tidak mudah melaksanakan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan bahkan dapat menyakiti hati orang lain dan pada akhirnya menimbulkan rasa iri hati benci dan kemarahan. Dengan menganggap orang lain adalah diri sendiri, maka manusia akan memperlakukan orang lain, seperti apa yang ingin ia lakukan. *Tat Twam Asi* menjurus kepada Tapa Selira atau Tenggang Rasa yang menuntun manusia dalam berpikir, berkata-kata dan berperilaku, sehingga tidak berpikir negatif terhadap orang lain, tidak berkata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, dan tidak berperilaku yang dapat merugikan orang lain.

Ketiga, *Tri Kaya Parisudha* adalah tiga perilaku yang harus disucikan, meliputi: (1) *Manacika Parisudha*, yaitu mensucikan pikiran, antara lain: selalu berpikir positif terhadap orang lain, berpikir tenang (manahprasadah), lemah lembut (saumyatwam), pendiam (maunam), mengendalikan diri (atmawinigraha), jiwa suci/ lurus hati (bhawasamsuddhi); (2) *Wacika Parisudha*, yaitu mensucikan ucapan, antara lain: berkata yang lemah lembut, berkata yang tidak melukai hati/tidak menyinggung perasaan/tidak menyebabkan orang lain marah (anudwegakaram wakyam), berkata yang benar (satyam wakyam/satya wacana), berkata-kata yang menyenangkan (priyahitam wakyam), dapat dipercaya dan berguna, dan (3) *Kayika Parisudha*, yaitu mensucikan perbuatan, antara lain: bertingkah laku yang santun, hormat pada para orang suci/pendeta, hormat pada para guru, hormat pada orang yang arif bijaksana, berperilaku suci (saucam), benar (arjawa), tidak menyakiti/membunuh makhluk lain (ahimsa). *Tri kaya Parisudha* merupakan petunjuk Hyang Widdhi kepada manusia dalam mencapai kesempurnaan Hidup (BG. XVII. 14-16). *Tri kaya Parisudha* diperintahkan supaya setiap orang selalu berpikir positif terhadap orang lain, berkata-kata yang lemah lembut dan menyenangkan orang lain, serta menghindari berperilaku yang membuat orang lain tidak senang. Melaksanakan *Tri kaya Parisudha* untuk menghindari adanya rasa kurang menghormati harkat dan martabat manusia yang dapat

menimbulkan kemarahan dan rasa dendam yang berkepanjangan di antara sesama manusia.

Keempat, *Catur Paramita* adalah empat perilaku umat Hindu yang wajib dilaksanakan dalam menjalani pergaulan di masyarakat. Empat perilaku (*Catur Paramita*) ini meliputi: (1) *Maitri*, mengembangkan rasa kasih sayang, (2) *Mudhita*, membuat orang simpati, (3) *Karuna*, suka menolong, dan (4) *Upeksa*, mewujudkan keserasian, keselarasan, kerukunan dan keseimbangan. Menurut I Made Suama, Mantan Bendesa Desa Pakaraman Lokasari, empat ajaran di atas adalah nilai-nilai Hindu yang bisa diimplementasikan dalam mengembangkan kerukunan antarumat beragama. Ia menggarisbawahi bahwa secara umum, ajaran *Tri Hita Karana* misalnya sudah mengatur bagaimana umat Hindu wajib menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, yakni dengan menunaikan persembahyangan kepada *Hyang Widi Wasa (parahyangan)*, di samping kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan Hidup (*palemahan*) dan berbuat baik atau menjalin kehidupan yang harmonis dengan sesama manusia lainnya (*pawongan*). Kerukunan dan kerjasama antara umat Hindu penyungsong Pura Agung Surya Bhuvana juga dilandasi nilai-nilai sosial budaya. “Nilai budaya merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Seseorang di dalam hidupnya tidak dapat lepas dari nilai-nilai budaya. Dengan demikian nilai-nilai tersebut sangat luas, dapat ditemukan pada perilaku dalam kehidupan yang luas di alam semesta ini” (Soeleman, 1992: 15).

Setiap masyarakat memiliki nilai budaya. Dalam kaitan ini, Koentjaraningrat (2009) mengatakan bahwa, nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat atau kebudayaan suatu masyarakat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsep konsep yang hidup di dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai, berharga dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada para warga masyarakatnya.

Pembangunan Pura Agung Surya Bhuvana didasari oleh penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal sesuai pandangan

hidup orang Papua yang menghargai seni-budaya sebagaimana pernyataan Prof Rai, selaku Rektor ISBI Tanah Papua sebagai berikut.

Art is an important part of the lives of Papuans who have inherited from their ancestors for generations. The cultural heritages that have been embedded in their souls until now are still practiced sustainably according to the development of the people and its supporting community. This can be seen in the local wisdom “Nggo Wor Baido Na Nggo Mar”. The phrase in Biak language means “if we do not sing and dance, we will die” (Rai S. , 2016:1).

Hal ini sebauai dengan pernyataan Flassy (2016) sebagai berikut. *“In view and understanding of Papua-Melanesia, art contains a very deep meaning as a way of life of the Papuan people. “Art is the truth, and the truth is the moral ethics. Truth is the “yes” in that and that is inner peace, contentment, forgiveness, wisdom, fulfillment and various other aspects. With a brief but dense saying, ethics as such is love, loyal and honest”*— Terjemahannya: Dalam pandangan dan pemahaman Papua-Melanesia, seni mengandung makna yang sangat mendalam sebagai cara hidup masyarakat Papua. *“Seni adalah kebenaran, dan kebenaran adalah etika moral. Kebenaran adalah “ya” dalam hal itu dan itu adalah kedamaian batin, kepuasan, pengampunan, kebijaksanaan, pemenuhan, dan berbagai aspek lainnya. Dengan perkataan yang singkat tapi padat, etika seperti itu adalah cinta, setia dan jujur (Flassy, 2016: 3).*

Selain itu masih ada kearifan lokal berupa ungkapan yang terkait dengan Tifa, *a single-headed frame drum*. Ungkapan itu mengatakan bahwa *“Tifa adalah bagian dari kebudayaan Papua. Bila tidak ada suara Tifa, berarti tidak ada kehidupan”*. Tifa selalu melekat dalam kehidupan masyarakat sebab instrument ini dipercaya mengandung kekuatan sang pencipta, penguasa langit, penguasa laut, udara, alam, api, perempuan dan laki-laki, serta kekuatan lain yang melindungi mereka dari mara bahaya. Oleh karena itu, Tifa itu selalu digenggam dan dibawa kemana saja mereka pergi seperti saat melaut, bekerja, berkebun, dan kegiatan lainnya.

Selain Tifa, burung cenderawasih juga sangat disakralkan sebab dipercaya bahwa burung cenderawasih itu bukanlah burung biasa melainkan burung surga. Konon, ketika dunia ini tercipta turunlah malaikat dari surga diiringi oleh dua ekor burung, salah satunya adalah burung cenderawasih. Tugas malaikat turun ke bumi adalah untuk mengajarkan manusia cara-cara untuk meningkatkan peradaban. Setelah tugasnya selesai, maka malaikat kembali ke surga tetapi hanya diiringi oleh seekor burung. Sedangkan burung Cenderawasih ditugaskan untuk tetap tinggal di bumi untuk mengawasi kemajuan peradaban manusia sekaligus memberi laporan kepada malaikat. Sejak saat itulah bumi tempat mereka turun dari surga disebut Bumi Cenderawasih, yaitu Papua sekarang. Selain Bumi Cenderawasih, Papua juga memiliki julukan sebagai Bumi Matahari Terbit sebab untuk wilayah Indonesia matahari itu terbit untuk pertama kalinya di Papua, setelah itu barulah bergerak ke arah barat.

Sampai sekarang kepercayaan masyarakat Papua terhadap Tifa dan burung cenderawasih masih sangat kuat. Dalam konteks upacara adat, misalnya pengangkatan seorang Ondoafi (kepala suku), Tifa dan burung Cenderawasih menjadi ikon yang sangat penting. Tidak sembarang orang bisa memukul Tifa dan tidak sembarang orang pula yang boleh memakai atribut burung Cenderawasih. Tifa dan Cenderawasih kini dijadikan ikon Papua. Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) merupakan simbol Hindu di tanah Kota Jayapura, Papua yang didasari oleh nilai teologis hindu dan nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat hindu dan non hindu setempat.

Keberadaan umat hindu di Kota Jayapura telah melalui proses akulturasi dan asimilasi budaya lokal yang adaptif. Hal ini antara lain tercermin dalam pemakaian ornament tifa dan burung Cenderawasih pada beberapa bagian fisik bangunan Pura Agung Surya Bhuvana. Masyarakat lokal Papua merasa dihormati dan dihargai dengan adanya ornamen tifa dan burung Cenderawasih pada bangunan pura tersebut. Adanya asimilasi budaya lokal dengan budaya Hindu (Bali) pada bangunan Pura tersebut

mampu mengokohkan rasa kebersamaan atas warga bangsa di Kota Jayapura dan memiliki makna positif bagi integrasi bangsa Indonesia di tanah Papua.

Publikasi media maya (*cybermedia*) tentang keberadaan sebuah pura di luar Pulau Bali biasanya hanya bernilai sebagai sebuah informasi atau sebuah berita biasa saja, akan tetapi lain halnya dengan pemberitaan atau informasi di *cybermedia* tentang Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) yang disambut sangat positif oleh umat non Hindu di Nusantara. Adanya informasi atau pemberitaan tentang keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) secara online (*internet*), masyarakat luas atau masyarakat maya (*cybercommunity*) lebih mengenal Pura Padma Bhuvana di Kota Jayapura, Papua ini. Dewasa ini, keberadaan Pura Agung Surya Bhuvana bukan hanya sebagai tempat ibadah umat Hindu, tetapi sudah menjadi icon atau objek pariwisata baru di Kota Jayapura, Papua.

Berkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih (*cybermedia*) pada era revolusi industri 4.0 dewasa ini, integrasi seni dan budaya yang terjadi di Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) menyebabkan PASB semakin dikenal secara luas. PASB kini berkembang menjadi daya tarik pariwisata yang *tangible* maupun *intangible*. Dalam praktik sehari-hari, Pura Agung Surya Bhuvana telah menjadi media pendidikan multikultural. Hal ini nampak dari pemanfaatannya sebagai: (a) sebagai media pendidikan tentang *Tri Hita Karana*; dan (b) sebagai media pendidikan tentang multikultural.

Pertama, Pura Agung Surya Bhuvana juga sebagai media pendidikan tentang *Tri Hita Karana* (THK). Lingkungan sekitar Pura Agung Surya Bhuvana setempat menempatkan manusia hanyalah sebagai bagian dari makhluk hidup dan jaring-jaring kehidupan (Capra, 2002: 372). Dengan dasar filosofi *Tri Hita Karana*, manusia (*pawongan*) dihadirkan selaras dengan lingkungan pura (palemahan) yang menyadari sebagai hamba Tuhan (*parahyangan*). Masyarakat setempat tetap menjunjung tinggi falsafah THK ini. Mereka berupaya menjalani hidup dengan menjalin hubungan

yang harmonis dengan *Hyang Widi Wasa* (*parahyangan*), menjaga hubungan harmonis dengan sesamanya (*pawongan*), serta menjaga keselarasan hidup dengan lingkungannya (*palemahan*).

Kedua, objek wisata Pura Agung Surya Bhuvana juga sebagai media pendidikan multikultural. Kegiatan keagamaan termasuk pesantian, pasraman serta kegiatan seni-budaya seperti latihan tari, tetabuhan tradisional, dan ganjur yang diselenggarakan di lingkungan komunitas Hindu Kota Jayapura secara langsung menjadi atraksi wisata bagi pengunjung (wisatawan) Pura Agung Surya Bhuvana. Kegiatan sosial keagamaan dan seni-budaya tersebut menjadi media hiburan sekaligus sebagai media pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya.

Pendidikan multikultural pada era 4.0 ini, merupakan sebuah komitmen untuk menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sekaligus sebagai upaya pembentukan generasi penerus (*milenial*) yang siap berkompetisi dalam persaingan global. Revolusi industri keempat saat ini yang ditandai oleh otomasi (*automation*) dan megatrend, perkembangan pada aspek fisik, digital (*cyber-physical*), dan biologis. Pada aspek fisik telah dikembangkan misalnya saja kendaraan tanpa pengemudi, mesin cetak tiga dimensi, dan advanced robotics. Pada aspek digital telah dikembangkan artifisial intelligence, big data, dan Internet of Things (Akhmaloka, 2018: 2-3).

Upaya menjadi pribadi yang bermoral dan memiliki kompetensi dalam persaingan global adalah tuntutan era 4.0. Era revolusi industri 4.0 saat ini ditandai dengan digitalisasi dan otomatisasi di segala bidang kehidupan. Generasi milenial Hindu Papua harus mempersiapkan *skill*, memiliki perilaku yang baik (*behavioral attitude*), meningkatkan kompetensi diri di era global. Mereka harus pandai menata diri dan siap berkompetisi secara global. Mereka juga harus mengambil peran aktif, menjadi pemain (subjek) sesuai minat dan bakat masing-masing. Generasi milenial Hindu dituntut mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir

kritis, kreatif dan inovatif di segala bidang. Pura Agung Surya Bhuvana sebagai benda pusaka budaya serta aktifitas di dalamnya merupakan wahana untuk pendidikan multikultural.

Menurut Blum (2001: 16), pendidikan multikultural sarat dengan penghargaan, penghormatan dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk. Pendidikan multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Dalam kaitan ini, secara umum ada tiga hal yang perlu ditekankan dalam pendidikan multikultural, yaitu: (1) menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang; (2) menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnik/kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya; dan (3) menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri; yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara (Blum, 2001: 19).

Secara umum wisatawan memiliki kesan positif terhadap objek wisata di Pura Agung Surya Bhuvana. Kesan dan sikap positif wisatawan terhadap tradisi dan upacara keagamaan masyarakat Hindu Bali di Pura Agung Surya Bhuvana tersebut merupakan bentuk mereka yang respek terhadap budaya Hindu (Bali). Sebaliknya, ornamen Tifa dan Burung Cenderawasih pada relief Pura Agung Surya Bhuvana merupakan penghargaan umat Hindu terhadap budaya masyarakat Papua. Pengakuan dan penghormatan terhadap kepercayaan dan keyakinan umat agama lain merupakan bentuk respek mereka terhadap pluralism budaya dan agama.

Obyek wisata Pura Agung Surya Bhuvana telah mampu menggugah kesadaran pluralitas kehidupan beragama dan kesa-

daran multikultural. Menurut Dananjaya pluralisme merupakan pengakuan bahwa hidup didunia ini memang plural; berbangsa-bangsa, suku-suku, dan tingkat kehidupan. "Tetapi ia bukan sekedar memahami dan mengakui perbedaan, tapi juga bersedia untuk bergaul secara beradab, damai, santun, dan baik. Hidup keragaman itu dengan cara saling menghormati, saling menghargai (Sukriadi, 2007). Pengertian pluralisme dalam konteks ini mencakup pengertian: pertama, keberadaan sejumlah kelompok orang dalam satu masyarakat yang berasal dari ras, agama, pilihan politik dan kepercayaan yang berbeda. Kedua, suatu prinsip bahwa kelompok-kelompok yang berbeda ini bisa hidup bersama secara damai dalam satu masyarakat (Umi, 2013).

Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu masyarakat, baik itu perbedaan dalam segi agama, suku, ras, adat-istiadat, dll. Menerima kemajemukan berarti menerima adanya perbedaan. Namun, bukan berarti menyamaratakan, tetapi justru mengakui bahwa ada hal yang tidak sama. Selanjutnya, agama merupakan peraturan-peraturan yang mengikat manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Maka orang yang beragama adalah orang yang teratur, orang yang tentram dan orang yang damai, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain dari segala aspek kehidupannya.

Agama pada esensinya terlingkupi pada tiga persoalan pokok, yaitu: (1) keyakinan, keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam. (2) peribadatan, peribadatan yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. (3) sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Dengan demikian maka, pluralisme agama adalah sebuah sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara dan bahkan

mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural tersebut.

Setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan (Firdaus, 2014). Kerukunan umat Hindu penyungsong Pura Agung Surya Bhuvana dengan umat non Hindu di Kota Jayapura, Papua didasari oleh sikap kultural mereka yang terbuka dan dialogis.

Dalam kaitan ini, Lynch (2000) mengidentifikasi adanya lima kategori seseorang atau kelompok yang berimplikasi pada sikap kulturalnya: Pertama, sikap eksklusif, yaitu mengagungkan superioritas sistem kepercayaan sendiri dan menonjolkan hak untuk menyebarkan sistem itu seluas mungkin. Kedua, sikap *apologetic* (membela diri) baik dalam arti mempertahankan doktrin ketika ditantang dari luar maupun dalam arti usaha untuk menunjukkan bahwa doktrin sendiri superior di banding doktrin-doktrin lain. Ketiga, sikap sinkretik, yaitu mengakui beragamnya tradisi keagamaan yang tidak hanya dalam masyarakat yang multi-budaya, tetapi juga ada dalam diri pribadi. Keempat, sikap inklusif. Sembari menegaskan superioritas sistem kepercayaan sendiri, sikap inklusif menerima validitas atau hak sistem kepercayaan lainnya untuk eksis, meskipun, sistem kepercayaan lain tersebut dianggap kurang sempurna dan kurang benar. Kelima, sikap pluralis, yakni mengakui bahwa kebenaran itu beragam dan bersikap positif terhadap kesamaan tujuan dan fungsi semua agama. Pluralisme mengambil posisi bahwa agama sendiri tidak dapat mewakili pemenuhan ataupun penyempurnaan agama-agama lain (Pranowo, 2004).

Secara teologis, sikap dan pandangan seseorang tentang kehidupan beragama akan lebih toleran bila ia memiliki pandangan teologis yang bisa menerima perbedaan dan mendukung toleransi kehidupan beragama. Sesuai dengan kriteria sikap yang diidentifikasi oleh Lynch (2000), penyungsong Pura Agung Surya Bhuvana dengan umat non Hindu di Kota Jayapura, Papua memiliki ke-

cenderung sikap yang inklusif, yakni menerima validitas atau hak sistem kepercayaan lainnya untuk eksis, meskipun, sistem kepercayaan lain tersebut dianggap kurang sempurna dan kurang benar.

Penyungsu Pura Agung Surya Bhuvana dengan umat non Hindu di Kota Jayapura, Papua juga memiliki kecenderungan sikap yang pluralis, yakni mengakui bahwa kebenaran itu beragama dan bersikap positif terhadap kesamaan tujuan dan fungsi semua agama. Praktik pluralitas kehidupan beragama tercermin melalui perilaku toleran mereka. Seseorang atau sekelompok orang disebut toleran bila ia memiliki sikap atau pandangan sebagai berikut. (a) membolehkan orang lain secara bebas menganut kepercayaan atau agama yang berbeda; (b) membolehkan orang lain secara bebas merubah atau mengganti agamanya; (c) membolehkan orang lain mempraktekan agama atau kepercayaannya, (d) menolak diskriminasi dalam pekerjaan, pelayanan dan lain-lain, (e) bisa menerima para penganut agama yang menganggap agama mereka saja yang benar; dan (f) melakukan upaya-upaya wajar untuk mengakomodir kebutuhan keagamaan orang lain (Anonim, 2016).

Multikultural merupakan fakta keanekaragaman budaya, sedangkan multikulturalisme merupakan respon normatif terhadap keanekaragaman tersebut. Parekh mengajukan tiga proposisi dalam memahami multikulturalisme, yaitu: Pertama, keterikatan manusia secara budaya; yaitu manusia berkembang dan hidup dalam sebuah dunia yang telah terstruktur secara kultural dan menjalankan kehidupan dan relasi-relasi sosialnya dalam kerangka sistem makna yang diturunkan secara kultural. Kedua, pluralitas budaya; yaitu di mana perbedaan budaya merepresentasikan perbedaan sistem makna dan visi terhadap kehidupan yang baik, karena tiap-tiap budaya menyadari keterbatasan jangkauan kapasitas dan emosi manusia, dan hanya dapat memahami sebagian dari totalitas eksistensi manusia, maka ia membutuhkan budaya lain untuk dapat memahami dirinya sendiri secara lebih baik, untuk memperluas horizon intelektual dan moralnya, membentangkan imajinasinya, dan menyelamatkan dirinya dari kecenderungan

untuk memutlakkan dirinya. Ketiga, masing-masing budaya terbentuk secara plural dan multikultural; budaya tumbuh sebagai hasil dari interaksi sadar maupun tak sadar dengan budaya lain, dan mencerminkan percakapan terus menerus di antara tradisi dan aliran pemikiran yang berbeda (Parekh, 336).

Perbedaan budaya, menurut Parekh merupakan sesuatu yang positif dan merupakan sumber dari kreativitas dan modal bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Kerukunan umat Hindu penyungsur Pura Agung Surya Bhuvana dan umat non Hindu di Kota Jayapura merupakan sebuah model tentang masyarakat nusantara yang multi budaya (multikultural). Secara umum, masyarakat multikultural (cultural pluralism) membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka dan ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa (Azzuhri, 2012).

Kesadaran multikultural ini penting dalam pergaulan antar budaya yang perlu sikap saling menghormati satu sama lain. Kesadaran multikultural juga menjunjung tinggi pentingnya sikap dan perilaku toleransi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multi etnik ini. Sikap toleransi ini penting dalam membina kehidupan bangsa yang multikultural. Keberagaman budaya masyarakat nusantara ini merupakan konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran atau agama (Maslikhah, 2007: 748).

5

MERAJUT KERUKUNAN MELALUI SENI-BUDAYA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari ribuan suku bangsa, dengan realitas sejarah, tradisi, serta kepercayaan yang melatarbelakanginya. Kemajemukan ini akan menjadi potensi atau kekuatan, kemajuan dan kejayaan bilamana dapat dikelola dengan baik. Tetapi sebaliknya, kemajemukan itu akan menjadi malapetaka, sumber kehancuran bila tidak dikelola dengan semestinya.

Dalam upaya mengelola potensi seni-budaya masyarakat Papua, keberadaan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua di Jayapura yang didirikan sejak 2014 menjadi amat urgen. Sebagaimana Perguruan Tinggi di Indonesia pada umumnya, ISBI Tanah Papua melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pertama, pengembangan pendidikan mutlak diperlukan untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia ke depan. Kedua, selain sebagai sebuah wadah atau sistem pendidikan, perguruan tinggi pun memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan disiplin ilmu yang diampu oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Ketiga, pengabdian pada masyarakat, yakni upaya mengimplementasikan konsep dan teori ilmiah ke dalam praktek nyata di lapangan. Teori-teori ilmiah bukan hanya berada di menara gading, tetapi bisa diterapkan secara nyata untuk kemajuan masyarakat Indonesia secara luas.

Sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diembannya, ISBI Tanah Papua di Jayapura berupaya mengembangkan sumber

daya manusia yang memiliki wawasan, *skill* yang memadahi di bidang seni-budaya. ISBI di Tanah Papua terus melakukan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat agar seni budaya bangsa terus maju, berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat berbendera merah putih ini.

5.1 PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI SENI-BUDAYA

Pada bahasan sebelumnya dinyatakan bahwa masyarakat Papua memiliki karakteristis dasar, yakni budaya ekspresif (Sroyer, dkk, 2018). Hal ini antara lain tercermin dengan adanya alat musik tifa dan legenda Burung Cenderawasih. Alat musik tifa merupakan simbol dari Papua sendiri, dimiliki oleh suku-suku yang ada di Papua. Tifa biasa dimainkan saat mengiringi ritual-ritual tradisional dalam kehidupan masyarakat adat di Papua.

Selanjutnya, burung Cenderawasih juga sangat dihormati dan disakralkan oleh masyarakat adat Papua, karena burung yang abermukim di hutan taah Papua ini diyakini sebagai burung surga yang diberi nama *bird of paradise* atau berbagai sebutan oleh tiap suku di Papua. Oleh karenanya, ketika simbol budaya ini dihadirkan dalam ornament bangunan Pura Agung Surya Bhuvana (PASB), maka alam bawah sadar masyarakat lokal Papua kembali hidup. Ornamen bangunan PASB sebagai wujud asimilasi budaya Hindu Bali dengan budaya Papua itu kembali menguatkan jati diri masyarakat adat Papua yang memiliki budaya tinggi. Dengan ornament itu, mereka merasa dihargai, sehingga menempatkan etnis Bali sebagai saudaranya sejati. Rasa persaudaraan antar etnis, khususnya etnis Bali dan Etnis Papua bisa terjalin lebih erat dan kuat.

Kehadiran Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua bisa menggali potensi budaya lokal untuk memperkuat formasi budaya nasional. Karena budaya nasional merupakan puncak-puncak dari mozaik budaya daerah, sehingga kebudayaan nasional Indonesia, bisa memberi rasa kepribadian bangsa

Indonesia sebagai suatu keseluruhan dan sebagai suatu kesatuan nasional. Kebudayaan nasional Indonesia perlu dikembangkan agar memiliki sifat khas dan memberi kebanggaan kepada semua orang Indonesia.

Koentjaraningrat (2009) menyebutkan bahwa terdapat tujuh unsur kebudayaan manusia universal, meliputi: (1) sistem teknologi; (2) sistem mata pencaharian hidup; (3) sistem kemasyarakatan; (4) bahasa; (5) sistem pengetahuan; (6) religi; dan (7) kesenian. Sebagai salah satu unsur kebudayaan, seni budaya yang dimiliki suatu suku bangsa akan memberikan identitas bagi suku bangsa yang bersangkutan. Identitas adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, lembaga atau bangsa lainnya, dengan adanya ciri-ciri yang berbeda itu maka akan muncul kekhasan serta keunikan tersendiri sehingga akan mampu memberikan kebanggaan bagi pemilikinya.

Seni budaya nusantara sebagai pemberi identitas diri yang jelas. Artinya, kekayaan seni budaya yang dimiliki bangsa Indonesia akan mampu menunjukkan jati diri bangsa Indonesia di tengah budaya global. Kekayaan seni budaya nusantara mampu memberikan sebuah kebanggaan sebagai suatu bangsa yang berbudaya tinggi.

Keragaman bentuk dan sifat kesenian yang muncul dari generasi sebelumnya dapat diwarisi oleh generasi saat ini. Sebagai ekspresi dari masyarakat pendukungnya, kesenian mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Kesenian di Indonesia yang berciri kebhinekaan merupakan kekayaan yang tiada taranya. Kesenian merupakan kekayaan yang secara terus-menerus perlu dibina dan dikembangkan, sehingga dapat dijadikan sebagai pemberi identitas dan perekat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa ini (Hassan, 1989).

Sedemikian pentingnya seni sebagai bagian dari aset budaya bangsa sehingga pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh adanya program-program yang dapat memajukan kebudayaan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 yang berbunyi pemerintah memajukan kebudayaan nasional

Indonesia. Begitu pula Ki Hajar Dewantara dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional, dengan sistem pendidikan yaitu sistem among, tujuan pendidikannya adalah 1) meningkatkan kemandirian; 2) menumbuhkan semangat dan rasa kebangsaan; dan 3) berakar pada kebudayaan nasional. Dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa (Hassan, 1989).

Pada dasarnya kesenian dapat digolongkan menjadi empat kelompok utama, yaitu (1) seni pertunjukan; (2) seni rupa; (3) seni media rekam; dan (4) seni sastra (Bandem, 1996: 1). Masing-masing kelompok memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakannya antara kelompok seni yang satu dengan yang lainnya. Pertama, seni pertunjukan adalah seni yang ekspresinya dilakukan dengan jalan dipertunjukan, karenanya seni ini bergerak dalam ruang dan waktu. Oleh sebab seni pertunjukan bergerak dalam ruang dan waktu, maka ia merupakan seni yang sesaat, seni yang tidak awet dan hilang berlalu setelah seni itu dipentaskan. Seni pertunjukan meliputi seni tari, seni musik, seni pencak silat, dan seni drama (*teathre*).

Kedua, seni rupa adalah seni yang ekspresinya tertuang ke dalam dua dan tiga dimensi, dan bentuk seni mempunyai rupa (visual) dan lazimnya bersifat statis. Wujud seni rupa meliputi seni lukis, seni patung, seni grafis, seni kriya, seni reklame, seni arsitektur, dan seni dekorasi.

Ketiga, seni media rekam adalah seni audio visual yang wujudnya dihasilkan oleh adanya rekaman seni dengan menggunakan alat-alat elektronik. Seni media rekam meliputi film, video, dan seni audio komputer lainnya.

Keempat, seni sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain, memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Seni sastra meliputi: puisi, roman, cerita pendek, epik, lirik, termasuk juga seni resitasi.

Pendidikan multikultural bisa dikemas melalui ke empat cabang seni tersebut, termasuk melalui seni tari. Selama berabad-

abad. seni tari dipertunjukkan pada berbagai konteks sosial, yakni untuk mendukung prosesi upacara (ritual), hiburan umum, festival, propaganda produk, kampanye politik, dan lain-lain. Seni tari dikenal sejak mengenal peradaban. Beberapa sumber tertulis menjelaskan bahwa tari telah berperan penting sejak zaman pra-sejarah. Data-data arkeologis menunjukkan adanya gambar-gambar manusia sedang menari yang terdapat di dinding-dinding goa. Budaya menari hidup dan berkembang di dalam berbagai kelompok masyarakat, dan inilah yang nampaknya melahirkan tarian-tarian tradisi hingga kini. Tradisi menari, yang mulanya hanya diperuntukkan bagi kepentingan ritus sosial dan keagamaan, kemudian berkembang menjadi suatu seni pertunjukan. Oleh sebab itu, tari sebagai bagian dari kebudayaan manusia dengan mudah dapat dijumpai di berbagai belahan bumi ini, dalam berbagai bentuk dan fungsinya (Bandem, 1996).

Tari merupakan ungkapan perasaan manusia yang dinyatakan dengan gerakan-gerakan tubuh manusia ekspresif yang bertujuan, ditetapkan secara kultural, mengandung ritme, mengandung nilai estetika, dan memiliki potensi simbolik (Hidayat, 2005:8). Lewat pengamatan terhadap bentuk dan gerakannya, dapat dipelajari keragaman budaya tari dari berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok dunia, termasuk di Nusantara ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Tarian dari Papua dengan hentakan-hentakan kaki yang kuat; tarian dari Bugis (Pakarena) dengan gerakan yang sangat lambat; tarian dari Aceh yang mengutamakan kekompakan kelompok seperti dalam tari Saman; tarian dari Minangkabau yang banyak mengandung gerakan-gerakan pencak silat; tari Jawa dengan gerakan mengalir seolah tanpa titik henti; tari Bali dengan dasar posisi tubuhnya yang meliuk asimetris dan sebagainya (Sustiawati, 2011).

Pembelajaran seni tari adalah sebuah strategi atau cara untuk mengubah atau membentuk sikap seseorang dari kondisi alami menjadi sikap atau kondisi yang memahami tentang fungsi fisik, mental dan memahami kondisi sosial yang berkembang di

lingkungannya. Pendidikan tari amat penting, baik bagi manusia secara individu, maupun bagi manusia secara sosial, Terkait fungsi tari bagi individu, Kihajar Dewantara dalam kurikulum pendidikan seni di Taman Siswa (dalam Hasan, 1989) menggarisbawahi bahwa pendidikan tari dapat berfungsi untuk (1) menghalusnya budi; (2) mencerdaskan otak; dan (3) menyehatkan badan. Keselarasan hidup manusia, bisa dicapai dengan mengoptalkan ketiga unsur kehidupan, yakni budi, otak, badan secara seimbang.

Selanjutnya pendidikan tari juga memiliki fungsi sosial, yakni untuk mengasah kesadaran bahwa manusia adalah makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam menjalani kehidupannya, manusia memerlukan orang lain. Artinya, manusia harus menerima, mengakui dan menghargai keberadaan sesamanya, keberadaan budaya yang beraneka ragam (multikultural). Seni tari menjadi media yang efektif untuk pendidikan multikultural.

Memahami beragam informasi mengenai budaya lokal merupakan titik tolak dalam pengembangan pendidikan multikultural bagi generasi muda. Bagian penting dari sistem pendidikan yang berwawasan multikultur adalah bagaimana menumbuhkan sensitivitas peserta didik akan kekayaan budaya masyarakat yang bersifat plural. Tari dapat dijadikan media edukasi untuk mempromosikan penghargaan kepada kelompok-kelompok budaya lainnya dan memungkinkan seluruh kelompok-kelompok budaya untuk mengalami kesamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan (Banks, 1979:238-239).

Pendidikan multikultur memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Pertama, *content integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam atau pelajaran/disiplin ilmu. Kedua, *the knowledge construction process*, yaitu membawa peserta didik untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin). Ketiga, *an equity paedogogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik peserta didik yang beragam baik dari segi ras, budaya, (*culture*) ataupun

sosial (*social*). Keempat, *prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka (Banks, 1979).

Terdapat beberapa macam strategi dalam mengimplementasikan program pendidikan yang berwawasan multikultural, yaitu dengan: (1) mempelajari keberadaan kelompok-kelompok pendukung seni-budaya nusantara yang beragam; (2) mengidentifikasi aspek-aspek positif dari individu-individu atau kelompok-kelompok etnik yang berbeda; (3) memahami keragaman seni budaya nusantara dengan melakukan kegiatan apresiasi seni-budaya secara langsung; (4) mengambil pelajaran positif dari kegiatan apresiasi budaya nusantara yang beragam tersebut; (5) menagembangkan perilaku yang empati melalui bermain peran (*role playing*) dan simulasi; (6) mempraktikkan penggunaan "*perspective glasses*", yakni melihat suatu event, babakan sejarah, atau isu-isu melalui perspektif kelompok budaya setempat; (7) mengidentifikasi dan menganalisis stereotip-stereotip budaya; dan (8) mengidentifikasi seluruh kasus diskriminasi serta prasangka sosial yang berasal dari realitas kehidupan di masyarakat (Ainul, 2005).

5.2 MENGUATKAN KERUKUNAN MELALUI PERTUNJUKAN SENI-BUDAYA

Pertunjukan seni-budaya memang tak hanya memiliki tujuan untuk hiburan semata, tetapi juga mengandung pelajaran berharga. Seni budaya bukan sekedar sebagai tontonan tetapi juga sebagai tuntunan. Diantara pelajaran berharga dari seni-budaya adalah mampu mengaktifkan kesadaran akan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan persatuan. Dalam kaitan ini, *pengempon* Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) berkaborasi dengan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua secara reguler melakukan pementasan seni pertunjukan yang bertemakan membangun kerukunan antar warga bangsa.

Sebagaimana disebutkan pada bahasan sebelumnya (Bab IV), diantara karya *civitas akademika* ISBI Tanah Papua dalam upaya

menggairahkan kesadaran akan persatuan warga bangsa ini, antara lain diwujudkan dalam bentuk karya tari, yakni “Tari Kecak Rasa Papua”. Tari ‘Kecak”, merupakan bagian dari seni-budaya masyarakat Hindu Bali. Tari kecak tergolong sebagai sebuah tarian unik, tanpa dilengkapi dengan sarana alat musik, melainkan paduan seni dari suara-suara mulut atau teriakan-teriakan seperti “cak cak ke cak cak ke” disepanjang pertunjukan. Tarian kecak dipentaskan lebih dari 50 orang penari laki-laki atau perempuan yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu dan sambil menyerukan “cak” serta mengangkat kedua tangannya.

Para penari yang duduk melingkar mengenakan kain kotak-kotak (disebut kain *poleng*). Dengan latar belakang kisah Ramayana melawan Rahwana (rakasa) yang menculik Dewi Shinta (istri dari Ramayana) yang akhirnya berhasil diselamatkan Rahmana. Sebenarnya, tari “Kecak” berangkat dari ritual Sang Hyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada dalam kondisi tidak sadar ketika melakukan komunikasi dengan para dewa atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat.

Tari Kecak biasanya disebut sebagai tari “Cak” atau tari Api (*Fire Dance*) merupakan tari pertunjukan massal atau hiburan dan cenderung sebagai sendratari yaitu seni drama, karena seluruhnya menggambarkan seni peran yang tidak secara khusus digunakan dalam ritual agama seperti pemujaan, odalan atau upacara lainnya. Bentuk-bentuk sakral dalam tari Kecak ini biasanya ditujukan dalam hal kerauhan atau *masolah* yaitu kekebalan secara gaib sehingga tidak terbakar oleh api. Tarian tersebut merupakan satu dari sekian banyak tari tradisional khas Bali yang mampu menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun asing yang datang ke Bali.

Tari Kecak sebagai Seni Pertunjukan Pariwisata Hibrid Komunal Bali memiliki aneka ragam ritual agama dan tradisi budaya yang bersifat sakral (*wali*), tontotan (*bebali*), dan tontotan untuk pariwisata (*balih-balihan*). Seni wali dan bebali meliputi jenis-jenis kesenian yang memiliki nilai-nilai religius, disakralkan. Pementasannya

berkaitan pada waktu dan tempat serta upacara. Sedangkan seni balih-balihan meliputi kesenian yang lebih menonjolkan nilai-nilai hiburan dan estetis di mana seni pertunjukannya lebih bersifat sekuler. *Balih-balihan* dipentaskan kapan dan di mana saja tanpa ada batasan waktu, tempat dan peristiwa yang mengikat. Berbagai jenis seni pertunjukan ini mengalami perubahan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Perubahannya dari isi, bentuk, dan tata pementasannya. Hal ini terjadi karena para seniman dan praktisi seni pertunjukan Bali secara sadar dan kreatif memasukkan ide-ide baru ke dalam kesenian tersebut. Perkembangan pariwisata kemudian memberikan pengaruh terhadap fungsi dan pementasan tari sakral. Diawali dengan kedatangan wisatawan ke Bali yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan tari sakral menjadi tontotan. Misalnya, Tari Kecak yang terinspirasi tari sakral, yaitu Tari Sanghyang.

Tari Kecak diciptakan dari kolaborasi antara seniman Bali Wayan Limbak bersama pelukis Jerman Walter Spies. Tari Kecak kemudian dipopulerkan ke dunia pariwisata oleh Limbak dan Spies. Perkembangan pariwisata berdampak pada seni pertunjukan di Bali. Sebelum pariwisata masuk ke Bali, Tari Sanghyang sakral dipentaskan pada waktu dan tempat tertentu pada sebuah upacara agama (*piodalan*). Tari Sanghyang dikreasikan menjadi seni pertunjukan Tari Kecak yang sengaja disuguhkan kepada wisatawan (Ruastiti, 2010).

Pementasannya bisa dilakukan di mana dan kapan saja tanpa terikat upacara keagamaan. Sebagai bentuk seni pertunjukan, keberadaan Tari Kecak semakin populer termasuk “Tari Kecak Rasa Papua” yang dikembangkan seniman ISBI Tanah Papua. Sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.1 Tari Cak Rasa Papua
(Dokumentasi : I Wayan Rai S., 2019)

Menurut Rektor ISBI Tanah Papua, Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A, seni budaya telah dijadikan sebagai media perekat bangsa. Pementasan seni budaya mampu menyatukan mahasiswa serta dosen yang berasal dari berbagai suku di Papua dan Nusantara. Salah satunya adalah dengan menciptakan menggelar “Tari Kecak Rasa Papua” untuk memperkokoh kerukunan antar umat beragama, serta memelihara kebersamaan antar warga bangsa yang sudah cukup solid di bumi Papua. Tari Kecak Rasa Papua juga diharapkan mampu menguatkan kasadaran multukultarlisme. Sebutan tari kecak rasa Papua didasarkan pada alasan bahwa penari yang membawakan tarian kecak tersebut terdiri dari keberagaman agama yang ada di dalamnya, ada yang dari Kristen, Islam, Hindu, Budha dan juga dari Katolik. Kenapa disebut ala Papua karena

penarinya berasal dari masyarakat Papua yang tergabung dalam Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua (Rai, 2019).

**Tabel 5.1 Beberapa Karya Seni-Budaya yang Menyerukan
“Persatuan dan Kepedulian terhadap lingkungan hidup”**

Bentuk Karya Seni-Budaya		Karya/Inisiator	Pesan Pokok
Kecak Papua	Rasa	Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua	Memicu semangat kebersamaan, persaudaraan
T a r i Cenderawasih	i	I Gede Manik (Seniman Bali)/	Keelokan Burung Cendrawasih
Tari Surga	Burung	Ni Luh Kompiang Sriwahyuni	Keindahan Burung Cendrawasih, Ragam gerak tari Bali dan Tari Papua
Tari King		Maharani Ayuk Listyaningrum, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta	Keelokan Burung Cenderawasih yang terancam punah

Di samping tari “Kecak Rasa Papua”, beberapa koreografer muda terus mengembangkan tari Cendrawasih. Salah satu tari Cendrawasih ciptaan baru berjudul “tari Burung Surga”, telah dihasilkan oleh Ni Luh Kompiang Sriwahyuni (2019) salah seorang koreografer muda, tamatan ISBI Tanah Papua. Terinspirasi dari keindahan warna burung Cendrawasih, berbekal dengan keterampilan menari Bali serta pengalaman menarikan tari daerah Papua Kompiang menciptakan Tari Burung Surga yang bernuansa akulturasi budaya Bali dan Papua, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.2 Tari Burung Surga Bernuansa akulturasi budaya Bali dan Papua
(Dokumentasi: Ni Luh Kompiang Sriwahyuni, 2019)

Tari Cendrawasih sendiri pertama kali diciptakan oleh seorang seniman Bali bernama I Gede Manik pada awal tahun 1920 an di subdistrik Sawan Kabupaten Buleleng. Sejak saat itu, pengembangan koreografi dan unsur-unsur tarian ini terus terjadi. Burung cendrawasih sendiri dalam mitologi Hindu Bali dianggap sebagai burungnya para dewa atau disebut Manuk Dewata. Sesuai dengan tema yang diangkat, para penari tari Cendrawasih dirias sedemikian rupa sehingga tampak teranalogi dengan bentuk tubuh Burung Cendrawasih. Untuk atasan, mereka menggunakan kemben, sementara untuk atasan menggunakan rok panjang dengan motif keemasan. Dengan ornamen jambul bergaya panji, gelang bahu, dan kalung emas, tari Cendrawasih ditampilkan sangat menarik menggambarkan tentang kekayaan hutan Papua.

Di samping tari “Kecak Rasa Papua”, beberapa lembaga pendidikan tinggi di bidang seni-budaya terus mengembangkan tari nusantara. Salah satu tari nusantara yang populer adalah tari yang mengisahkan tentang keberadaan Burung Cenderawasih.

Kendati burung berasal dari tanah Papua, namun penciptaan tari Cendrawasih berasal dari Bali. Tari Cendrawasih merupakan tari kreasi baru, diciptakan oleh seorang seniman Bali bernama I Gede Manik. Tari Cendrawasih pertama kali ditampilkan pada awal tahun 1920 an di subdistrik Sawan Kabupaten Buleleng. Sejak saat itu, pengembangan koreografi dan unsur-unsur tarian ini terus terjadi.

Sesuai namanya tari Cendrawasih adalah tarian yang gerakannya terinspirasi dari kehidupan burung, sama seperti tari Manuk Rawa dan tari Belibis yang juga merupakan bagian dari seni tari Bali. Burung cendrawasih sendiri dalam mitologi Hindu Bali dianggap sebagai burungnya para dewa atau disebut Manuk Dewata.

Selain itu, ekspresi wajah terutama gerak mata menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan irama musik pengiringnya.

Sesuai dengan tema yang diangkat, para penari tari Cendrawasih dirias sedemikian rupa sehingga tampak teranalogi dengan bentuk tubuh Burung Cendrawasih. Untuk atasan, mereka menggunakan kemben, sementara untuk atasan menggunakan rok panjang dengan motif keemasan. Adapun aksesoris yang digunakan adalah sebuah mahkota dengan ornamen jambul bergaya panji, gelang bahu, dan kalung emas. Salah satu elemen penting dalam tata rias tari Cendrawasih terletak pada riasan mata. Dengan balutan eye shadow hitam, riasan dibuat sedemikian rupa agar bola mata terlihat lebih besar. Elemen ini penting untuk menunjukkan kesan kuat pada setiap gerakan bola mata yang memang menjadi bagian paling menarik pada gerakan tari yang mengisahkan tentang burung kekayaan hutan Papua ini.

Di samping tari Cenderawasih kreasi lama muncul tari kreasi baru, yakni “Tarian King”. Tarian ini dikembangkan berangkat dari kegelisahan seniman yang melihat keberadaan Burung Cende-

rawasih kekayaan fauna Indonesia Timur yang semakin langka dan terancam punah. Cendrawasih hanya hidup di wilayah Indonesia Timur, tepatnya Papua – dewasa ini memang terancam punah. Keberadaanya di alam bebas (hutan Papua) juga terbatas, terancam punah.

Kepunahan burung Cendrawasih menjadi keprihatinan Maharani Ayuk Listyaningrum, alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Ia melampiaskan keresahan akan ancaman kepunahan Cendrawasih dengan menelorkan ide kreatifnya dalam bentuk “Tarian King”. Bersama seniman tari asal Papua yang tergabung dalam Maha Dance, Maharani menampilkan keindahan burung Cendrawasih dalam tarian kontemporer, yakni: *Tarian King* (Gambar 5.3).



Gambar 5.2
Tari King

(Sumber: Maha Dance, 2019)

Tarian King yang mengedepankan unsur budaya nusantara, khususnya Papua yang menyimpan ragam kekayaan yang berlimpah. Papua memiliki pesona alam yang indah, budaya yang unik, serta potensi ekowisata, termasuk kekayaan flora dan fauna,

yakni burung Cendrawasih yang menjadi simbol Papua. Tarian King merupakan gambaran dari keindahan burung Cendrawasih dan wujud dari keresahan akan ancaman kepunahan burung Cendrawasih.

Tarian King selain terinspirasi dari keberadaan burung Cendrawasih yang terancam punah, pertunjukan ini juga merujuk pada eksplorasi dari gerak alami burung Cendrawasih, dan gerak perkawinan burung Cendrawasih. Tarian kontemporer yang mengisahkan burung Cendrawasih ini ditopang oleh 5 penari laki-laki, 2 penari perempuan dan pemusiknya 2 orang. Mereka adalah mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Jayapura. Meskipun memiliki latar belakang tari yang berbeda, ketujuh penari ini mampu menggabungkan energi dan perasaannya dalam pertunjukannya Tarian King.

Kostum yang dipakai penari perempuan, kebanyakan dari daun-daun segar, sedangkan alat musik digunakan di antaranya Tifa, alat musik pukul khas Papua. Pesan pokok yang disampaikan melalui tarian King yang berdurasi 45 menit ini adalah seruan agar generasi muda penerus bangsa, untuk bersama-sama peduli menjaga keindahan alam, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Seni tari nusantara merupakan suatu ensiklopedi etnis yang menyimpan segala sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat pendukungnya. Seni tari nusantara sarat akan pesan-pesan filosofis, baik aspek spiritual, moral, dan sosial dari komunitasnya. Usaha diseminasi seni tari nusantara untuk anak-anak Indonesia melalui kegiatan penciptaan dan pementasan kolaborasi akan dapat meningkatkan apresiasi mereka terhadap seni budaya nusantara. Oleh karena itu sebagai anak bangsa, peserta didik sudah selayaknya mengetahui khazanah kesenian tradisi bangsanya sendiri.

Keberadaan seni dalam pendidikan yang difungsikan sebagai sarana pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pengembangan Silabus Mata Pelajaran Seni Budaya Sekolah Menengah Pertama (Direktoral Jenderal Direktoral Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah Depdiknas, 2006: 2) bahwa pendidikan seni sebagai mata pelajaran di sekolah diberikan atas dasar pertimbangan sebagai berikut. Pertama, pendidikan seni memiliki sifat multilingual, Pendidikan seni memiliki sifat multilingual, multidimensional dan multikultural. Multi-lingual bermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran, dan berbagai perpaduannya.

Multidimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultural mengandung makna pendidikan seni menumbuhkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam seni budaya nusantara dan mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk.

Kedua, pendidikan seni memiliki peran pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis alam logika, rasa estetis, dan artistiknya, serta etikanya dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multikecerdasan yang terdiri atas kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan adversitas (AQ), dan kreativitas (CQ), serta kecerdasan spiritual, dan moral dengan cara mempelajari elemen-elemen, prinsip-prinsip, proses dan teknik berkarya sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keindahan serta sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat sebagai saran untuk menumbuhkan sikap saling memahami, meng-hargai, dan menghormati.

Ketiga, pendidikan seni memiliki peranan dalam pengembangan kreativitas, kepekaan rasa dan inderawi serta kemampuan berkesenian. Kemampuan berkesenian ini bisa ditempuh melalui pendekatan belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan belajar tentang seni.

Keempat, bidang-bidang seni seperti musik, tari, drama, teater, rupa dan media memiliki kekhasan tersendiri berdasarkan kaidah keilmuan masing-masing. Dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni aktivitas menanggapi seni akan dapat menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam gagasan-gagasan keterampilan/keahlian proses kreasi seni serta mengapresiasi seni dengan cara mengilustrasikan pengalaman pribadi, mengeksplorasi (menggali) rasa, melakukan pengamatan dan penelitian (mempelajari) atas elemen, prinsip, proses dan teknik berkarya yang dikaitkan dengan nilai-nilai budaya serta keindahan dalam masyarakat yang beragam (Depdiknas, 2006: 2).

Senada dengan pendapat di atas Armstrong dan Carmen (1990) bahwa peran pendidikan seni yang bersifat multilingual, multi-dimensional dan multikultural pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai pembentuk kepribadian manusia secara utuh. Pendidikan seni berperan tidak hanya mengembangkan kemampuan manusia di bidang estetika saja, tetapi dapat juga berperan dalam pengembangan kemampuan di bidang logika dan etika.

Pendidikan seni dengan sifat multikultural berperan mengembangkan kepekaan sosial peserta didik, menanamkan kesadaran akan adanya perbedaan dan keanekaragaman budaya yang pada akhirnya dapat menjalin, menghargai, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap keragaman budaya yang pluralis, baik budaya yang dimiliki maupun budaya orang lain.

Pendidikan seni nusantara yang hadir sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah mempunyai jiwa yang suci dan memiliki misi yang mulia. Tujuan pendidikan seni Nusantara sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya, meliputi: (1) memperkenalkan sejumlah nilai luhur budaya Indonesia kepada para pelajar, untuk dipahami dan dihayati, sehingga dapat mengatasi goncangan budaya yang dihadapinya; (2) menumbuhkembangkan dan menanamkan harga diri pada anak didik supaya memiliki rasa sadar budaya dan tidak terasing atau tidak menjauh dari lingkungan budayanya sendiri; (3) menanamkan kebanggan, kecintaan, dan tanggung jawab kepa-

da kebudayaan sendiri serta menumbuhkan sikap saling menghormati; memperluas dan wawasan anak didik mengenai nilai-nilai budaya untuk memperkokoh kepribadian bangsa dan ketahanan budaya nasional (Lembaga Pendidikan Seni Nusantara, 2004.).

Apresiasi terhadap seni tari nusantara ini diharapkan membantu peserta didik mengenal jati dirinya dan sekaligus memahami pluralitas identitas bangsanya. Pada gilirannya, mereka akan mampu menghormati perbedaan dan keanekaragaman, dan secara arif menerima realitas pluralitas budaya masyarakat Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap kelompok etnis lain sehingga membantu meningkatkan rasa integrasi mereka sebagai bangsa yang multi etnis.

Melalui pendidikan seni nusantara diharapkan semangat nasionalisme, menjadi lem perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Betapa tidak, materi yang terkandung dalam kurikulum pendidikan seni Nusantara meliputi seni-seni tradisi yang ada dan berkembang di setiap jiwa anak negeri ini. Antar warga bangsa dapat saling menghargai dan mengapresiasi demi terwujudnya Indonesia bersatu. Jadi, model pendekatan “budaya” yang ditawarkan oleh pendidikan seni nusantara sangat efektif bagi rekonsiliasi dan reformasi dalam pendidikan secara umum dan dalam dunia seni secara lebih khusus. Ini sesuai dengan amanat pendidikan multikultural yaitu mengakui dan menghormati adanya keragaman budaya.

Melalui seni nusantara akan diperoleh internalisasi pengalaman estetis yang berfungsi melatih kepekaan rasa yang tinggi. Dengan kepekaan rasa, nantinya mental seseorang, teramsuk peserta didik mudah diisi dengan nilai-nilai religiositas atau budi pekerti yang dapat menciptakan keharmonisan, kedamaian dalam suasana pergaulan di masyarakat (Salam, 2001).

ISBI Tanah Papua terus mengembangkan dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menciptakan situasi yang kondusif agar wilayah Papua tetap harmonis dan aman. Melalui seni-budaya, ISBI Papua terus berupaya mengkampanyekan pentingnya semangat multikulturalisme, persatuan dan perdamaian.

an. Hal ini antara lain tercermin dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan ISBI Tanah Papua. ISBI Tanah Papua secara regular melakukan pengabdian dengan *ngayah* pada saat *odalan* di beberapa tempat ibadah, yakni di Pura Agung Surya Bhwana Jayapura, Pura Nimbokrang, dan pura di Kabupaten Keerom.

Selain itu, ISBI juga aktif dalam penggarapan seni pertunjukan serta pameran seni rupa di berbagai moment pameran lokal maupun nasional, terlibat dalam Indonesian Dance Festival di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) 2018, dengan menampilkan pagelaran bertajuk 'Terang Telah Datang', hasil kolaborasi ISBI dengan mahasiswa Desain Fashion ISI Denpasar, dan seniman nusantara lainnya.



Gambar 5.3
Prof Rai dan Putri Suastini Koster di Bukit Jokowi
(Dokumentasi: I Wayan Rai, 2019)

Selain itu, ISBI Tanah Papua berkolaborasi dengan Ibu Putri Suastini Koster dalam pagelaran puisi Sumpah Kumbakarna yang dipagelarkan pada purnama kelima di Pura Agung Durya Bhuana Jayapura, pada 24 Oktober 2018, dan di Bukit Jokowi, Skyline Jayapura, pada tanggal 25 Oktober 2018.

Acara tersebut didukung Kasdam XVII Cendrawasih, Brigjen TNI I Nyoman Cantiyasa, PHDI Provinsi Papua dan PHDI Jayapura serta masyarakat Bali di Papua. Penonton dalam pementasan tersebut membludak dihadiri para seniman, budayawan, kritikus serta anak-anak SMA, serta masyarakat umum. Menurut Prof Rai, seni budaya dapat dijadikan sebagai media perekat bangsa. Sebagaimana tampak pada pementasan di bawah ini.



Gambar 5.4
Kegiatan Seni-budaya ISBI Tanah Papua
(Dokumentasi: ISBI Tanah Papua, 2019)

Melalui berbagai pementasan seni-budaya mampu menyatukan berbagai komponen masyarakat, termasuk mahasiswa serta dosen yang berasal dari berbagai suku di Papua dan Nusantara. Upaya membangun kebersamaan antar warga bangsa di Kota Jayapura, antara lain dilakukan oleh ISBI Tanah Papua dengan menggelar pagelaran seni-budaya yang menyerukan semangat nasionalisme, “pentingnya persatuan antar warga bangsa”. Hal ini antara lain diekspresikan dalam bentuk pagelaran “Tari Kecak Rasa Papua”,

dan pembacaan Puisi Sumpah Kumbakarna, Aku Papua dan pagelaran seni budaya lainnya (ISBI, 2019).

Guna menumbuhkan budaya kreatif di kalangan kampus, sejak tahun 2018 ISBI Tanah Papua membuat terobosan yaitu 'Sabtu Kreatif'. Setiap hari Sabtu kampus ISBI menggelar berbagai kegiatan seni-budaya untuk membangun budaya penciptaan kreatif dan pengkajian secara seimbang. Kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi civitas akademika khususnya mahasiswa ISBI Tanah Papua dalam berkarya sebelum mereka melaju ke karya Tugas Akhir (Humas ISBI, 2019).

ISBI di Tanah Papua terus mendukung peran aktif etnis Bali dalam mewarnai kehidupan masyarakat multikultural di Kota Jayapura. Bekerja sama dengan Organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura, ISBI terus mendukung upaya pengembangan kegiatan sosial keagamaan PASB yang inklusif, serta mendukung pengembangan kreativitas seni-budaya yang memperkuat kerukunan.

Seni-budaya cukup efektif dijadikan media edukasi untuk menumbuhkan multikulturalisme dan semangat kebangsaan karena: (a) pesan edukatifnya disampaikan dengan pendekatan budaya setempat, (b) disampaikan dengan lugas dan menghibur, dan (c) memakai bahasa atau ideom yang sesuai dengan budaya masyarakat sasaran.

Seni-budaya juga berperan penting dalam menggelorakan semangat untuk melestarikan potensi flora dan fauna (ekologis) seperti pesan yang terkandung dalam tari Cenderawasih dan tari King tersebut di atas. Tak kalah penting adalah pagelaran seni-budaya mampu menyulut dan mengaktifkan kembali semangat kebangsaan (nasionalisme) seperti isi baik-bait puisi sumpah Kumbakarna yang acapkali disampaikan oleh Putri Suastini Koster (Istri Gubernur Bali), sebagai berikut.

Sumpah Kumbakarna

"Terkutuk, Kanda Rahwana!

Menculik Shinta adalah mencuri mestika kerajaan Ayodya

Meski atas nama cinta, bukan begitu laku ksatria!

Kembalikan sang dewi ke pangkuan Sri Rama,

dan biarkan kuselesaikan tidurku yang tertunda."

Sepuluh kepala Rahwana menentang kata Kumbakarna

Diumbarnya taring dalam mulutnya,

dan dua puluh tangan terarah ke satu titik : medan laga!

Ke sana sang adik mesti menuntaskan baktinya

Tak ada waktu bersilang kata

Kemarahan Sri Rama mengguncang bumi dan angkasa

Membangunkan Hanoman mengumpulkan bala wanara,

dan dari delapan penjuru mata angin menyerbu Alengka

"Bukan demi Kanda Rahwana kupertaruhkan nyawa,

sebab raja durjana tak pantas dibela

Tapi tanah tumpah darah Alengka kujunjung tinggi

hingga puncak swarga!

Apa tak kupersembahkan bagi negeri?

Seandainya panah Sri Rama memenggal kedua tanganku,

kupertahankan kerajaan ini dengan kedua kakiku

Seandainya dipenggalnya juga kedua kakiku,

kulawan dengan tubuh buntungku

Sumpahku pada Alengka :

Perjuangan tak kan usai,

sebelum kepala terlepas dari raga,

sebab kesetiaan pada negeri hanya kepala taruhannya!"

Dhenok Kristianti, 2012

6

PENUTUP

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. Pura Agung Surya Bhuvana adalah sebuah tempat suci umat Hindu yang ada di Jayapura, Papua. Sejarah pendirian Pura Agung Surya Bhuvana terkait dengan pendirian Provinsi Papua pada tahun 1962. Semula umat Hindu yang umumnya PNS, TNI/Polri yang bertugas di Jayapura belum memiliki pura dan hanya mengadakan aktivitas sosial keagamaan di rumah I Made Matra, pegawai Pemprov Papua. Sejalan dengan perkembangan, jumlah umat Hindu yang terus meningkat, maka pada tahun 1979 para tokoh Hindu Kota Jayapura menyepakati untuk membangun Pura sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial dan pendidikan. Pembangunan PASB di Bukit Skyline terealisasi pada tahun 1982 dan diresmikan pada tahun 1990. Pada tahun 2012 renovasi PASB dilakukan sehingga bentuk fisik PASB menjadi megah seperti sekarang.

Diaspora (perpindahan) etnis Hindu Bali ke Papua yang kini menetap di Kota Jayapura adalah karena menjalankan tugas negara (sebagai PNS, TNI/Polri, mengikuti transmigrasi, atau sengaja bermigrasi untuk mengadu nasib. Ketika berada di Papua, etnis Hindu Bali menyemai kerukunan antar warga bangsa di Jayapura yang dilakukan melalui: (a) keterlibatan mereka menjadi bagian dari warga negara yang membangun Papua

sejak integrasi Papua ke pangkuan NKRI pada tahun 1962: (b) sikap menerima, mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya lokal dengan memasang ornament bangunan pura dengan gambar tifa dan burung Cenderawasih; (c) peran aktif etnis Bali melalui organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura; (d) pengembangan kegiatan sosial keagamaan PASB yang inklusif; dan (e) mendukung pengembangan kreativitas seni-budaya yang memperkuat kerukunan.

Tempat ibadah umat Hindu yang memiliki status sebagai Pura *Padma Bhuvana* ini diterima oleh masyarakat non Hindu setempat dan dikunjungi oleh umat non Hindu sebagai objek wisata budaya Kota Jayapura, Papua karena beberapa alasan, yaitu: (a) Bangunan Pura Agung Surya Bhuvana cukup megah dan artistik, dilengkapi hiasan ornament budaya lokal, yakni tifa dan burung cenderawasih; (b) Masyarakat Papua yang ada di Kota Jayapura merasa mendapatkan penghormatan yang tinggi oleh saudaranya yang beragama Hindu karena ornament tifa dan burung Cenderawasih adalah simbol masyarakat Papua yang dihormati; (c) Adanya sambutan atau penerimaan Pengelola Pura Agung Surya Bhuvana yang ramah dan sikap inklusif umat Hindu penyungsuang pura setempat, sehingga pura kebanggaan masyarakat Jayapura ini menjadi pusat studi *tour* bagi pelajaran dan mahasiswa serta masyarakat umum non Hindu yang ingin memahami tradisi Hindu (Bali).

Kerukunan umat Hindu penyungsuang Pura Agung Surya Bhuvana Papua dan masyarakat lokal terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek kehidupan sosial-keagamaan, sosial budaya yang didasari oleh adanya asimilasi budaya Hindu dengan budaya lokal berupa ornament tifa dan burung cenderawasih; dan sosial politik-ideologis, yakni kesadaran sesaudara warga bangsa Indonesia. Pura Agung Surya Bhuvana (PASB) merupakan simbol Hindu ditanah Kota Jayapura, Papua yang didasari oleh nilai teologis hindu dan nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat hindu dan non hindu setempat. PASB memiliki makna sebagai

media pendidikan tentang *Tri Hita Karana*, pengakuan adanya multi budaya (Multukulturalisme), serta sebagai wahana dalam mengukuhkan integrasi bangsa.

Seni-budaya berperan dalam mengembalikan semangat “kebersamaan dan persatuan” antar warga bangsa seperti pesan yang terkandung dalam tari kecak rasa Papua. Seni-budaya juga berperan penting dalam menggelorakan semangat untuk melesatarkan potensi flora dan fauna (ekologis) seperti pesan yang terkandung dalam tari Cenderawasih dan tari King tersebut di atas.

6.2 SARAN

Pura Agung Surya Bhuvana Kota Jayapura, Papua merupakan benda pusaka budaya hasil akulturasi budaya lokal dengan budaya Hindu Bali yang adaptif. Proses akulturasi dan asimilasi budaya lokal yang adaptif ini antara lain tercermin dalam pemakaian ornament tifa dan burung Cenderawasih pada beberapa bagian fisik bangunan Pura yang mampu menguatkan rasa kebersamaan antar warga bangsa dan mengokohkan integrasi bangsa Indonesia di tanah Papua. Keberadaan pusaka budaya, Pura Surya Agung Bhuvana dan kiprah umat Hindu di tanah Papua yang menguatkan integrasi bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini patut dijaga dan dikembangkan.

Kekeberhasilan etnis Hindu Bali dalam mewarnai dinamika kehidupan umat beragama di Jayapura antara lain ditentukan oleh adanya pendekatan seni budaya dalam membangun kerukunan antarwarga bangsa. PHDI Kota Jayapura dan *pengempon* Pura Agung Surya Bhuvana bekerjasama dengan Institut Seni Budaya (ISBI) Tanah Papua serta seniman lainnya terus menggelar berbagai moment apresiasi seni budaya di Kota Jayapura. Apresiasi seni-budaya yang mampu menggelorakan semangat kebersamaan, memantapkan kerukunan antarumat beragama dan mengokohkan integrasi bangsa di tanah Papua tersebut perlu digalakkan lebih lanjut di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik & A. C. Van Der Leeden, Durkheim dan Pengantar Sosiologi. Moralitas, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986).
- Adhisti. 2008. Kajian Arkeologis Dan Arsitektur Pura Maospait Gerenceng Bali (Scrip
- Adhisti.2008. Kajian Arkeologis Dan Arsitektur Pura Maospait Gerenceng Bali (Skripsi). Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Arkeologi UI Depok.
- Ainul Yaqin, M. (2005), Pendidikan Multikultural:Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, Pilar Media, Yogyakarta
- Akhmaloka. 2018. "Peran dan Tantangan Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0". Pidato Ilmiah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dalam angka Memperingati Hari Jadi ke -57 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Senin 10 September 2018.
- Ali, H. Mukti. 1975. Kehidupan Beragama Dalam Proses Pembangunan Bangsa. Bandung: Proyek Pembinaan Mental Agama.
- Alsa, Asmadi. 2003. Pendekatan Kwantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amin, Hamid dkk. 2013. Penerapan Hukum Pidana Adat Enggros Tobati Papua Dalam Perkembangan Hukum Pidana

- Nasional.<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files>, diakses ri 2020.
- Anonim. 2015a. Padma Buana; <https://hindualukta.blogspot.com/2015/11/siva-tatwa-padma-Bhuvana-makalah.html>
- Anonim. 2016. Ontario Consultants on Religious Tolerance see: http://www.religioustolerance.org/rel_tol3.htm diakses 13 Feb 2016
- Anonim. 2018. Prof Rai Masih Dipercaya Jabat Rektor ISBI Tanah Papua, <https://www.nusabali.com/berita/41588/prof-rai-masih-dipercaya-jabat-rektor-isbi-tanah-papua>, 14 Nov 2018
- Anugrah Andriansyah. 2017. Saat Hari Raya Nyepi suasana sama dengan di Pulau Dewata. <https://www.brilio.net/jalan-jalan/kampung-bali-di-sumut-buktikan-indonesia-itu-bhinneka-tunggal-ika-170111v.html>; Brilio.net, 12 / 01 / 2017
- Ariyanti. 2014. Persembahyangan Purnama dan Tilem : Studi Tentang Persembahyangan Masyarakat Bali Ke Pura Puseh dan Pura Dalem di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah (Skripsi). Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung.
- Arsana, I Gusti Ketut Gde. 2006. Segresi Sosial dan Pola Adaptasi Budaya dalam Kehidupan Pluralisme Agama di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Tesis S2. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana
- Awig-awig Pura Agung Surya Bhuvana (PASB), 2017.
- Azzuhri, Muhandis. 2012. Konsep Multikulturalisme Dan pluralisme Dalam Pendidikan agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah Keindonesiaan); Jurnal Forum Tarbiyah Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Bambang S. 2000. Tinjauan Manusia dan Nilai Budaya, Jakarta: Universitas Trisakti.

- Banks, J. (1979), "Shaping The Future of Multicultural Education", in the Journal of Negro Education. XL VIII, Summer No. 3, halaman 238-239.
- Barker, Chris. 2005. Cultural Studies: Teori dan Praktik (terj). Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Bikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory, (UK: Macmillan Press Ltd, 2002).
- BKSTI, 2017.BKSTI ub.ac.id /wp-content/upload/2017/10/keynote Speker Drajad Irianto.pdf.
- Blum, A. Lawrence, (2001). Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultura, Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro, Yogyakarta: Tiara Wacana
- BPS Kota Jayapura. 2019. Kota Jayapura Dalam Angka, 2018
- Brosur Pura Agung Surya Bhuvana, 2018.
- Capra, F., 2002, Jaring-Jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan, Fajar Pustaka, Yogyakarta.
- Daniel L. Pals. 1996. Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press.
- Depag RI. 1997. Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2010: Strategi Belajar Mengajar, Rineka Cipta. Jakarta Ruslan, Rosady.
- Drs. Jirhanuddin M.AG, Perbandingan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)h.
- Dwi Andini, Made, dkk. 2018. Mitos Dewi Hariti di Pura Candi Dasa, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem: Analisis Struktur, Fungsi dan Makna. Denpasar: Jurnal Humanis,

Fakultas Ilmu Budaya Unud Vol 22.1 Pebruari 2018: 228-235

- Dwi Andini, Made, dkk. 2018. Mitos Dewi Hariti di Pura Candi Dasa, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem: Analisis Struktur, Fungsi dan Makna. Denpasar: Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud Vol 22.1 Pebruari 2018: 228-235
- Elisabeth Adriana. 2012. Pembangunan Papua Problematika Politik Atau Ekonomi. Jurnal Penelitian Politik, LIPI, Vol 9, No 1 (2012) <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/444>
- Emile Durkheim, *The Elementary Form of the Religious Life* (London: George Allen & Unwin, 1947), 107; Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (New York: Oxford University Press, 1996), 89; dan Roland Robertson, *Sosiologi Agama*, terj. Paul Rosyadi (Jakarta: Aksara Persada, 1986), 76.
- Firdaus M. Yunus, *Agama Dan Pluralisme*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, (IAIN Sumatra Utara, 2014), hlm.72.
- Firdaus.(2012). Relasi Etnik dan Identitas Kewargaan di Kota Binjai. In H. Budiman (Ed.), *Kota-Kota di Sumatra; Enam Kisah Kewargaan dan Demokrasi* (pp. 133–190). Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Flassy, Don A.L. 2007. *Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua*. Jayapura: Pemda Tingkat I Irian jaya.
- Flassy, Don A.L. 2016. “Pengukuhan Balada Cenderawasih”. A paper presented at the seminar Dewan Kesenian Tanah Papua (Tanah Papua Art Council), in Jayapura.
- Flassy, Don A.L. 2016. “Pengukuhan Balada Cenderawasih”. A paper presented at the seminar Dewan Kesenian Tanah Papua (Tanah Papua Art Council), in Jayapura.
- Ghazali, A. Muchtar. 2011. *Antropologi Agama*. Bandung: Alfabeta.

- Halik, Aichi. 019. Pemerintah akan Pindahkan 7000 Penduduk Jawa dan Bali; <https://www.beritasatu.com/nasional/567508/pemerintah-akan-pindahkan-7000-penduduk-jawa-dan-bali> Beritasatu.com Kamis, 1 Agustus 2019 | 20:45 WIB
- Hassan, Fuad. (1989), *Renungan Budaya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hidajat, Robby. (2005), (2005), *Pengetahuan Seni Tari*, Universitas Negeri Malang, Malang
- Kaler, I Gusti Ketut. 1982. *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*. Jilid 2. Denpasar: Bali Agung.
- Kambu, M.R. 2008. *Prospek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura*. Jakarta: Indomedia Global. Kambu, M.R (dkk). 2009. *Satu Abad Kota Jayapura Membangun (1910- 2010)*. Jakarta: Indomedia Global.
- Kamma, F.C. 1955a *Volksordening op Biak; Biakse titels. Adat-rechtbundel 45: Nieuw Guinea. 's-Gravenhage: Nijhoff*, pp. 148-152.
- Karubaba, S.Y. (2008). *Ambai Inflectional and Derivational Morphology*. M.Phil. thesis. University of Leiden.
- Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya I*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kota Jayapura Dalam Angka, 2018
- Lembaga Pendidikan Seni Nusantara. (2004), "Pendidikan Seni Nusantara", dalam majalah Gong, Edisi 63/VI/2004, Yayasan Media, Seni dan Pendidikan Seni, Yogyakarta.
- Liana, Salbidah. 2016. *Kerukunan Umat Muslim, Hindu dan Budha di Gampong Keudah Banda Aceh*. Aceh: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Prodi Ilmu Perbandingan Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Liliweri, Alo Prof Dr., M.S.2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKIS

- M. Bambang Pranowo. 2004. Pendidikan Multikultural dan Masa Depan Bangsa, Pokok-pokok pikiran disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural, pada tanggal 1 September 2004 di Jakarta.
- Mantra, I. B. 2003. Demografi Umum. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mantra, Ida Bagus. 1996. Landasan Kebudayaan Bali. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Maskuri Abdullah. 2001. Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Maslikhah. (2007) Quo Vadis Pendidikan Multikultural Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan. Jawa Tengah: JP Books. M. Bambang Pranowo, Pendidikan Multikultural dan Masa Depan Bangsa, Pokok-pokok pikiran disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural, pada tanggal 1 September 2004 di Jakarta, hlm 7
- Missbach, A. _____. (2011). The Acehnese Diaspora after the Helsinki Memorandum of Understanding: Return Challenges and Diasporic Post-Conflict Transformations. *Asian Ethnicity*, 12 (2), 170-201.
- Missbach, A. (2012). Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nova, Yosi, 2016. Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016: 23-36.
- Paramadhyaksa, I Nyoman Widya. 2016. Filosofi Dan Penerapan Konsepsi Bunga Padma Dalam Perwujudan Arsitektur Tradisional Bali; *Jurnal Langkau Betang*, Vol. 3, No. 1, 2016 28
- Parekh, Bikhu. 2002. Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory. UK: Macmillan Press Ltd.

- Peraturan bersama Mentri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat
- PHDI Kota Jayapura. 2018. Profil Pura Agung Surya Bhuvana (PASB).
- Prof. Drs. S. Wojowasito (Penerbit CV Pengarang, Malang, 1977) terdiri dari dua kataMintargo, Bambang S., 2000, Tinjauan Manusia dan Nilai Budaya, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm 122.
- Rahmad, D. (2015). Gaya Interaksi dan Integrasi Sosial Anak Muda Rantau : Kasus Mahasiswa Kost di Air Tawar Barat, Kota Padang.*Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 4(2).
- Rahmawati, Ni Nyoman. 2018. Pergulatan Ideologi Keberagamaan Dalam Keluarga Dayak Katingan di Desa Tewang Tampang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Disertasi). Denpasar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- Rai S., I Wayan. 2017, "Kecak Dance with Papua Taste as An Intercultural Communication Media", Paper Presented at International Seminar IHDN Denpasar.
- Rai S., I Wayan. 2018, "Why Are they Singing and Dancing. Art Creativity and Identity in Biak Tradition Papua", paper presented at The International Seminar FKI Surabaya.
- Rai S., I Wayan. 2016, "Touristic Performing Art in Bali:Tradition and Modernization" in The Folk Performing Arts in Asean. Bangkok:Princess Maha Cakri Sirindorn Anthropology Center.pp. 77-91
- Rai S., I Wayan. 2017, "Building Virtual Foundation through The Nobel Values of Nusantara's Cultural Heritage.Proceeding of 6th International Seminar on Nusantara Heritage ISI Denpasar.

- Rai S., I Wayan. 2017, "Building Virtual Foundation through The Nobel Values of Nusantara's Cultural Heritage.Proceeding of 6th International Seminar on Nusantara Heritage ISI Denpasar.
- Rai S., I Wayan.2016, "Sekala-Niskala in Artistic Tradition in Bali and Papua", paper presented at The International Seminar FKI at ISI Padang Panjang.
- Rai S., I Wayan.2017, "TIFA di tanah Papua: Teks dan Konteks". Seminar Nasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- Rai S., I Wayan.2018, "WOR Aurak at the marriage proposal ceremony by Biak Tribe young man to a Sentani Tribe young woman", paper presented at 6th ICTM-PASEA Symposium, Kinabalu, Malaysia.
- Rai S., I Wayan.2019. Integrating Art, Culture, and Tourism to Embrace the Industrial Revolution 4.0, A Case Study of Pura Agung Surya Bhuvana, Jayapura, Papua; Makalah pada International Seminar On Art, Culture, And Tourism (ISACT); Jayapura: Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, Jayapura
- Richard T. Schefer. 2012. Sociology: A Brief Introduction (New York: Mc Graw-Hill, 1989), 336. Lihat juga Silfia Hanani, Menggali Interelasi Sosiologi, dan Agama. Bandung: Humaniora.
- Ridha Kusuma Perdana, Tim Bahasa Media Indonesia Diaspora Minggu 26 Februari 2017, 03:01 WIB; <https://mediaindonesia.com/read/detail/93967-diaspora>
- Ritzer, George & Douglas J Goodman.2008. Teori Sosiologi Modern, Jakarta;Kencana.
- Roland Robertson. 1986. Sosiologi Agama, terj. Paul Rosyadi. Jakarta: Aksara Persada.
- Roy Ratumakin, Tarian Kecak Rasa Papua; <https://www.jubi.co.id/tarian-kecak-rasa-Papua/>, 2 Oktober, 2015

- Ruslan, Rosady. 1947. *Emile Durkheim, The Elementary Form of the Religious Life*. London: George Allen & Unwin.
- Safran, William. 1991 *Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return*; *Jurnal of Trnanational Studies* (Spring), Volume I, No. 1, 1991.
- Salam, Sofyan. (2001), "Pendekatan Ekspresi Diri, Disiplin, dan Multikultural dalam Pendidikan Seni Rupa", dalam jurnal *Wacana Seni Rupa*, Vol. 1 No. 3, halaman 12-22.
- Sroyer, Alvian, dkk. 2018. *Eksplorasi Etnomatematika Rumah dan Alat Musik Tradisional Masyarakat Biak-Papua*; *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* Vol. 8, No. 3, Desember 2018, pp. 175-184p-
- Sukriadi Sambas, Acep Apirudin. 2007. *Dakwah Damai*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suroto Hari. 2020. *Menelisik Sejarah Kota Jayapura*; <https://www.jubi.co.id/menelisik-sejarah-kota-jayapura/>
- Sustiawati, Ni Luh. 2011. *Kontribusi Seni Tari Nusantara dalam Membangun Pendidikan Multikultur*; *Jurnal Mudra*, Volume 26, Nomor 2, Juli 2011. p 126-134.
- Syaiful Bahri, Djamarah. 2010. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taum, Yoseph Yapi; 2015. *Kekerasan dan Konflik di Papua: Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya*; *Jurnal Penelitian*. Volume 19, No. 1, November 2015, hlm. 1-13
- Titib, I *Made*. 2003. *Teologi & simbol-simbol dalam agama Hindu* (Cet. 2). Surabaya: Paramita.
- Todaro, M. P. 1983. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

- Umi Sumbulan, Nurjanah. 2013. Pluralisme Agama makna dan lokalitas pola kerukunan antar umat beragama. (Malang: UIN-Maliki Press.
- Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahyuuddin dkk, Pendidikan Agama Nasrani/ Masyarakat Lokal Untuk Perguruan Tinngi, Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,2009.
- Wetipo, Wempi dan Marthen Medlama. 2015. Gunung Versus Pantai Dalam Perspektif Nilai-Nilai Hidup Bersama. Yogyakarta: Penerbit Asda Media.
- Wiana, 2004. 2004. Menuju Bali Jagadhita: Tri Hita Karana Seharai-Hari dalam Bali: Menuju Jagadhita Aneka Perspektif.
- WJS. Poerwadarmita. 1980. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka.
- Yuliana. 2018. Pinang Dalam Kehidupan Orang Papua Di Kota Jayapura betel Nut In Thelife Of Orang Papua In Kota Jayapura (Disertasi). Makasar: Program Studi S3 Antropologi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- Zoetmulder. 1995. Kamus Jawa Kuna-Indonesia. Jakarta: Penerbit Gramedia.

INDEKS

A

Adhisti, 14, 149
Adnan, 5
Adriana, 3, 152
Ainul, 129, 149
Akhmaloka, 8, 117, 149
Ali, 5, 106, 149
Andini, 13, 151, 152
Anonim, 82, 121, 149, 150
Arafat, 2
Arbain, 2, 3
Ariyanti, 14, 150
Armstrong, 138
Arsana, 16, 17, 150
Atharvaveda, 111
Awig-awig, viii, 83, 94, 109, 150
Azzuhri, 122, 150

B

Bambang, 109, 150, 153, 154
Bandem, 126, 127, 132, 133, 135, 150
Banks, 128, 129, 151
Barker, 28, 151
BKSTI, 9, 151
Bungin, 30

C

Catur Asrama. See
Catur Purusa Artha, viii
Cenderawasih. See

D

Depag RI, 4, 107, 151
Depdiknas, 137, 138
Diaspora, ii, iii, iv, vi, viii, 59, 60, 146, 154, 156
Durkheim, 99, 110, 149, 152, 156

F

Firdaus, 64, 120, 152
FKUB, viii, 19, 64, 84, 96, 97, 144, 146

G

Geertz, 27
Ghazali, 54, 152
Godschalk, 56

H

Halliday, 23
Hassan, 126, 152
Hidayat, 127
Hollandia, viii, 39, 40, 41

I

Ikbar, 20
Indradewi, 81
ISBI, iii, v, viii, 65, 99, 100, 105, 114, 123, 124, 125, 129, 132, 133, 137, 140, 141, 142, 144, 148, 150, 155

J

Jirhanuddin, 19, 151

K

Kaelan, 20
Kambu, 46, 54, 55, 153
Kartanegara, 6
Kecak, ix, 99, 100, 130, 131, 132, 133, 142, 155, 156
Keesing, 45, 153
Koentjaraningrat, 21, 98, 114, 125, 153
Kuper, 27

L

Lauer, 24
 Liana, 16, 153
 Lynch, 120, 121

M

Mambal, 15
 Mantra, 60, 62, 63, 112, 153
 Marett, 21
 Maslikhah, 122, 153
 Missbach, 60, 62, 154
 Moloeng, 31
 Mubarak, 1

N

Nasution, 31
 NKRI, ix, 3, 9, 61, 62, 63, 66, 68, 81,
 107, 108, 146, 147

P

Padma Bhuvana, viii, 59, 67, 71, 116,
 146
 Parekh, 121, 122, 151, 154
 PASB, iv, v, ix, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29,
 30, 31, 33, 59, 64, 67, 68, 72, 73, 77,
 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91,
 92, 94, 96, 97, 98, 100, 104, 105,
 106, 107, 108, 109, 110, 116, 124,
 129, 144, 145, 146, 147, 150, 154
Pasraman, ix, 84, 150
 Pateda, 22, 105
 Pelly, 2
Pengempon. See
Penyungung, ii, iii, iv, ix, 76, 81, 121
 Perdana, 60, 156
 PNG, ix, 35, 66

R

Rahmad, 64, 154
 Rahmawati, 12, 154
 Rai, ii, iii, 7, 8, 63, 65, 72, 74, 80, 84,
 91, 92, 93, 114, 132, 141, 150, 155

Religi, viii, 20, 53
 Ritzer, 24, 85, 156
 Robertson, 110, 152, 156

S

Safran, 60, 156
 Salam, 140, 156
 Semiotika, ix, 21
 Sobur, 21
 Soekarnopura, ix, 41
 Soeleman, 114
 Sroyer, 104, 124, 156
 Sustiawati, 127, 156
 Syaiful, 85, 151, 156

T

Tari king, ix
Tat Twam Asi, ix, 111, 112
 Taum, 3, 156
Tifa, x, 7, 9, 10, 21, 49, 100, 101, 102,
 103, 104, 105, 115, 119, 124, 137
 Titib, 18, 75, 157
 TMII, ix, 140
Tri Hita Karana, viii, x, 16, 63, 94, 110,
 111, 112, 113, 116, 117, 147, 157
Tri Kaya Parisudha, ix, 111, 112
Tri Loka, x, 75

U

Umi, 119, 157

W

Wahyuddin, 95, 157
 Weber, 110
 WHDI, x, 80, 84, 96
 Wiana, 75, 157

Y

Yuliana, 46, 48, 53, 157

Z

Zoetmulder, 75, 157